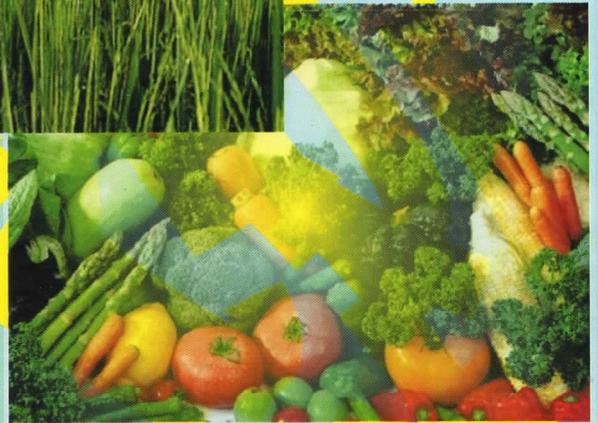
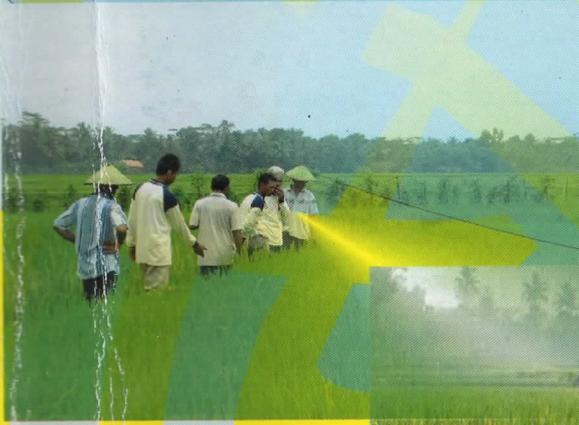


9

ANALISIS RENCANA STRATEGIS PROGRAM KETAHANAN PANGAN 2010-2015 DI PROPINSI KEPULAUAN RIAU



**Ikeu Tanziha
Yayuk F. Baliwati
Sutardiono**



**DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

ISBN : 978-979-9172-61-7

**ANALISIS RENCANA STRATEGIS
PROGRAM KETAHANAN PANGAN 2010-2015
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Oleh :
Dr Ir Ikeu Tanziha, MS
Dr Ir Yayuk Farida Baliwati, MS
Ir. Sutardiono**

**DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2009**

RINGKASAN

Provinsi Kepulauan Riau dengan 5 kabupaten dan 2 kota di dalamnya memiliki karakteristik agroekologi yang tidak seluruhnya sesuai atau memiliki keunggulan komparatif untuk produksi pangan telah menjadikan Provinsi ini sebagai *'net importer'* pangan, khususnya beras. Keragaman potensi produksi dan daya beli pangan antar daerah juga mengakibatkan adanya keragaman masalah ketahanan pangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi ini. Meski dengan sistem perdagangan yang terbuka antar wilayah kabupaten, Provinsi dan juga antar negara tidak setiap daerah harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri, namun sangatlah penting untuk mempunyai suatu perencanaan jangka panjang dalam pemenuhan kebutuhan pangan khususnya, dan pembangunan ketahanan pangan dan gizi pada umumnya agar dapat dicapai suatu kontinuitas dan stabilitas pemenuhan kebutuhan pangan bagi setiap penduduk Kepulauan Riau. Oleh karena itu sangatlah penting bagi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membuat suatu Analisis Strategis Ketahanan Pangan

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau menghadapi berbagai kendala dan tantangan sebagai berikut.

1. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang relatif tinggi berimplikasi pada tingginya laju kebutuhan pangan, sementara produksi dan laju produksi pangan setempat relatif lebih rendah sehingga terjadi kesenjangan antara produksi lokal dan kebutuhan pangan yang berakibat pada tingginya ketergantungan pangan dari pasokan luar daerah/luar negeri. Peranan produksi pangan lokal, khususnya beras saat ini masih jauh di bawah 50 persen dari total kebutuhan.
2. Kapasitas produksi pangan di Provinsi Kepulauan Riau semakin terbatas karena : a) masih tingginya konversi lahan produktif ke lahan non pertanian tanaman pangan (perumahan, perkebunan, fasilitas sosial); b) kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan sehingga hasilnya tidak mampu mensejahterakan petani dan berakibat pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi; c) terbatasnya teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani; d) kurangnya bimbingan kepada

- petani karena tidak difungsikannya institusi penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu, e) jenis tanah yang didominasi oleh tanah merah yang hanya dapat ditanami jenis tanaman tertentu; dan f) terbatasnya jumlah air untuk pertanian dan sistem pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan;
3. Kurang berkembangnya areal pertanian pangan (tanaman pangan, perikanan dan peternakan) baik sebagai akibat kurangnya investasi ke arah itu/kompetisi dengan areal perkebunan sawit, maupun masih tingginya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian memerlukan suatu rencana tata ruang wilayah yang mantap guna menetapkan alokasi lahan pertanian. Alokasi lahan pertanian ini perlu didukung dengan peraturan daerah guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dan tata ruang wilayah;
 4. Tingkat ketergantungan pangan pada pasokan luar daerah yang tinggi memungkinkan terjadinya kerawanan pangan apabila tidak diimbangi dengan implementasi Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi yang baik dan tepat waktu, dukungan prasarana dan sarana transportasi dan pergudangan yang memadai yang memungkinkan mobilisasi pangan antar kabupaten/kota dan antar waktu untuk menjamin stabilitas harga dan akses pangan bagi yang membutuhkan;
 5. Rataan konsumsi pangan yang masih belum memenuhi norma gizi seimbang (PPH), dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap beras, konsumsi minyak dan lemak serta gula yang berlebih, serta di sisi lain kontribusi pangan hewani, sayuran dan buah, kacang-kacangan serta umbi-umbian masih jauh dari norma yang dianjurkan menurut PPH. Ketidakseimbangan ketersediaan pangan, rendahnya daya beli, dan faktor ketidaktahuan merupakan unsur-unsur penyebab ketidakseimbangan konsumsi pangan tersebut.
 6. Sekitar 1 anak per 10 anak masih mengalami masalah gizi kurang. Berdasarkan indeks kerawanan pangan yang dikembangkan oleh WFP, dua kabupaten yaitu Lingga dan Natuna tergolong cukup rawan dengan penyebab utama produksi pangan yang rendah (khususnya Kota Batam) dan kombinasinya dengan tingkat kemiskinan, serta akses terhadap air bersih serta fasilitas kesehatan yang rendah (jarak yang > 5 km).

7. Kelembagaan pangan di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota (Badan Ketahanan Pangan) belum terbentuk dan berfungsi. Pada tingkat masyarakat kelembagaan ketahanan pangan yang berkembang lebih mengarah pada kelembagaan untuk mendukung 'coping mechanism', sementara tidak terdapat kelembagaan cadangan pangan seperti lumbung pangan.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional yang terutama diarahkan pada upaya menjamin ketersediaan dan akses setiap rumah tangga dan individu terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah dan mutu yang baik, aman dikonsumsi serta sesuai norma gizi agar dapat menunjang hidup yang aktif, produktif dan sehat sepanjang waktu, sesuai amanat UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan.

Berdasarkan hal itu, tujuan penyusunan Analisis Strategis Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau 2009-2015 adalah untuk memberikan panduan dalam penyusunan kebijakan dan program ketahanan pangan yang mencakup lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau yang tangguh melalui suatu iklim yang kondusif bagi berfungsi dan berkembangnya subsistem produksi, ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan secara sinergis dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang sesuai norma gizi seimbang dan mengutamakan kemandirian dan potensi lokal serta mengurangi ketergantungan pada daerah/negara lain;
3. Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat, sepanjang waktu bagi setiap rumah tangga/individu;
4. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal baik sumber karbohidrat maupun sumber protein, vitamin dan mineral dalam kerangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan bergizi seimbang, sekaligus menurunkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada beras;
5. Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu pemantauan kewaspadaan dini terhadap adanya indikasi gejala rawan pangan,

gizi kurang, gizi buruk dan kelaparan melalui implementasi SKPG serta melakukan langkah-langkah operasional yang diperlukan dalam penanganan masalah pangan dan gizi meliputi antisipasi/mitigasi, dan tanggap darurat bagi kelompok rawan pangan;

6. Membangun cadangan pangan daerah yang dikelola oleh masyarakat melalui kerjasama masyarakat, termasuk swasta dan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk mewujudkan ketahanan pangan di setiap rumah tangga dan meningkatkan pendapatan petani;
7. Memantapkan rencana tata ruang wilayah dan menetapkan alokasi lahan pertanian dengan peraturan daerah guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dan tata ruang wilayah;
8. Memantapkan kelembagaan struktural ketahanan pangan daerah melalui pembentukan unit kerja ketahanan pangan dan Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga fungsional koordinasi, baik antar lembaga, maupun antar instansi terkait di provinsi serta kabupaten/kota.
9. Mengembangkan kerjasama jaringan distribusi dan informasi pangan baik inter maupun intra kabupaten/kota serta menggerakkan partisipasi dan komitmen dari seluruh stakeholders yang ada di daerah serta merevitalisasi dan mengembangkan sistem penyuluhan agar mampu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan oleh penyuluh pertanian, kesehatan dan gizi dalam upaya pemantapan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan mengatasi kerawanan pangan dan gizi

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan Analisis Strategis Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Berkembang dan diimplementasikannya sistem informasi dan pemantauan serta penanganan kerawanan pangan dan gizi
2. Menurunnya persentase rumah tangga defisit energi, anak balita gizi kurang dan daerah yang mengalami kerawanan pangan;
3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu (keragaman dan keamanan pangan) yang cukup

sesuai AKG dan PPH sebelum atau selambat-lambatnya tahun 2015

4. Menurunnya tingkat ketergantungan pangan dari luar dan tercapainya kestabilan ketersediaan dan harga pangan antar waktu dan antar wilayah seiring dengan peningkatan produksi pangan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk menghadapi masalah dan tantangan yang menghambat proses dan kinerja sub-sub sistem ketahanan pangan, baik sub-sistem produksi dan ketersediaan pangan, distribusi, dan konsumsi serta status gizi, serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan dan mengupayakan tercapainya status gizi yang baik bagi setiap rumah tangga/individu.

Kebijakan ketahanan pangan yang disusun dikelompokkan atas kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah dan panjang. Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah kurang pangan (kerawanan pangan) dan gizi kurang, baik melalui upaya-upaya yang bersifat kedaruratan untuk mengatasi kerawanan pangan transien (mendadak), maupun upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dalam mengatasi masalah pangan dan gizi yang dihadapinya (untuk kerawanan pangan kronis). Termasuk dalam kebijakan jangka pendek adalah tersusunnya kelembagaan formal ketahanan pangan daerah di tingkat provinsi maupun semua kabupaten/kota pada tingkat yang dipandang efektif untuk merencanakan dan mengelola program pembangunan ketahanan pangan di wilayahnya.

Kebijakan jangka menengah dan panjang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Provinsi Kepulauan Riau dalam produksi/penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan bagi seluruh penduduknya sepanjang waktu agar dapat hidup aktif, produktif dan sehat. Secara rinci kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Jangka Pendek

- a. Pengembangan dan pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan pengembangan jaring pengaman pangan untuk penanggulangan kerawanan pangan dan gizi

- b. Pengembangan ketahanan pangan pada kelompok rawan pangan kronis (pemberdayaan rumah tangga miskin dan rawan pangan/gizi)
- c. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan struktural ketahanan pangan (Dewan dan badan/Unit Ketahanan Pangan) di tingkat provinsi dan di setiap kabupaten/kota.

2. Kebijakan Jangka Menengah Dan Panjang

a. Peningkatan produksi pangan

Kebijakan di bidang produksi pangan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan anekaragam pangan dari produksi setempat dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal di bidang tanaman pangan, perikanan, peternakan dan juga perkebunan melalui:

- i. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data sumberdaya lahan potensial untuk produksi pangan
- ii. Memantapkan rencana tata ruang wilayah, penataan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan, air, perairan dan laut, serta menetapkan alokasi lahan pertanian dengan peraturan daerah guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan
- iii. Perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur pendukung produksi pertanian, khususnya sistem irigasi untuk meningkatkan frekuensi tanam dan produktivitas lahan
- iv. Revitalisasi peran koperasi dalam pengadaan dan penyaluran input dan pemasaran hasil
- v. Pengembangan teknologi produksi dan terutama teknologi pasca panen, khususnya untuk menekan kehilangan pasca panen pada saat proses perontokan, pengeringan, penggilingan, maupun transportasi
- vi. Peningkatan insentif produksi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang diiringi dengan pentargetan sasaran dan pengawasan yang ketat untuk menjamin efektifitas dan efisiensi insentif produksi

- vii. Melakukan pengembangan sistem penyuluhan agar mampu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan dalam produksi dan pemanfaatan hasil pertanian

b. Pengembangan Ketersediaan Pangan

- i. Peningkatan kemampuan dan kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan swasta untuk secara sinergis berperan aktif dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani,
- ii. Fasilitasi pengembangan industri pangan yang mampu meningkatkan mutu dan keragaman pangan yang tersedia
- iii. Pengaturan impor dan ekspor pangan untuk menjamin ketahanan pangan
- iv. Mengembangkan kerjasama jaringan distribusi dan informasi pangan baik inter maupun intra Provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;

c. Pengembangan distribusi dan aksesibilitas pangan

- i. Peningkatan efisiensi dan kelancaran distribusi pangan
- ii. Peningkatan pengawasan kelancaran pasokan pangan dan stabilitas harga pangan strategis
- iii. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan daya beli pangan melalui kegiatan produktif dan berkesinambungan

d. Pengembangan konsumsi pangan yang aman dan bergizi seimbang serta perbaikan status gizi

- i. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pemilihan pangan yang aman dan bergizi seimbang
- ii. Pengembangan diversifikasi konsumsi pangan
- iii. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan
- iv. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan status gizi balita

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Karunia-Nya, karena tulisan yang berjudul **“Analisis Rencana Strategis Program Ketahanan Pangan 2010-2015 Di Provinsi Kepulauan Riau”** telah berhasil diselesaikan. Tulisan ini dibuat dalam rangka memberikan masukan pada Pemda Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan percepatan pencapaian ketahanan pangan berdasarkan kondisi lingkungan strategis. Secara khusus tulisan ini memberikan gambaran mengenai kajian situasi ketahanan pangan wilayah, kajian kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan, rumusan Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau untuk 2010-2015, serta rumusan alternatif kelembagaan struktural ketahanan pangan untuk penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaannya penelitian ini dibiayai oleh Pemda Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pejabat semua instansi yang terlibat terkait ketahanan pangan yaitu Dinas pertanian, Dinas perdagangan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, atas kerjasama yang diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, serta penulis berharap mudah-mudahan hasil penelitian ni bermanfaat.

Bogor, November 2009

Tim Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	i
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
BAB II ARAH KEBIJAKAN SERTA LANDASAN DAN KONSEP KETAHANAN PANGAN	3
2.1 Konsep Dasar Ketahanan Pangan.....	3
2.2 Analisis Strategis Ketahanan Pangan Kepulauan Riau	17
BAB III METODE	21
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	21
3.2 Pengolahan dan Analisis Data	22
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	27
4.1 Keadaan Umum Fisik Wilayah	27
4.1.1 Letak geografi	27
4.1.2 Topografi dan Keadaan Iklim	29
4.2 Keadaan Umum Sosial Wilayah.....	30
4.3 Keadaan Umum Ekonomi Wilayah.....	39
4.3.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha	40
4.3.2 Ekspor dan Impor Kepulauan Riau.....	42
4.3.3 Pengeluaran Rata-rata Perkapita.....	45
4.3.4 Status Kepemilikan tanah	48
BAB V ANALISIS SITUASI KETAHANAN PANGAN.....	51
5.1 Analisis Kebijakan terkait Ketahanan Pangan	51
5.2 Analisis Situasi Kini Substems Ketahanan Pangan	57
5.2.1 Produksi/Ketersediaan	57
5.2.2 Harga Pangan	67
5.2.3 Konsumsi Pangan.....	69
5.2.3.1 Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan.....	71
5.2.3.2 Pola Konsumsi Pangan.....	79
5.2.4 Status Gizi dan Kesehatan Masyarakat.....	81
5.2.5 Tingkat Kerawanan Pangan Kepulauan Riau	95

5.3 Analisis Proyeksi Konsumsi Dan Ketersediaan Pangan.....	103
5.3.1 Perencanaan Kebutuhan pangan	103
5.3.2 Penyediaan pangan (proyeksi dalam ton/tahun).....	108
5.4 Analisis Kelembagaan terkait Ketahanan Pangan	110
5.4.1 Kelembagaan Pemerintah	110
5.4.2 Kelembagaan Non Pemerintah (Swasta, Masyarakat, Organisasi Sosial Masyarakat).....	114
5.5 Analisis Lingkungan Strategis Ketahanan Pangan.....	116
5.6 Alternatif strategi percepatan diversifikasi konsumsi pangan	124
BAB VI MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	127
6.1 Permasalahan Produksi Pangan.....	127
6.2 Permasalahan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	128
6.3 Permasalahan Konsumsi Pangan, Status Gizi dan Status Kerawanan Pangan.....	131
6.4 Permasalahan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat.....	133
6.5 Rangkuman Masalah dan Tantangan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau.....	133
BAB VII REKOMENDASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	137
7.1 Tujuan	137
7.2 Sasaran.....	139
7.3 Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan	139
7.3.1 Kebijakan Jangka Pendek	140
7.3.2 Kebijakan Jangka Menengah Dan Panjang.....	140
7.4 Alternatif Kelembagaan Ketahanan Pangan	148
DAFTAR PUSTAKA.....	151
LAMPIRAN	153

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jenis dan sumber data	21
2. Luas daerah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, Tahun 2007	30
3. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, serta rasio tanggungan.....	32
4. Penduduk berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan Kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal di Kepulauan Riau, 2008	33
5. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melek huruf di Kepulauan Riau.....	35
6. Penduduk umur \geq 15 tahun yang bekerja seminggu yang lalu menurut Lapangan pekerjaan utama dan daerah tempat tinggal di Kepulauan Riau, Tahun 2008.....	36
7. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2008	37
8. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2007	38
9. Produk domestik regional bruto Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2008.....	39
10. Peranan Sektor Ekonomi Kepulauan Riau 2006-2008 (persen)....	41
11. PDRB per kapita Kepulauan Riau tanpa migas Tahun 2005 – 2008.....	42
12. Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Kepulauan Riau menurut Kelompok Komoditi, Tahun 2008.....	43
13. Impor Provinsi Kepulauan Riau menurut Kelompok Komoditi, 2008.....	44
14. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan menurut jenis pengeluaran dan daerah, 2008.....	46
15. Status kepemilikan tanah dirinci menurut jenis hak dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2008	49
16. Matriks program pada subsistem produksi pangan	52
17. Matriks program pada subsistem distribusi pangan.....	55

18. Matriks program pada subsistem konsumsi pangan.....	56
19. Matriks program pada subsistem status gizi	56
20. Luas panen dan jumlah produksi sektor pertanian sub-sektor tanaman pangan menurut jenis tanaman, Tahun 2007-2008 (dalam Ha dan Ton)	58
21. Luas lahan Sawah dan Bukan Sawah yang Tidak Diusahakan di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2008	59
22. Luas panen tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2008 (dalam Ha)	60
23. Produksi tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2008 (dalam Ha)	61
24. Luas areal dan jumlah produksi tanaman perkebunan menurut jenis tanaman, Tahun 2007 – 2008 (dalam Ha dan Ton).....	63
25. Jumlah Produksi Perikanan Menurut Jenis Sumber Tahun 2005 – 2008 (Ton).....	64
26. Jumlah ternak menurut jenis ternak Tahun 2005 – 2007	65
27. Komposisi produksi pangan antar Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2008 (dalam %).....	65
28. Produksi, Ketersediaan dan Kontribusi Energi beberapa jenis pangan di Kepulauan Riau	66
29. Harga pangan strategis Kepulauan Riau Tahun 2007 – 2008 (dalam Rupiah).....	68
30. Rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari menurut jenis bahan makanan dan daerah menurut jenis pengeluaran per kapita	69
31. Rata-rata konsumsi protein perkapita sehari menurut jenis bahan makanan dan daerah menurut jenis pengeluaran per kapita	70
32. Perkembangan konsumsi pangan penduduk pedesaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008.....	73
33. Perkembangan konsumsi pangan penduduk perkotaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008.....	76
34. Perkembangan konsumsi pangan penduduk pedesaan dan perkotaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008.....	78
35. Kontribusi energi pangan sumber karbohidrat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 dan 2008.....	79

36. Pola konsumsi sumber karbohidrat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 dan 2008	80
37. Persentase balita menurut Status Gizi (BB/U)* dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	81
38. Persentase balita menurut Status Gizi (TB/U)* dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	82
39. Persentase balita menurut Status Gizi (BB/TB)* dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	83
40. Persentase status gizi penduduk dewasa (15 tahun keatas) menurut IMT dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri.....	84
41. Persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.....	84
42. Jumlah kelahiran dan kematian bayi dan balita menurut Kabupaten/Kota.....	89
43. Jumlah kematian ibu maternal menurut kabupaten Riau tahun 2007	89
44. Cakupan kunjungan neonatus, bayi dan bayi BBLR yang ditangani menurut Kabupaten/Kota.....	91
45. Status gizi balita dan jumlah kecamatan rawan gizi menurut Kabuapten/Kota Provinsi	91
46. Jumlah PUS, Peserta KB, Peserta KB Baru, dan KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota.....	92
47. Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).....	93
48. Persentase Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007	93
49. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Menurut Kabupaten/Kota.....	95
50. Indikator komposit kerawanan pangan pada enam kabupaten di Propinsi kepulauan Riau tahun 2008	99
51. Proyeksi jumlah pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 – 2015	103
52. Sasaran skor PPH tahun 2009 – 2015	104
53. Proyeksi kebutuhan pangan berdasarkan PPH menurut sembilan kelompok pangan	105
54. Proyeksi ketersediaan pangan wilayah.....	108

55. Matriks dinas dan tanggung jawab pokok terkait pembangunan ketahanan pangan.....	113
56. Dinas terkait ketahanan pangan berdasarkan subsistem ketahanan pangan	114
57. Matriks evaluasi faktor internal pencapaian ketahanan pangan	120
58. Matriks evaluasi faktor eksternal pencapaian ketahanan pangan	123
59. Matriks SWOT pencapaian ketahanan pangan	126
60. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan, target kebijakan, kegiatan dan instansi yanf terlibat.....	143

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Faktor yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia	14
2. Sistem Ketahanan Pangan (sumber : BKP, 2006)	15
3. Pola penerapan analisis kebijakan	17
4. Analisis SWOT	19
5. Wilayah Kepulauan Riau	28
6. Perkembangan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan wilayah pedesaan Provinsi Kepri tahun 2005-2008.....	72
7. Perkembangan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan wilayah perkotaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008.....	74
8. Perkembangan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan wilayah pedesaan dan perkotaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 – 2008	77
9. Persentase penyebab kematian bayi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan komoditas strategis, bersifat politis dan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pangan merupakan salah satu hak asasi individu dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pangan juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk membangun ketahanan pangan.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi berimbang, baik pada tingkat wilayah, rumah tangga dan individu. Dengan demikian, ketahanan pangan di suatu wilayah harus diwujudkan secara merata sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Dalam konteks ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya dengan memperhatikan pedoman, standar dan kriteria pemerintah. Hal ini untuk menjaga agar kegiatan pembangunan di provinsi tetap konsisten dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional (PP Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan).

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk di suatu wilayah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota karena terkait dengan pelayanan dasar (PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota). Kondisi ini memberikan landasan dan peluang untuk pengembangan sistem ketahanan pangan daerah sesuai dengan kebijakan daerah.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat. Pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator dan regulator agar kegiatan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

Untuk optimalisasi sinergi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat, serta efektivitas kebijakan dan kegiatan operasional pembangunan ketahanan pangan, maka diperlukan suatu acuan bersama yang memuat konsep/filosofi, kebijakan, strategi, hingga kegiatan operasional, serta peran masing-masing pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyusunan kebijakan ketahanan pangan menjadi penting untuk dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya membentuk sistem ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan Di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014. Adapun secara khusus tujuan kegiatan ini adalah :

1. Mengkaji situasi ketahanan pangan wilayah
2. Mengkaji kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan
3. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau untuk 2010-2015
4. Merumuskan alternatif kelembagaan struktural ketahanan pangan

BAB II

ARAH KEBIJAKAN SERTA LANDASAN DAN KONSEP KETAHANAN PANGAN

2.1 Konsep Dasar Ketahanan Pangan

2.1.1 Landasan Hukum

Substansi dan kerangka dasar dalam dokumen program aksi langkah operasional kebijakan ketahanan pangan mengacu pada substansi penting yang dimuat dalam dokumen hukum berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar (UUD) RI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum mengamatkan untuk memberikan jaminan kepada warganegaranya agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Amanat tersebut tersurat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke dua, yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Selain itu, pada Pasal 34 terdapat pernyataan "menjamin hak warganegara atas perlindungan dari diskriminasi".
2. Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 maka "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya"
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. UU tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat wajib mewujudkan ketahanan pangan. Penjabarannya tercantum dalam beberapa peraturan pemerintah, yaitu
 - (a) Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur

tentang ketersediaan, cadangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat, daerah dan masyarakat serta pengembangan sumberdaya manusia dan kerjasama internasional.

(b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur pembinaan dan pengawasan di bidang label dan iklan pangan untuk menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

(c) PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, yang mengatur tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke wilayah Indonesia, pengawasan, pembinaan, serta peran serta masyarakat di bidang pangan dan gizi.

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang tersebut mengatur peran pemerintah yang lebih bersifat sebagai inisiator, fasilitator dan regulator, sedangkan peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ketahanan pangan. Menurut Pasal 22, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a). melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b). meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c). mengembangkan kehidupan demokrasi; d). mewujudkan keadilan dan pemerataan; e). meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f). menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g). menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h). mengembangkan sistem jaminan sosial; i). menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j). mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k).

melestarikan lingkungan hidup; l). mengelola administrasi kependudukan; m). melestarikan nilai sosial budaya; n). membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o). kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU tersebut memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan bersama dengan masyarakatnya. Kondisi ini juga memungkinkan berkembangnya kreativitas masyarakat untuk mengembangkan potensi pangannya sesuai dengan sumberdaya, budaya dan kebiasaan makan penduduk. Penjabarannya tercantum dalam beberapa peraturan pemerintah, yaitu :

(a) PP No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 7 mengatur urusan wajib yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan tersebut meliputi pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan tersebut meliputi: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian. Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

- (b) PP No 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pasal 22 ayat 5 disebutkan bahwa perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari: bidang perencanaan pembangunan dan statistik; bidang penelitian dan pengembangan; bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; bidang lingkungan hidup; bidang ketahanan pangan; bidang penanaman modal; bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; bidang pengawasan; dan bidang pelayanan kesehatan.
- (c) PP No 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau

akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.

Selain mengacu pada berbagai dokumen hukum nasional tersebut, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di berbagai level (termasuk daerah otonom Kabupaten Kepulauan Seribu) juga harus mengacu pada komitmen bangsa Indonesia dalam kesepakatan dunia. Kesepakatan tersebut adalah :

1. Deklarasi *World Food Summit* 1996 dan ditegaskan kembali dalam *World Food Summit : five years later (WFS:fyl)* 2001, serta *Millenium Development Goals (MDGs)* 2000, yaitu antara lain untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015 dan menjamin keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
2. Konvensi Internasional tentang komitmen Indonesia terhadap pembangunan pangan, gizi dan kesehatan, antara lain :
 - (a) Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia tahun 1948, menyatakan hak atas pangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak azasi manusia. Pada Pasal 25 dicantumkan bahwa "setiap orang mempunyai hak untuk mencapai standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kebutuhan dirinya dan keluarganya yang meliputi makanan, pakaian, rumah, perawatan kesehatan, dan pelayanan sosial yang dibutuhkan".
 - (b) Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ECOSOC) tahun 1968, yang mengakui hak setiap individu atas kecukupan pangan dan hak dasar untuk terbebas dari kelaparan.
 - (c) Konvensi tentang Hak Anak pasal 27 "Negara Anggota mengakui hak asasi dari setiap anak kepada standar kehidupan

yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak” yang mengakui hak anak untuk mendapatkan gizi yang baik.

- (d) Konvensi Internasional tentang Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1978 (CEDAW), yang memberi perlindungan khusus untuk nutrisi semasa kehamilan, menyusui, serta komitmen untuk menghapus diskriminasi bagi perempuan di perkotaan dan pedesaan.

Referensi lainnya untuk menyusun dokumen program aksi langkah operasional kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah dokumen kebijakan pembangunan nasional. Dokumen tersebut antara lain adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009, yang dituangkan dalam PP No. 7 tahun 2005 serta dokumen Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) memuat kebijakan dan program pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan.
2. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan tahun 2006-2009. **Pembangunan ketahanan pangan diarahkan** guna mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan pangan tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu; melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Pada aspek ketersediaan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk : (a) meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air; (b) menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya dari produksi dalam negeri; (c) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; (d) meningkatkan kapasitas produksi nasional dengan menetapkan kapasitas produksi nasional dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan. Pada

aspek distribusi pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk : (a) mengembangkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien; (b) mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah; (c) mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah. Pada aspek konsumsi pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk : (a) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (c) mengembangkan jaringan antarlembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; (d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dan sebagainya). **Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah** untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/rumahtangga dan individu serta di tingkat makro/nasional, sebagai berikut :

1. Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2200 kkal/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari.
2. Meningkatkan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2000 kkal/hari dan protein perkapita minimal 52 gram/hari.
3. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) minimal 80 (padi-padian 275 gram, umbi-umbian 100 gram, pangan hewani 150 gram, kacang-kacangan 35 gram, sayur dan buah 250 gram).

4. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat.
5. Mengurangi jumlah/persentase penduduk rawan pangan kronis (yang mengkonsumsi kurang dari 80% AKG) dan penduduk miskin minimal satu persen pertahun; termasuk didalamnya ibu hamil yang mengalami anemia gizi dan balita dengan gizi kurang.
6. Meningkatkan kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutan, swasembada jagung pada tahun 2007, swasembada kedele pada tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan swasembada daging sapi pada tahun 2010, serta meminimalkan impor pangan utama yaitu lebih rendah 10 persen dari kebutuhan nasional.
7. Meningkatkan rasio lahan per orang (*land-man ratio*) melalui penetapan lahan abadi beririgasi minimal 15 juta Ha dan lahan kering minimal 15 juta Ha.
8. Meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah
9. Meningkatkan jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran pangan ke seluruh daerah.
10. Meningkatkan kemampuan nasional dalam mengenali, mengantisipasi dan menangani secara dini serta dalam melakukan tanggap darurat terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi.

2.1.2 Sistem Ketahanan Pangan

Pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa, karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi **rumah tangga** yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (BAB I, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996). Secara operasional., Departemen Pertanian (1999) menterjemahkan ketahanan pangan sebagai suatu upaya untuk

mewujudkan ketersediaan, aksesibilitas dan stabilitas pengadaan pangan bagi masyarakat. Dari pengertian ini, masalah ketahanan pangan tidak melulu berkaitan dengan kemampuan pemerintah bersama masyarakat dalam pengadaan bahan pangan melalui kegiatan produksi, tetapi juga mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk dapat mengakses pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup, serta aman dikonsumsi.

Sebaliknya, suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik disebut dengan ketidaktahanan pangan/kerawanan pangan (*food insecurity*). Terdapat dua tipe ketidaktahanan pangan yaitu kronis dan transitori. Ketidaktahanan pangan kronis adalah ketidakcukupan pangan secara menetap akibat ketidakmampuan rumahtangga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan baik melalui pembelian di pasar atau melalui produksi sendiri. Kondisi ini berakar pada kemiskinan. Ketidaktahanan pangan transitori adalah penurunan akses terhadap pangan yang dibutuhkan rumahtangga secara temporer. Hal ini disebabkan karena adanya bencana alam sehingga menyebabkan ketidakstabilan harga pangan, produksi atau pendapatan.

Ketidakketahanan pangan pada berbagai tingkatan dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain (1) jumlah pangan yang tersedia memang tidak mencukupi kebutuhan pangan penduduk, (2) jumlah pangan yang tersedia secara statistik mencukupi kebutuhan pangan penduduk tetapi distribusinya kurang baik, (3) jumlah pangan secara statistik mencukupi tetapi masyarakat tidak memiliki kemampuan membeli. Ini berarti, krisis pangan tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan akses secara fisik akibat kelangkaan atau ketiadaan pangan akibat ketidakterpenuhinya faktor produksi pangan, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor non produksi pangan yang malah kerap kali menjadi penyebab dominan terjadinya krisis pangan.

Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 dan PP 38 Tahun 2007, ketahanan pangan merupakan salah satu isu utama pembangunan di Indonesia. Ketahanan pangan mempunyai peran strategis, yaitu : a) pangan menjadi

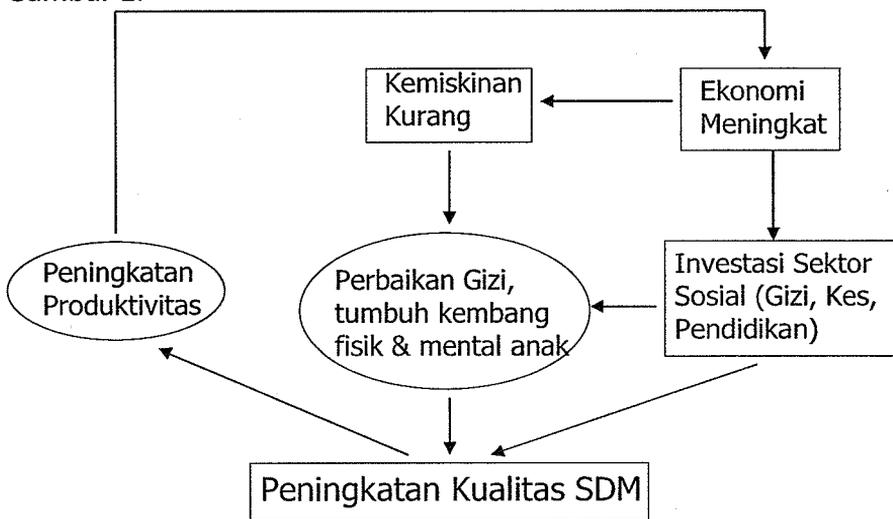
hak azasi, terlebih pada tahun 2005 masih terdapat 152 Kabupaten/Kota yang memiliki prevalensi gizi kurang 20-29.9% dan 101 Kabupaten/Kota yang memiliki prevalensi gizi kurang > 30%; jumlah orang miskin mencapai 37.17 juta jiwa atau 16.58% (66 % berada di pedesaan dan 56 % menggantungkan hidupnya dari pertanian); b) pangan menjadi kewajiban azasi, sesuai dengan pasal 7 PP No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah karena terkait dengan pelayanan dasar ; c) sebagai basis ekonomi nasional karena merupakan menjadi hajat hidup 40 % produsen; d) merupakan prasyarat peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pangan yang cukup & bermutu (tergantung pada jumlah, jenis, keragaman pangan yang tersedia dan dikonsumsi), aman, terjangkau (tergantung pada kepastian dan kemandirian pangan), dan sesuai dengan preferensi (tergantung pada Agama, budaya, selera) masyarakat; e) mencerminkan persatuan dalam keragaman budaya bangsa sehingga akan memperkuat ketahanan nasional.

Ketahanan pangan terdiri dari berbagai elemen, yaitu : 1) ketersediaan pangan; 2) aksesibilitas yang menggambarkan kemampuan untuk menguasai pangan yang cukup; 3) keamanan yang dapat diartikan sebagai **bebas dari bahan yang membahayakan kesehatan; stabilitas** — menunjuk pada kerentanan internal seperti penurunan produksi dan **keandalan** — menunjuk pada kerentanan eksternal seperti fluktuasi perdagangan internasional; 4) keberlanjutan merupakan kontinuitas dari akses dan ketersediaan pangan yang ditunjukkan oleh keberlanjutan usahatani maupun pasokan pangan dari wilayah lain. Secara umum ketahanan pangan mencakup 4 aspek yaitu kecukupan (*sufficiency*), akses (*access*), keterjaminan (*security*) dan waktu (*time*). Dengan demikian, ketahanan pangan mencakup berbagai level mulai dari individu, rumah tangga, wilayah maupun nasional dan berbagai komponen yang saling berkaitan yaitu produksi, ketersediaan, distribusi maupun konsumsi pangan yang berdampak pada status gizi penduduk.

Selain itu ketahanan pangan di tingkat nasional atau regional tidaklah berarti pada saat yang sama telah mencerminkan juga ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan individu. Menurut Simatupang (1999) ketahanan pangan global, nasional, regional, lokal dan rumah tangga serta individu merupakan suatu rangkaian sistem hierarkis. Ketahanan pangan nasional dan regional merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi ketahanan pangan masyarakat/rumah tangga dan individu. Sementara ketahanan pangan individu merupakan syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu pembahasan tentang ketahanan pangan tidak dapat dilakukan secara parsial.

Soekirman, (2000) menyatakan bahwa perbaikan gizi masyarakat melalui pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu investasi pembangunan ekonomi (Sampai tahun 1980-an banyak ahli ekonomi dan ahli perencanaan pembangunan, termasuk Bank Dunia, mengartikan investasi dalam arti sempit. Investasi pembangunan ekonomi artinya penanaman modal untuk membangun industri barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja. Titik berat investasi adalah untuk membangun prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan dan transportasi. Pada waktu itu jarang sekali para perencana regional dan daerah memasukkan perbaikan gizi, kesehatan dan pendidikan sebagai bagian suatu investasi ekonomi. Memasuki era tahun 1990-an, keadaan ini mulai berubah. Bank Dunia misalnya, dalam tahun 1992 menyatakan bahwa perbaikan gizi merupakan salah satu prioritas dalam memberikan pinjaman kepada negara berkembang sebagai suatu investasi pembangunan. Dinyatakan oleh Bank Dunia bahwa: "*Sumber daya yang dialokasikan untuk perbaikan gizi adalah suatu investasi dengan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang yang nyata. Hasil investasi di bidang gizi mendukung kebijakan pinjaman Bank Dunia yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi*". Sejalan dengan itu, UNICEF dalam berbagai konferensi internasional dalam tahun 1990-an merokemendasikan agar 20 persen anggaran pembangunan dari PBB (global), nasional, regional

dan lokal, serta 20 persen dana negara donor, dialokasikan untuk pembangunan sektor sosial, termasuk gizi dan kesehatan. Saran alokasi anggaran pembangunan untuk sektor sosial atau pembangunan SDM ini dikenal dengan saran alokasi twenty-twenty (20/20). Kebijakan tersebut pada dasarnya memperkuat hasil riset para pakar gizi dan kesehatan mengenai adanya hubungan antara pangan, gizi, kesehatan dan pembangunan ekonomi. Secara sederhana, mekanisme hubungan tersebut digambarkan oleh Martorell (1996), seperti terdapat pada Gambar 1.

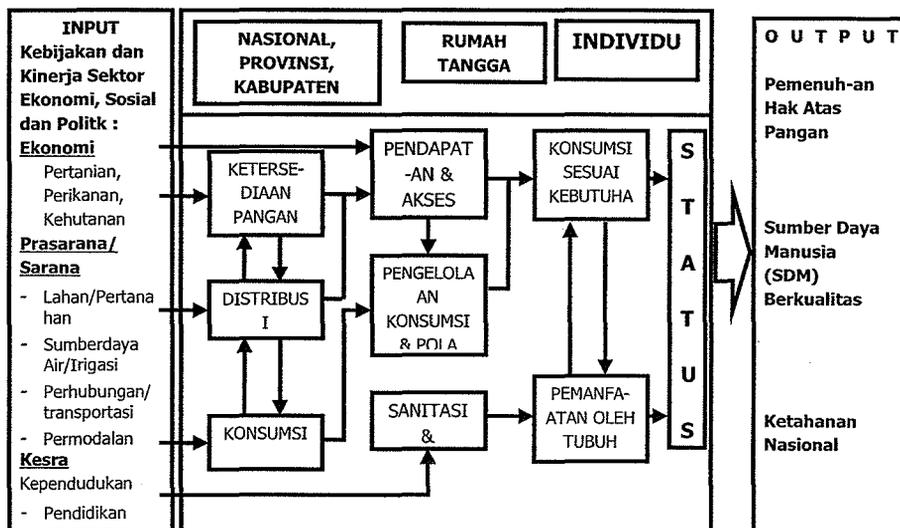


Gambar 1 Faktor yang berkaitan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia

Dalam bagan tersebut nampak bahwa investasi di sektor sosial (gizi, kesehatan, pendidikan) akan memperbaiki keadaan gizi masyarakat yang merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatnya kualitas SDM. Dengan meningkatnya kualitas SDM, akan meningkatkan produktivitas kerja, yang selanjutnya akan meningkatkan keadaan ekonomi. Dengan terjadinya perbaikan ekonomi maka akan mengurangi kemiskinan dan selanjutnya akan meningkatkan keadaan gizi, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas dan seterusnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan

konsumsi. Kinerja masing-masing subsistem tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan serta pemanfaatan pangan termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga , seperti terdapat pada Gambar 2.



Gambar 2 Sistem Ketahanan Pangan (sumber : BKP, 2006)

Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Indikator kuantitatif untuk mengukur ketersediaan pangan yaitu Angka Kecukupan Gizi (AKG) rekomendasi Widya Karya Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 yaitu untuk energi 2200 kkal dan protein 57 gram. Sedangkan indikator ketersediaan dari segi kualitas pangan yaitu Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai PPH ideal. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan

gizi, kemanan, dan kehalalan. Kinerja subsistem konsumsi tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga. Indikator kuantitatif konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke-VIII tahun 2004, dalam satuan rata-rata per kapita perhari untuk energi 2000 kkal dan protein 52 gram. Sedangkan indikator tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Terdapat paradigma baru dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan di Indonesia, yaitu (a) pendekatan pengembangan bergesear dari makro/agregat menjadi tatanan mikro/rumah tangga; (b) manajemen pembangunan berubah dari sentralistis menjadi desentralisis; (c) pelaku utama pembangunan berubah dari dominasi pemerintah menjadi peran masyarakat; (d) fokus komoditas berubah dari beras menjadi pangan; (e) penyediaan pangan murah berubah menjadi peningkatan daya beli rumahtangga; (f) perubahan perilaku pangan keluarga kearah gizi secara seimbang.

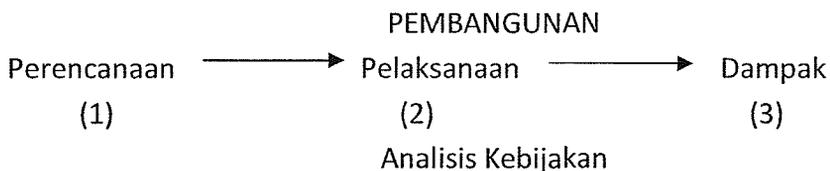
Perhatian terhadap pembangunan ketahanan pangan terus berlanjut sampai saat ini dan berkaitan berbagai aspek, yaitu perencanaan pangan dan gizi, pembangunan ekonomi, pertanian dan pedesaan, serta keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan demikian konsep ketahanan pangan *tidak sama* dengan swasembada (produksi) pangan (yang biasanya bias pada komoditas “beras”).

Fokus ketahanan pangan adalah manusia dan kemanusiaan artinya setiap manusia setiap saat mampu memenuhi kebutuhan pangan & gizi secara seimbang yang diperoleh dari anekaragam pangan untuk status gizi baik. Artinya, pangan harus tersedia setiap saat, dan di setiap wilayah; terjangkau oleh rumah tangga secara fisik dan ekonomis; dikonsumsi dengan dengan jumlah gizi yang cukup dan seimbang untuk tumbuh, sehat, produktif serta aman dari cemaran yang mengganggu kesehatan. Untuk hidup dan meningkatkan kualitas hidup, setiap orang memerlukan lima kelompok zat gizi (karbohidrat , protein, lemak, vitamin dan mineral) dalam jumlah cukup, tidak berlebihan dan tidak juga

kekurangan. Di samping itu, manusia memerlukan air dan serat untuk memperlancar berbagai proses faali dalam tubuh. Apabila kelompok zat gizi tersebut diuraikan lebih rinci, maka terdapat lebih dari 45 jenis zat gizi. Secara alami, komposisi zat gizi setiap jenis makanan memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Beberapa makanan mengandung tinggi karbohidrat tetapi kurang vitamin dan mineral. Sedangkan beberapa makanan lain kaya vitamin C tetapi miskin vitamin A. Apabila konsumsi makanan sehari-hari kurang beranekaragam, maka akan timbul ketidakseimbangan antara masukan dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif. Dengan mengonsumsi makanan sehari-hari yang beranekaragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang.

2.2 Analisis Strategis Ketahanan Pangan Kepulauan Riau

Analisis strategis ketahanan pangan Kepulauan Riau merupakan proses penyusunan perencanaan jangka panjang dengan tujuan melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan atau program tertentu. Penerapan atau analisis kebijakan dapat disajikan seperti dalam Gambar 3. Agung (1997) menyebutkan bahwa analisis kebijakan sebaiknya atau dianjurkan telah dilakukan mulai dari tahap persiapan/perencanaan, kemudian pada tahap atau periode pelaksanaan program dan kebijakan, dan akhirnya setelah periode pelaksanaan kebijakan tersebut berakhir.



Gambar 3 Pola penerapan analisis kebijakan

Pada tahap persiapan, analisis kebijakan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang mempunyai hubungan, baik langsung maupun tak-langsung, dengan permasalahan yang diperhatikan. Selanjutnya dalam tahap perencanaan, analisis kebijakan

dilakukan untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan/atau program yang direncanakan telah memenuhi kriteria untuk dapat dievaluasi ataukah belum.

Evaluasi dan monitoring harus dilakukan pada titik-titik tertentu dalam periode atau masa pelaksanaan program dengan tujuan untuk:

- (a) Menilai tingkat keberhasilan/keterlambatan pelaksanaan kebijakan dan/atau program yang bersangkutan, dan
- (b) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta faktor-faktor penghambat keberhasilan program, terutama faktor-faktor kuantitatif yang dapat dikendalikan atau dikontrol oleh para pengambil keputusan.
- (c) Berdasarkan hasil pengamatan dalam butir (a) dan (b), jika perlu dapat dibuat program/kebijakan baru atau penyesuaian; bahkan ada kemungkinan suatu program/kebijakan harus dibatalkan.

Di dalam penyusunan analisis kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau diperlukan beberapa dokumen dan data penunjang, antara lain :

- Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka
- Hasil Kajian Situasi Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Riau
- Riskesdas Provinsi Kepulauan Riau
- Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- Rencana Strategis:
 1. Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan;
 2. Perikanan dan Kelautan;
 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Dinas Kesehatan
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007

Analisis strategis ketahanan pangan Kepulauan Riau dilakukan dengan Analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan strategis sehingga dapat ditemukenal faktor kegagalan maupun kesuksesan pelaksanaan program ketahanan pangan. Menurut Rangkuti (2008) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dalam hal ini adalah

kebijakan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Di dalam perencanaan strategis harus dilakukan analisis faktor-faktor strategis internal dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis situasi dan model yang paling banyak digunakan untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT (Gambar 4).



Gambar 4 Analisis SWOT

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal yaitu peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor internal yaitu kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*). Berdasarkan gambar terlihat bahwa kuadran I merupakan situasi yang sangat menguntungkan yaitu terdapat peluang dan kekuatan, sehingga dapat dimanfaatkan. Sementara pada kuadran II terlihat meskipun terdapat berbagai ancaman, namun masih terdapat kekuatan internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang. Pada kuadran III, walaupun terdapat peluang tetapi juga dihadapi kendala/kelemahan internal. Fokus strategi pada kondisi seperti ini adalah meminimalkan masalah internal yang dihadapi. Kuadran IV merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena dihadapi berbagai ancaman dan kelemahan secara bersamaan.

BAB III

METODE

Penyusunan Analisis strategis ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan penjabaran kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan pembangunan pangan. Penyusunan kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah yaitu sebagai ekosistem kepulauan yang didominasi oleh sumberdaya perikanan dan kelautan. Di dalam penyusunan analisis kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau diperlukan beberapa dokumen dan data penunjang (Tabel 1)

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam pembuatan laporan Analisis Strategis Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya berupa data sekunder. Data tersebut antara lain:

Tabel 1 Jenis dan sumber data

No	Jenis Data	Sumber Data
1	Keadaan umum (Profil Wilayah)	Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2007 dan Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008
2	Keadaan Demografi	Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2007 dan Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008 Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007
3	Konsumsi	SUSENAS tahun 2005 dan 2008 (diolah)
4	Ketersediaan Pangan/ Produksi	Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2007 dan Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008 Statistik Perikanan Budidaya Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 (Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2008)

No	Jenis Data	Sumber Data
5	Status Gizi	Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 (Dinas Kesehatan tahun 2007)
6	Kebijakan dan Program	RPJM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 – 2010 (Bappeda tahun 2007) Renstra Dinas Kesehatan tahun 2005 – 2010 Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan tahun 2005 – 2010 Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan tahun 2005 – 2010 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2006 – 2010
7	TUPOKSI dalam Kelembagaan	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007

3.2 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis situasi ketahanan pangan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan identifikasi kondisi atau gambaran umum Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup kondisi fisik, ekonomi, sosial, dan demografi secara deskriptif terhadap data yang terdapat dalam Kepulauan Riau dalam angka tahun 2007 dan tahun 2008. Analisis yang dilakukan meliputi : 1) Situasi ketersediaan pangan mencakup kapasitas produksi pangan, jumlah dan mutu ketersediaan pangan, dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang terdapat dalam Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2007 dan 2008; 2) Situasi distribusi pangan mencakup sarana prasarana dan stabilitas harga dianalisis secara deskriptif berdasarkan data dalam Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2007 dan 2008; dan 3) Situasi konsumsi pangan dan gizi mencakup jumlah dan mutu konsumsi pangan diolah dari data SUSENAS menggunakan program aplikasi perencanaan pangan dan gizi kemudian dianalisis secara deskriptif, selanjutnya untuk status gizi dan kesehatan masyarakat

dianalisis secara deskriptif berdasarkan data Profil Kesehatan Kepulauan Riau tahun 2007.

Selain ketiga situasi di atas, analisis situasi ketahanan pangan juga dilakukan terhadap kebijakan dan kelembagaan terkait ketahanan pangan. Analisis kebijakan pangan dilakukan menggunakan *content analysis* (analisis isi). Dokumen yang dianalisis adalah Renstra Dinas/Instansi terkait ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Riau, antara lain Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu *content analysis* juga dilakukan terhadap kelembagaan yang ada di Kepulauan Riau, antara lain Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian berdasarkan data yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau.

Analisis isi atau *content analysis* dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dimulai dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen kebijakan serta dokumen lain yang terkait Ketahanan Pangan. Selanjutnya dibuat kategori yang digunakan dalam analisis berdasarkan subsistem ketahanan pangan sesuai dengan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP), yaitu produksi atau ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan status gizi. Berdasarkan data yang telah terkumpul dilakukan juga pengkodean menurut kategori yang telah dibuat. Terakhir dilakukan interpretasi data hasil analisis. Adapun kategori atau kode yang digunakan adalah sebagai berikut :

Produksi/Ketersediaan (Kode : 1)

1.1. Menjamin Ketersediaan Pangan

- 1.1.1. Pengembangan lahan abadi beririgasi dan lahan kering
- 1.1.2. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan

- 1.1.3. Pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai
- 1.1.4. Pengembangan dan penyediaan benih, bibit unggul, dan alsintan
- 1.1.5. Pengaturan pasokan gas untuk produksi pupuk
- 1.1.6. Pengembangan sistem permodalan yang kondusif bagi petani dan nelayan
- 1.1.7. Peningkatan produktivitas melalui perbaikan genetis dan teknologi budidaya
- 1.1.8. Peningkatan efisiensi penanganan pasca panen dan pengolahan
- 1.1.9. Penyediaan insentif di bidang pangan
- 1.1.10. Penguatan penyuluhan, kelembagaan petani/nelayan dan kemitraan
- 1.2. Menata Pertanahan & Tata Ruang /Wilayah
 - 1.2.1 Pengembangan reforma agraria
 - 1.2.2 Penyusunan tata ruang daerah dan wilayah
 - 1.2.3 Perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan
 - 1.2.4 Peneleaan sistem perpajakan progresif bagi pelaku konversi lahan pertanian subur dan yang
- 1.3. Pengembangan Cadangan Pangan
 - 1.3.1 Pengembangan cadangan pangan pemerintah (nasional, daerah dan desa)
 - 1.3.2 Pengembangan lumbung pangan masyarakat

Distribusi (Kode : 2)

- 2.1 Mengembangkan sistem Distribusi Pangan yang Efisien
 - 2.1.1 Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi
 - 2.1.2 Penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan
 - 2.1.3 Pemberian subsidi transportasi bagi daerah yang sangat rawan pangan dan daerah terpencil
 - 2.1.4 Pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat
- 2.2 Menjaga Stabilitas Harga

- 2.2.1 Pemantauan harga pangan pokok secara berkala untuk mencegah jatuhnya harga gabah/beras dibawah HPP
- 2.2.2 Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan
- 2.3 Meningkatkan Aksesibilitas Rumahtangga terhadap Pangan
 - 2.3.1 Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan
 - 2.3.2 Peningkatan efektifitas program raskin
 - 2.3.3 Penguatan lembaga pengelola pangan di pedesaan

Konsumsi (Kode : 3)

- 3.1 Melaksanakan Diversifikasi Pangan
 - 3.1.1 Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dengan gizi seimbang
 - 3.1.2 Pengembangan teknologi pangan
 - 3.1.3 Diversifikasi usahatani dan pengembangan pangan lokal
- 3.2 Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan
 - 3.2.1 Pengembangan dan penerapan sistem mutu pada proses produksi, olahan dan perdagangan pangan
 - 3.2.2 Peningkatan kesadaran mutu dan keamanan pangan pada konsumen
 - 3.2.3 Pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pangan

Status Gizi (Kode : 4)

- 4.1 Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - 4.1.1 Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan
 - 4.1.2 Peningkatan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dgn menyempurnakan sistem komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
 - 4.1.3 Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga
 - 4.1.4 Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah untuk penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi

Selain itu juga dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan/kekuatan Provinsi Kepulauan Riau, serta potensi yang masih dapat ditingkatkan dan ancaman yang dapat

diminimalisasi, sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan suatu strategi atau kebijakan. Analisis SWOT dilakukan dengan cara mengidentifikasi masing-masing komponen dalam analisis, yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (potensi atau peluang), dan *Threats* (ancaman) dari data sekunder yang tersedia dan kondisi/situasi Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau yang terkini berdasarkan hasil analisis. Pada tahap akhir dilakukan penyusunan program aksi langkah operasional tahun 2010-2015 dan perumusan alternatif kelembagaan struktural ketahanan pangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Keadaan Umum Fisik Wilayah

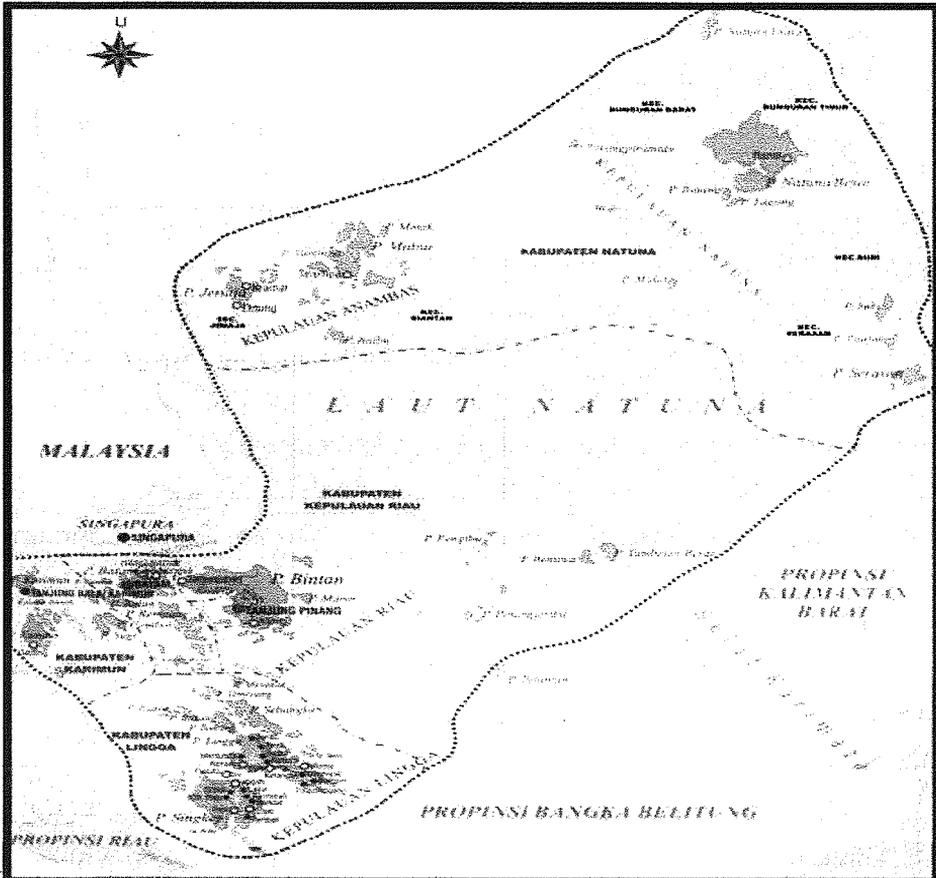
4.1.1 Letak geografi

Berdasarkan Kepulauan Riau dalam Angka (2008) diketahui wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang letak satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan perairan. Diantara pulau-pulau tersebut sebagian sudah berpenghuni dan sebagian lainnya belum. Dari 1 795 buah pulau yang berhasil diidentifikasi ulang oleh Bakosurtanal berdasarkan aturan yang diakui oleh Badan Dunia PBB, tercatat 394 pulau sudah dihuni dan sisanya sebanyak 1 401 pulau belum dihuni. Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana terdapat kedudukan Ibukota Provinsi, Tanjungpinang, Pulau Batam yang merupakan Pusat Pengembangan Industri dan Perdagangan, serta Pulau Rempang dan Galang (Barelang) yang merupakan kawasan perluasan wilayah industri Batam. Pulau Karimun serta Pulau Kundur yang merupakan pusat perekonomian hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun. Pulau Lingga yang mulai bangkit pasca pecahnya dari Kabupaten Bintan, Pulau Natuna serta Gugusan Pulau Anambas sebagai kegiatan pengembangan mega proyek gas alam cair. Wilayah Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 1.

Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0°40' Lintang Selatan dan 07°19' Lintang Utara serta antara 103°30' Bujur Timur sampai dengan 110°00' Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan juga beberapa Provinsi. Batas-batas wilayah tersebut meliputi :

- Batas Utara : Negara Vietnam dan Kamboja
- Batas Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi
- Batas Barat : Singapura, Malaysia, dan Riau
- Batas Timur : Malaysia Timur dan Kalimantan Barat

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. kemudian terdapat Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Natuna berdasarkan UU No. 32/2008.



Gambar 5 Wilayah Kepulauan Riau

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah sebesar 251 810.71 Km². Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yaitu seluas 241 215.30 Km² (95.79%) sedangkan daratannya hanya seluas 10 595.41 Km² atau sebesar 4.21% dari luas keseluruhan daratan dan lautan. Jika dipandang dari luas wilayahnya, maka Kabupaten Karimun memiliki luas terbesar dengan persentase sebesar 27.12% dari seluruh

luas daratan Provinsi Kepulauan Riau, diikuti Kabupaten Lingga 19.99% dan Kabupaten Bintan sebesar 18.36%. Kota Batam serta Kota Tanjungpinang hanya memiliki persentase luas sebesar 7.27% dan 2.26%, namun merupakan sentra kegiatan hampir seluruh perekonomian di Kepulauan Riau. Khususnya Kota Batam yang merupakan pusat perindustrian berskala internasional. Kabupaten Natuna telah mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten, masing-masing luasnya 19.43% Kabupaten Natuna dan 5.57% Kabupaten Kepulauan Anambas.

4.1.2 Topografi dan Keadaan Iklim

Pulau-pulau yang tersebar pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka dan Belitung. Pada gugusan beberapa pulau kondisinya berbukit-bukit dan landai di bagian pantainya, dengan ketinggian rata-rata 2 sampai 5 meter dari permukaan laut. Selain digambarkan dengan bentangan pulau-pulau, relief dan topografi Kepulauan Riau juga digambarkan dengan membentangnya pegunungan yang terdapat di beberapa pulau. Gunung tertinggi yaitu Gunung Daik berada di Kabupaten Lingga dengan ketinggian mencapai 1 272 m. Selain Gunung Daik, Kabupaten Lingga juga memiliki empat gunung lain yang tingginya antara 343 meter sampai dengan 800 meter. Kabupaten Natuna merupakan kabupaten lain yang memiliki beberapa gunung dengan Gunung Ranai sebagai gunung tertinggi yang mencapai ketinggian 959 meter dan Gunung Kute sebagai gunung terendah dengan ketinggian mencapai 232 meter (Kepulauan Riau dalam Angka 2008).

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara umum beriklim laut tropis basah, yang dipengaruhi oleh angin musim. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba, dengan suhu terendah yang tercatat di Stasiun Dabo Lingga sebesar 20.3⁰C pada bulan Pebruari 2007 dan suhu tertinggi tercatat di Stasiun Natuna sebesar 34.4⁰C pada bulan Mei 2007. Suhu rata-rata yang tercatat di lima stasiun yang berbeda berkisar antara 24.0⁰C di Stasiun Natuna dan sekitarnya sampai dengan

28.6⁰C di Stasiun Natuna dan sekitarnya dengan kelembaban antara 45% sampai dengan 100%. Ciri-ciri dari daerah kepulauan adalah beragamnya kisaran curah hujan, seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Kisaran tertinggi tercatat pada Stasiun Tanjungpinang sebesar 3 633.9 mm dan terendah berada pada Stasiun Lingga dimana curah hujan tercatat 2 690.0 mm sepanjang tahun 2007.

4.2 Keadaan Umum Sosial Wilayah

4.2.1 Demografi

Jumlah penduduk tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 4.31% atau sebesar 1 392 918 orang di tahun 2007 meningkat menjadi 1 453 073 orang di tahun 2008. Tabel 2 menunjukkan Kota Batam memiliki kepadatan penduduk yang terbesar di Kepulauan Riau yaitu 957 orang per km² diikuti oleh kota Tanjungpinang sebesar 763 orang per km². Hal ini disebabkan kedua kota tersebut merupakan sentra kegiatan hampir seluruh perekonomian di Kepulauan Riau. Khususnya Kota Batam yang merupakan pusat perindustrian berskala internasional. Hal inilah yang menarik arus migrasi dari daerah-daerah lain di Indonesia. Kepri masih menjadi tujuan mencari pekerjaan apalagi memasuki era Free Trade Zone (Batam, Bintan dan karimun) yang akan membutuhkan ribuan tenaga kerja baru. Wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil di Kepulauan Riau adalah Kabupaten Lingga dengan kepadatan 42 orang per km².

Tabel 2 Luas daerah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, Tahun 2007

Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan /Km ²
Karimun	2 873,20	223 878	78
Bintan	1 946,13	125 058	64
Natuna	2 648,59	95 531	46
Lingga	2 117,72	88 332	42
Kep. Anambas*	590.14	-	-
Batam	770,27	737 533	957

Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan /Km ²
Tanjungpinang	239,50	182 741	763
Jumlah/Total			
2008	10 595,41	1 453 073	137
2007	10 595,41	1 392 918	131

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2007

*) Data Kabupaten Kep. Anambas masih tergabung dengan Kabupaten Natuna

Secara umum komposisi penduduk perempuan relatif lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki di Kepulauan Riau. Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Berdasarkan data Kepulauan Riau dalam Angka 2008 diketahui rasio jenis kelamin Kepulauan Riau sebesar 96, hal ini menunjukkan lebih banyak jumlah penduduk perempuan dibandingkan laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, maka terlihat komposisi penduduk perempuan yang lebih tinggi adalah pada kelompok umur tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan diatas 65 tahun).

Jika dilihat komposisi berdasarkan kelompok umurnya maka dapat diketahui bahwa pada semua kelompok umur memiliki proporsi penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Berdasarkan komposisi umurnya, jumlah penduduk usia produktif (antara 14 – 65 tahun) berjumlah sebesar 967 361 jiwa (66.57%), sedangkan jumlah usia tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan diatas 65 tahun) berjumlah sebesar 486 118 jiwa (33.45%). Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diketahui rasio tanggungan Kepulauan Riau

yaitu sebesar 55%. Hal ini menggambarkan bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 55 penduduk yang belum atau tidak produktif. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dalam menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, serta rasio tanggungan dan rasio jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, serta rasio tanggungan

Gol umur (tahun)	Jenis Kelamin		Total	%	Rasio beban tanggungan (%)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan				
0 – 4	86 594	84 640	171 640	11.81		
5 – 14	138 894	142 016	280 910	19.33		
15 – 44	376 052	337 577	793 549	54.61		
45 – 64	91 526	82 286	173 812	11.96		
≥ 65	16 725	16 843	33 568	2.31		
Jumlah						
2008	709 791	743 282	1 453 073		55	96
2007	682 908	710 010	1 392 918		45	96

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2007 dan 2008 (diolah)

4.2.2 Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan indikator kualitas pendidikan formal. Penduduk Kepulauan Riau baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar berpendidikan terakhir SLTA/MA dengan persentase

sekitar 46.12%. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kepulauan Riau berdasarkan daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan serta pedesaan dan perkotaan sebagian besar tamat SMA, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan sebagian besar tamat SD. Hal ini disebabkan wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih luas dan mudah terhadap fasilitas pendidikan, di samping itu juga penduduk daerah perkotaan kondisi sosial ekonominya lebih baik dibandingkan daerah pedesaan. Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa sejak bulan Agustus tahun 2006 hingga Agustus 2008 jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja mengalami fluktuasi. Jumlah tertinggi untuk masing-masing daerah perkotaan, serta pedesaan dan perkotaan adalah pada bulan Agustus tahun 2008, sementara pada daerah pedesaan jumlah tertinggi adalah pada Agustus tahun 2007 atau dengan kata lain pada tahun 2008 mengalami penurunan.

Tabel 4 Penduduk berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jenis kelamin dan daerah tempat tinggal di Kepulauan Riau, 2008

No	Pendidikan	Kota	%	Desa	%	Kota +Desa	%
1	Tidak/Belum sekolah	6 358	1.14	8 353	7.84	14 711	2.21
2	Tidak/Belum tamat SD	25 541	4.57	21 315	20.01	46 856	7.04
3	SD	83 067	14.85	45 037	42.28	128 101	19.23
4	SMP	85 773	15.33	13 434	12.61	99 207	14.90
5	SMA (293 150	52.40	14 011	13.15	307 161	46.12
6	Universitas	65 600	11.72	4 361	4.09	69 961	10.50
jumlah							
Agustus 2008		559 489	100.00	106 511	100.0	666 000	100.00
Agustus 2007		474 071		114 803		588 874	
Agustus 2006		478 072		109 402		587 474	

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka 2008 (diolah)

Lebih dari 90 persen penduduk laki-laki maupun perempuan di Kepulauan Riau yang berusia 10 tahun ke atas telah melek huruf atau dengan kata lain mampu membaca dan menulis (Tabel 5). Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Lingga adalah yang paling rendah persentase melek huruf penduduk usia 10 tahun ke atasnya baik laki-laki maupun perempuan, namun persentasenya masih berada di atas 85% yaitu sebesar 88.22%. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan tertinggi yang rata-rata dicapai oleh penduduk Kepulauan Riau sebagian besar adalah SMA. Berdasarkan informasi ini maka dapat dikatakan Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang sebagian besar penduduknya telah melek huruf atau dengan kata lain Provinsi ini telah mampu menacapai keberhasilan di bidang pendidikan.

4.2.3 Pekerjaan

Pekerjaan Penduduk Kepulauan Riau sebagian besar atau 30.30% adalah di bidang industri pengolahan. Jika dilihat berdasarkan daerah, sebagian besar penduduk daerah perkotaan pekerjaan utamanya pada industri pengolahan, sementara penduduk pedesaan sebagian besar (55.31%) pekerjaan utamanya di bidang pertanian dan perikanan. Lebih jelasnya mengenai lapangan pekerjaan utama penduduk Kepulauan Riau yang berumur lebih dari 15 tahun dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melek huruf di Kepulauan Riau

No	Kab./ Kota	Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas								
		Laki-laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
		Pend. Usia >10 Th	Melek Huruf	%	Pend. Usia >10 Th	Melek Huruf	%	Pend. Usia >10 Th	Melek Huruf	%
1	Karimun	91,402	84,914	92.90	84,982	73,576	86.58	176,384	158,490	89.86
2	Bintan	51,520	49,279	95.65	44,669	40,940	91.65	96,189	90,219	93.79
3	Natuna	38,063	35,692	93.77	34,013	30,119	88.55	72,076	65,811	91.31
4	Lingga	35,804	32,528	90.85	32,778	27,977	85.35	68,582	60,505	88.22
5	Batam	238,936	234,600	98.19	310,225	303,425	97.81	549,161	538,025	97.97
6	Tanjung pinang	72,531	70,900	97.75	69,928	65,421	93.55	142,459	136,321	95.69
Jumlah (Provinsi)		528,256	507,913	96.15	576,595	541,458	93.91	1,104,851	1,049,371	94.98

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2008

Tabel 6 Penduduk umur ≥ 15 tahun yang bekerja seminggu yang lalu menurut Lapangan pekerjaan utama dan daerah tempat tinggal di Kepulauan Riau, Tahun 2008

Lapangan kerja utama	Kota	%	Desa	%	Kota + Desa	%
1. Pertanian dan Perikanan	26933	5.23	54206	55.31	81139	13.24
2. Industri Pengolahan	178526	34.69	7098	7.24	185624	30.30
3. Perdagangan	112405	21.84	12415	12.67	124820	20.37
4. Jasa Kemasyarakatan	77371	15.03	13949	14.23	91320	14.91
5. Lainnya	119422	23.20	10342	10.55	129764	21.18
Jumlah						
Agustus 2008	514657	100.00	98010	100.00	612667	100.00
Agustus 2007	429489		106308		535797	
Agustus 2006	425811		89749		515560	

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008 (diolah)

Walaupun sebagian besar penduduk Kepulauan Riau bekerja di bidang industri pengolahan, namun jumlah rumahtangga perikanan budidaya di Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan setiap tahun sejak tahun 2006. Jika dilihat berdasarkan jenis budidayanya maka rumah tangga perikanan Laut adalah yang paling banyak dibandingkan rumahtangga perikanan payau dan tawar. Hal ini disebabkan wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar terdiri dari perairan laut. Jumlah ketiga jenis rumahtangga perikanan budidaya mengalami peningkatan sejak tahun 2005 hingga 2007. Jumlah rumahtangga perikanan laut terbanyak terdapat di wilayah Kabupaten Natuna, sementara untuk rumahtangga perikanan budidaya payau dan tawar yang terbanyak masing-masing ada di wilayah Kabupaten Bintan.

Tabel 7 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2008

Kabupaten/Kota	Budidaya			Jumlah Total
	Laut RTP	Payau RTP	Tawar RTP	
1. Karimun	860	5	50	915
2. Bintan	307	45	60	412
3. Natuna	2 228	-	-	2 228
4. Lingga	289	7	18	314
5. Kep. Anambas				
6. Batam	1 816	3	-	1 816
7. Tanjungpinang	159	4	34	193
Jumlah				
2008	6 434	59	212	6 705
2007	5 659	57	162	5 878
2006	5 369	37	134	5 540
2005	4 102	26	103	4 231

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2007 dan 2008

4.2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat berupaya terus untuk meningkatkan IPM Indonesia secara umum dan masyarakat Kepulauan Riau Khususnya. Hasil IPM Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang bermakna. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS Pusat (Jakarta, 2008) yang menunjukkan bahwa IPM Kepulauan Riau meningkat dari 72.2 pada tahun 2005 menjadi 72.8 pada tahun 2006 yang secara Nasional IPM Kepulauan Riau menduduki posisi ketujuh dari 33 provinsi, dan angka ini terus meningkat dimana IPM Kepulauan Riau pada tahun 2007 menjadi 73.7 dan secara Nasional menempati urutan keenam. IPM kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang tertinggi ditempati oleh Kota Batam dengan nilai 76.8 dan secara Nasional menduduki peringkat ke-12 dari 465 kabupaten/kota di Indonesia. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk. Data perkembangan IPM Provinsi Kepri tahun dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2007

No	Kab/Kota	2005		2006		2007	
		IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
1	Karimun	71.7	101	72.0	116	72,4	124
2	Bintan	70.9	137	71.6	134	73,0	97
3	Natuna	68.4	239	69.0	244	69,4	252
4	Lingga	69.4	193	69.9	207	70,3	212
5	Batam	76.5	8	76.7	9	76,7	12
6	Tanjungpinang	72.7	79	72.9	83	73,5	84
Provinsi		72.2	7	72.8	7	73,7	6

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2005-2007, Jakarta 2008

4.3 Keadaan Umum Ekonomi Wilayah

Tingkat pertumbuhan riil ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Hal ini dilakukan mengingat pada data PDRB atas dasar harga konstan pengaruh perubahan harga dapat diabaikan.

Kondisi ekonomi Kepulauan Riau selama empat tahun terakhir (2005 – 2008) mengalami fluktuasi bahkan pada tahun 2006 sempat mengalami pertumbuhan negatif, namun pada tahun 2007 kembali mengalami peningkatan dan pada tahun 2008 pertumbuhan mencapai 16.5%. Apabila dihitung dengan migas, maka terlihat pertumbuhan yang semakin meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 4.6%. Produk domestik regional bruto (PDRB) Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2008 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Produk domestik regional bruto Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2008

PDRB (Juta Rupiah)	2005	2006*	2007**	2008***
Atas Dasar Harga Berlaku				
Dengan	40 984	46 216	51 826	58 585
Migas	738.06	076.08	271.88	996.29
Tanpa	37 414	41 950	47 420	47 420
Migas	643.20	512.95	368.70	369.70
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000				
Dengan	30 381	32 441	34 713	34 713
Migas	500.21	003.07	813.64	814.64
Tanpa	28 579	28 175	30 307	35 314
Migas	847.91	439.94	910.46	256.36

Keterangan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

Sumber: Kepulauan Riau dalam angka 2007 dan 2008 (diolah)

4.3.1 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat digambarkan dari hasil perhitungan PDRB yang dinilai atas dasar harga berlaku. Berdasarkan karakteristik wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan perairan laut yang luas, maka salah satu potensi unggulan Kepulauan Riau adalah perikanan yang menjadi andalan pada sektor pertanian. Namun secara umum kekuatan perekonomian Kepulauan Riau berasal dari bentuk kerjasama dengan pengusaha-pengusaha Singapura dan Malaysia yang dominan berkelompok di Kota Batam dan sekitarnya dalam bidang Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kepulauan Riau (Tabel 10).

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Angka PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat walaupun tidak dapat langsung menggambarkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat atau penduduk. PDRB per kapita didapat dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. Berdasarkan harga yang berlaku serta dihitung tanpa migas, maka dapat diketahui bahwa PDRB/kapita penduduk Kepulauan Seribu cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2005 – 2008 dengan rata-rata laju peningkatan sebesar 8.09% (Tabel 11).

Tabel 10 Peranan Sektor Ekonomi Kepulauan Riau 2006-2008 (persen)

No	Lapangan Usaha	Kontribusi Tiap Sektor (%)							
		Tanpa Migas				Dengan Migas			
		2006*	2007**	2008***	laju	2006*	2007**	2008***	laju
1	Pertanian	5.65	5.51	5.32	(2.96)	5.13	5.04	4.9	(2.27)
2	Pertambangan dan Penggalian	1.43	1.38	1.32	(3.92)	10.53	9.76	9.3	(6.01)
3	Industri Pengolahan	52.17	51.04	49.44	(2.65)	47.36	46.70	45.44	(2.05)
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.60	0.60	0.6	0.00	0.54	0.55	0.55	0.93
5	Bangunan	4.57	5.59	5.59	11.16	4.35	5.12	6.36	20.96
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	22.59	22.42	22.39	(0.44)	7.91	20.52	20.58	79.86
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.42	4.67	5	6.36	4.01	4.27	4.6	7.11
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa	6.01	6.03	6.02	0.08	5.45	5.51	5.54	0.82
9	Jasa-Jasa	2.57	2.77	2.99	7.86	2.33	2.54	2.75	8.64
PDRB		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008 (diolah)

Keterangan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

Tabel 11 PDRB per kapita Kepulauan Riau tanpa migas Tahun 2005 – 2008

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan Tahun 2000	
	PDRB/Kapita (Rp)	Laju (%)	PDRB/Kapita (Rp)	Laju (%)
2005	29 348 316.97	-	22 402 551.45	-
2006	31 356 359.32	6.84	22 891 174.79	2.18
2007	34 043 905.46	8.57	23 646 560.77	3.30
2008	37 061 230.83	8.86	24 303 153.64	2.78
Rata-rata	32 952 453.15	8.09	23 310 860.16	2.75

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2007 dan 2008 (diolah)

4.3.2 Ekspor dan Impor Kepulauan Riau

Seperti diketahui, peranan ekspor bagi kelangsungan perekonomian Kepulauan Riau sangatlah strategis. Hanya saja, kinerja ekspor Kepulauan Riau penuh kerentanan terhadap fluktuasi harga. Selain itu terdapat kecenderungan permintaan pasar yang tidak menentu. Selama periode Januari-Desember 2007, ekspor barang yang diukur atas *Free On Board (FOB)* Provinsi Kepulauan Riau mencapai 7 470 594 247 dolar AS. Nilai ekspor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya yang sebesar 6 920 920 181 dolar AS.

Volume ekspor Kepulauan Riau mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun tahun 2008 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis komoditi barang yang diekspor selama 2008, yang termasuk dalam komoditi lainnya merupakan ekspor dengan volume terbesar di Kepulauan Riau atau dapat dikatakan ekspor utama Kepulauan Riau, mencapai 94.02% dari nilai total ekspor Kepulauan Riau. Berdasarkan nilainya, maka kelompok komoditi lainnya dan logam tidak mulia lain adalah yang terbesar masing-masing sebesar 26.69% dan 23.62% dari total nilai ekspor Kepulauan Riau (Tabel 12).

Tabel 12 Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Kepulauan Riau menurut Kelompok Komoditi, Tahun 2008

Kelompok Komoditi	Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Pangsa Export(%)
1. Logam Tidak Mulia Lain	56 138 310	1 764 335 786	23.62
2. Alat Listrik	24 691 800	848 063 806	11.35
3. Besi Baja / Iron and Steel	430 065 773	680 375 400	9.11
4. Hasil Industri Lainnya	22 846 160	605 413 250	8.10
5. Fotografi dan Optik	208 644 223	413 114 945	5.53
6. Kain Tenun/Woven Cloth	14 308 365	387 347 744	5.18
7. Bahan Nabati Lainnya	398 859 000	503 652 187	4.06
8. Damar Tiruan, Bahan Plastik	12 830 142	160 958 561	2.15
9. Bauksit/Bauxite	188 477 652	159 070 239	2.13
10. Hasil Tambang Lain	118 651 339	154 301 141	2.07
11. Lainnya	23 202 819 040	1 993 961 188	26.69
Jumlah			
2 0 0 8	24 678 331 804	7 470 594 247	100.00
2 0 0 7	19 085 929 180	6 920 920 181	100,00
2 0 0 6	23 557 879 722	6 073 097 295	100,00
2 0 0 5	18 422 252 418	6 168 133 064	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2007 dan 2008

Selama periode 2008 nilai impor barang ke Kepulauan Riau yang dihitung berdasarkan *Cost Insurance Freight (CIF)* mengalami peningkatan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2007 mencapai 417.95%, atau sebesar 2 350 182 195 dolar AS di tahun 2007 naik menjadi 12 172 669 469 dolar AS di tahun 2008. Logam tidak mulia lain merupakan komoditi impor terbesar yang menyumbang 24.71% dari total impor provinsi Kepulauan Riau. Dari sepuluh besar komoditi impor Kepulauan Riau, tujuh komoditi juga merupakan komoditi ekspor Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 13 Impor Provinsi Kepulauan Riau menurut Kelompok Komoditi, 2008

Kelompok Komoditi	Berat (Kg)	Nilai CIF (US\$)	Pangsa (%)
1. Logam Tidak Mulia Lain	3 288 022 265	3 007 802 082	24.71
2. Alat Listrik	1 160 268 596	1 884 236 030	15.48
3. Besi Baja	91 493 490	1 867 307 335	15.34
4. Hasil Industri Lainnya	26 653 581	972 101 292	7.99
5. Fotografi dan Optik	30 433 740	767 717 867	6.31
6. Kain Tenun	122 041 799	339 706 461	2.79
7. Bahan Nabati Lainnya	7 759 271	279 826 224	2.30
8. Damar Tiruan, Bahan Plastik	995 857	162 346 805	1.33
9. Bauksit	22 614 929	114 229 335	1.18
10. Hasil Tambang Lain	53 880 337	106 655 491	0.88
11. Lainnya	101 302 753	2 640 740 547	21.69
Jumlah			
2008	5 817 191 395	12 172 669 469	100.00
2007	3 356 548 396	2 350 182 195	100,00
2006	2 581 706 436	1 609 422 816	100,00
2005	3 412 120 718	1 983 037 996	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2007 dan 2008

4.3.3 Pengeluaran Rata-rata Perkapita

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan penduduk Kepulauan Riau seperti disajikan pada tabel dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Berdasarkan tabel terlihat bahwa rata-rata pengeluaran sebulan penduduk jauh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan daerah, maka daerah perkotaan adalah yang paling tinggi rata-rata pengeluaran sebulan yaitu sebesar Rp 843 870 dan daerah pedesaan adalah yang terendah yaitu sebesar Rp 531 067. Persentase pengeluaran untuk pangan rata-rata sekitar 50%, namun untuk daerah pedesaan mencapai 56.16%. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Kepulauan Riau daerah perkotaan tergolong mampu, sementara penduduk daerah pedesaan tergolong miskin berdasarkan persentase pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran tersebut.

Persentase pengeluaran pangan terhadap rata-rata pengeluaran sebulan penduduk perkotaan terbesar adalah pada makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 12.07% selanjutnya adalah padi-padian sebesar 4.39% dan ikan 4.30%. Sementara di daerah pedesaan pengeluaran untuk pangan yang terbesar adalah pada padi-padian sebesar 8.76% lalu ikan 8.49% serta makanan dan minuman jadi 6.77%. Pengeluaran bukan makanan penduduk Kepulauan Riau baik di daerah pedesaan, perkotaan, maupun pedesaan dan perkotaan yang terbesar adalah pada perumahan dan fasilitas rumah tangga mencapai lebih dari 20%.

Tabel 14 Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan menurut jenis pengeluaran dan daerah, 2008

Jenis Pengeluaran	Kota	%	Desa	%	Kota+ Desa	%
A. Makanan						
1. Padi-padian	37 079	4.39	46 509	8.76	39 078	5.61
2. Umbi-umbian	2 397	0.28	2 563	0.48	2 432	0.35
3. Ikan	36 318	4.30	45 111	8.49	38 182	5.48
4. Daging	16 112	1.91	5 220	0.98	13 803	1.98
5. Telur, Susu	30 209	3.58	18 561	3.50	27 740	3.98
6. Sayur-sayuran	29 384	3.48	25 095	4.73	28 475	4.09
7. Kacang-kacangan	7 567	0.90	3 675	0.69	6 742	0.97
8. Buah-buahan	25 626	3.04	28 843	5.43	26 308	3.78
9. Minyak dan Lemak	12 781	1.51	13 752	2.59	12 987	1.86
10. Bahan Minuman	10 705	1.27	18 467	3.48	12 350	1.77
11. Bumbu-bumbuan	6 867	0.81	7 869	1.48	7 080	1.02
12. Konsumsi Lainnya	10 192	1.21	11 279	2.12	10 422	1.50
13. Makanan dan Minuman Jadi	101 889	12.07	35 940	6.77	87 909	12.62
14. Minuman yang mengandung alkohol	503	0.06	212	0.04	441	0.06
15. Tembakau, Sirih	34 618	4.10	35 145	6.62	34 729	4.99
Jumlah Makanan	362 247	42.93	298 241	56.16	348 678	50.06

Jenis Pengeluaran	Kota	%	Desa	%	Kota+ Desa	%
B. Bukan Makanan						
1. Perumahan dan Fasilitas Rumah tangga	216 278	25.63	107 232	20.19	193 163	27.73
2. Aneka Barang dan Jasa	127 798	15.14	56 618	10.66	112 709	16.18
3. Biaya Pendidikan	25 669	3.04	6 299	1.19	21 563	3.10
4. Biaya Kesehatan	20 161	2.39	9 161	1.73	17 829	2.56
5. Pakaian, Alas kaki dan Tutup	35 130	4.16	21 260	4.00	32 190	4.62
6. Barang-barang Tahan Lama	44 806	5.31	27 339	5.15	41 103	5.90
7. Pajak dan Asuransi	15 780	1.87	2 110	0.40	12 883	1.85
Jumlah Bukan Makanan	485 623	57.55	230 021	43.31	431 441	61.94
Rata-rata Pengeluaran Sebulan						
2008	843 870	100.00	531 067	100.00	696 517	100.00
2007	594 794		347 758		545 106	
2006	53 220		45 477		51 613	

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau 2007 dan 2008 (diolah)

4.3.4 Status Kepemilikan tanah

Luas tanah menurut jenis hak di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa baik menurut hak milik, hak Guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan mengalami fluktuasi sejak tahun 2005 hingga 2008. Kabupaten Natuna adalah yang memiliki tanah dengan status hak milik dan hak pakai paling luas masing-masing seluas 2 411 105 m² dan 2 016 336 m², sedangkan Kota Batam adalah yang memiliki tanah dengan status hak guna bangunan yang paling luas yaitu seluas 6 433 876 m² dan kabupaten Karimun adalah satu-satunya wilayah yang memiliki tanah dengan hak pengelolaan seluas 2 609 585 m².

Tabel 15 Status pemilikan tanah dirinci menurut jenis hak dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2008

Kabupaten/ Kota	Hak Milik		Hak Guna Bangunan		Hak Pakai		Hak Pengelolaan	
	Bid	Luas (m ²)	Bid	Luas (m ²)	Bid	Luas (m ²)	Bid	Luas (m ²)
1. Karimun	169	1 760 966	120	96 229	24	34 605	-	-
2. Bintan	162	1 476 967	11	5 615	6	42 834	-	-
3. Natuna	254	2 411 105	-	-	88	2 016 336	-	-
4. Lingga	158	259 510	13	2 315	8	309 101	-	-
5. Kep Anambas*	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Batam	810	366 465	10 364	6 433 876	45	107 211	29	2 609 585
7. Tanjung pinang	5 243	2 147 442	479	290 648	54	46 016	-	-
Jumlah								
2008	6 796	8 422 455	10 987	6 838 683	225	2 556 103	29	2 609 585
2007	8 023	34 471 719	860	4 121 963	351	3 142 963	19	2 351 557
2006	5 846	9 421 476	5 998	4 267 184	135	328 666	9	585 455
2005	6 210	5 169 619	6 462	2 625 676	139	335 135	10	754 407

Keterangan : Bid = Bidang

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2008

BAB V

ANALISIS SITUASI KETAHANAN PANGAN

5.1 Analisis Kebijakan terkait Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan status gizi. Kinerja masing-masing subsistem tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan serta pemanfaatan pangan termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga.

Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu produksi dalam negeri, impor pangan, dan pengelolaan cadangan pangan. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemandirian, dan kehalalan. Kinerja subsistem konsumsi tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga.

Berdasarkan subsistem tersebut terdapat Dinas yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan, sebagai contoh antara lain pada subsistem Produksi/Ketersediaan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, selanjutnya pada subsistem distribusi terdapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lalu pada subsistem konsumsi adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, terakhir pada subsistem status Gizi adalah Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan fungsinya, masing-masing Dinas

terkait Ketahanan Pangan tersebut membuat dokumen kebijakan seperti RPJMD, Renstra Dinas, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan terkait Ketahanan Pangan terlihat bahwa sebagian besar program pada beberapa dokumen kebijakan Provinsi Kepulauan Riau menekankan pada subsistem produksi atau ketersediaan pangan (kode 1), sementara tidak terdapat program yang menekankan pada subsistem distribusi pangan (kode 3). Idealnya, semua kode yang dibuat dapat diaplikasikan dalam program.

Program yang terkait dengan subsistem produksi didominasi oleh Pemerintah daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM) sejumlah 13 program, Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan sejumlah 16 program, dan Dinas Perikanan dan Kelautan sejumlah 6 program. Program-program yang terdapat dalam dua dokumen kebijakan tersebut terkait langsung dengan pembangunan ketahanan pangan provinsi Kepulauan Riau subsistem ketersediaan/produksi sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing. Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan bertanggung jawab terhadap kebijakan ketersediaan pangan nabati serta pangan hewani dari sektor ternak, sementara Dinas perikanan dan Kelautan bertanggung jawab terhadap kebijakan ketersediaan pangan asal hewani dari sektor perikanan. Dinas-dinas tersebut dalam pencapaian target kinerjanya didukung oleh Dinas lain, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 16 Matriks program pada subsistem produksi pangan

Kode	Program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	
1.1	Peningkatan ketahanan pangan
1.1	Peningkatan ketahanan pangan dan komoditas strategis bagi masyarakat
1.1.1	Pengembangan SD kelautan
1.1.4	Peningkatan kualitas SDM nelayan
1.1.4	Pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat

Kode	Program
	pesisir serta pulau kecil
1.1.4	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SD Kelautan Perikanan
1.1.4	Peningkatan kualitas dan kuantitas industri kecil untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
1.1.4	Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi UMKM dalam penyelenggaraan sektor ekonomi
1.1.4	Penataan dan pembinaan UMKM industri dan perdagangan secara konsisten dan berkelanjutan
1.1.4	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SD Kelautan Perikanan
1.1.4	Pengembangan sistem usaha dan kemitraan antara penduduk lokal dengan perusahaan nasional/internasional
1.1.4	Peningkatan kesejahteraan petani
1.2.3	Pendataan potensi-potensi SDA industri dan wisata laut dan intensifikasi potensi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan SDA
Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan	
1.1	Ketahanan pangan bid peternakan
1.1.1	Penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang tepat
1.1.1	Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
1.1.1	Pemanfaatan potensi bid perkebunan
1.1.1	Penyediaan sarana, prasarana bid perkebunan
1.1.1	Pengembangan agribisnis peternakan
1.1.1	Agribisnis bid peternakan
1.1.4	Peningkatan akses petani terhadap pasar dan lembaga permodalan
1.1.4	Peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi petani tradisional bid perkebunan
1.1.4	Peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi pd tk petani tradisional bid perkebunan
1.1.4	Pembinaan masy sekitar hutan
1.1.4	Peningkatan kesejahteraan peternak
1.1.4	Peningkatan SDM aparaturnya peternakan
1.2.1	Pengembangan dan pembangunan sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
1.2.1	Reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
1.2.3	Penyusunan database bid perkebunan

Kode	Program
Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan	
1.1.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.1.1	Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
1.1.1	Program peningkatan Prasarana Kelautan dan Perikanan.
1.1.4	Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil
1.1.4	Program peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
1.1.4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
1.1.1	Program penciptaan iklim usaha koperasi, usaha kecil, kecil dan menengah
1.1.4	Program pengembangan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah unggulan dan potensi daerah
1.1.4	Peningkatan kualitas SDM Koperasi, Usaha kecil, mikro dan menengah

Pada subsistem distribusi pangan telah ditetapkan sejumlah 14 program yang terdiri dari 11 program Pemerintah Daerah dalam RPJMD, selain itu masing-masing satu program dari Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Kesehatan. Program-program tersebut telah mengimplementasikan KUKP antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana transportasi, peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan, meningkatkan peran lembaga usaha di bidang pangan dan pengembangan jaringan pemasaran, serta mengembangkan jaringan pemasaran, namun masih terdapat beberapa program dalam KUKP yang belum diimplementasikan dengan baik oleh Provinsi Kepulauan Riau, antara lain peningkatan pendapatan, mengurangi atau meniadakan persaingan perdagangan tidak sehat, dan pengembangan sistem informasi pasar dan pemantauan harga pasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah

menetapkan program-program untuk pembangunan ketahanan pangan subsistem distribusi melalui beberapa dinas terkait (Tabel 17).

Tabel 17 Matriks program pada subsistem distribusi pangan

Kode	Program
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2.1.1	Peningkatan akses dan pangsa pasar pelayanan laut untuk mendukung usaha ekspor dan impor sektor pertanian dan kelautan
2.1.1	Pembangunan fasilitas penyelenggaraan ekonomi kerakyatan untuk pengembangan SD kelautan
2.1.1	Pemenuhan fasilitas-fasilitas penunjang sektor perikanan
2.1.1	Peningkatan dan pengembangan fasilitas dan akses untuk usaha kecil menengah dan koperasi
2.1.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, utilitas perkotaan dan transportasi dan fasilitas informasi teknologi yang mendukung sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pariwisata, kelautan
2.1.1	Peningkatan penataan jaringan transportasi yang baik dan efisien
2.1.1	Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana transportasi
2.1.1	Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana, fasilitas dan penataan lalu lintas laut
2.1.1	Pemeliharaan, rehabilitasi, prasarana pelabuhan
2.1.1	Pengembangan penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial
2.1.1	Perbaikan kondisi kelayakan sarana transportasi
	Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan
2.1.1	Peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan peternakan
	Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan
2.1.1	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan
	Renstra Dinas Kesehatan
2.3.1	Program promosi & pemberdayaan masyarakat

Jumlah program yang ditetapkan untuk memenuhi kebijakan pada subsistem konsumsi sangat sedikit. Program yang ada hanya dari Dinas Kesehatan yaitu program perbaikan gizi masyarakat.

Program ini dirasa kurang menekankan pada pentingnya mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, dan seimbang (3B), selain itu juga program peningkatan mutu dan keamanan pangan sangat penting artinya bagi tubuh untuk dapat menunjang hidup sehat, aktif, dan produktif. Jadi, kondisi ini perlu diperbaiki dengan menggalakkan program diversifikasi konsumsi pangan.

Tabel 18 Matriks program pada subsistem konsumsi pangan

Kode	Program
Renstra Dinas Kesehatan	
3.1.1	Program perbaikan gizi masyarakat

Status gizi yang baik pada masyarakat baik secara individu maupun masyarakat di suatu wilayah adalah akhir yang ingin dicapai dari ketiga subsistem yang telah dikemukakan sebelumnya. Program terkait peningkatan status gizi masyarakat banyak ditetapkan pada Dinas Kesehatan serta Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD. Dinas Kesehatan mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan, dan pada upaya pemberantasan penyakit. Pemerintah daerah dirasa lebih mengutamakan pada program peningkatan gizi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Apabila program-program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka diharapkan tujuan dapat tercapai dengan baik pula.

Tabel 19 Matriks program pada subsistem status gizi

Kode	Program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	
4.1.2	Penyediaan fasilitas Posyandu, Poliklinik, Puskesmas dan RS sampai ke tingkat pedesaan didukung dengan tenaga para medis
4.1.2	Penyusunan kebijakan pembinaan bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga
4.1.2	Pemberian Asuransi Kesehatan masyarakat miskin
4.1.2	Peningkatan cakupan program kesehatan prioritas
4.1.2	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat

Kode	Program
Renstra Dinas Kesehatan	
4.1	Program upaya kesehatan masyarakat
4.1	Program peningkatan keselamatan ibu dan anak
4.1	Program upaya kesehatan perorangan
4.1	Program pencegahan & pemberantasan penyakit
4.1	Program sumber daya kesehatan
4.1	Program obat & perbekalan kesehatan
4.1	Program kebijakan & manajemen pembangunan kesehatan
4.1	Pengembangan sistem informasi kesehatan dan penelitian kesehatan

5.2 Analisis Situasi Kini Subsistem Ketahanan Pangan

5.2.1 Produksi/Ketersediaan

5.2.1.1 Produksi Komoditas Pangan Subsektor Pertanian

Jenis komoditas pangan yang dikembangkan pada subsektor pertanian tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Riau mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan berbagai jenis sayur-sayuran serta buah-buahan. Selama periode 2007 – 2008 hampir seluruh areal panen tanaman pangan mengalami peningkatan, kecuali pada buah-buahan dan kelapa (Tabel 20). Peningkatan ini menunjukkan bahwa potensi lahan yang ada telah dikembangkan dengan baik.

Bersamaan dengan meningkatnya luas areal panen, produksi tanaman pangan juga mengalami peningkatan, kecuali pada buah-buahan dan kelapa yang masing-masing menurun sebesar 22.13% dan 0.10%. Kuatnya hubungan antara luas panen dengan produksi mencerminkan rendahnya tingkat produktivitas tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 20 Luas panen dan jumlah produksi sektor pertanian sub-sektor tanaman pangan menurut jenis tanaman, Tahun 2007-2008 (dalam Ha dan Ton)

Tanaman	2007		2008		Pertumbuhan (%)	
	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
Padi	117.0	343.00	132.0	400.80	12.82	16.85
Jagung	439.0	893.00	527.0	1 104.00	20.05	23.63
Ubi Kayu	673.0	7 077.00	874.0	9 185.00	29.87	29.79
Ubi Jalar	191.0	1 472.00	193.0	1 493.00	1.05	1.43
Kcg Tanah	71.0	64.00	90.0	82.00	26.76	28.13
Sayuran	-	11 749.00	-	16 800.90	-	43.00
Buahan	-	52 985.54	-	41 259.00	-	(22.13)

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka 2007 dan 2008 (diolah)

(a). Produksi Beras

Wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar berupa perairan dan terdiri dari pulau-pulau menyebabkan terbatasnya luas daratan. Hal ini juga berakibat pada terbatasnya lahan persawahan. Di samping itu juga tipe tanah yang dimiliki oleh sebagian besar daratan di Kepulauan Riau adalah tanah merah yang hanya bias ditanami jenis tanaman tertentu saja dan topografi tanah yang tidak banyak menyediakan air darat menyebabkan perlunya pengairan atau irigasi teknis. Luas bukan sawah sebagian besar dimanfaatkan sebagai perkebunan.

Budidaya tanaman padi sebagian besar ditemukan di kabupaten Natuna, hal ini sesuai dengan luas sawah yang terdapat di Natuna mencapai 81.6% dari total sawah di Kepulauan Riau. Seiring dengan hal tersebut luas panen di Kabupaten Natuna mencapai 100% dari lahan sawah yang ada dengan produksi sebesar 316.21 Ton. Sementara luas panen Kabupaten/Kota lain di Kepulauan Riau jauh di bawah kabupaten Natuna, bahkan Kota Tanjungpinang hanya memiliki luas panen sebesar 1 Ha

Tabel 21 Luas lahan Sawah dan Bukan Sawah yang Tidak Diusahakan di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2008

Kabupaten	Sawah	Bukan Sawah
Karimun	-	156905
Bintan	12	111066
Natuna	102	185243
Lingga	10	152393
Batam	-	19458
Tanjungpinang	1	6517

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008

(b) Produksi Jagung

Jagung merupakan komoditas pangan yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Produksi terbesar komoditas pangan ini adalah di Kabupaten Bintan dengan luas tanam 115 Ha. Produksi jagung daerah ini sebesar 241 Ton pada tahun 2008.

Namun, produksi jagung di Kepulauan Riau rata-rata tidak berbeda jauh di tiap Kabupaten/Kota atau sekitar 184 Ton. Daerah lainnya yang menghasilkan jagung tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Bintan adalah Kabupaten Natuna yaitu sebesar 204 Ton. Selain itu Kabupaten Karimun, Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang masing-masing luas panennya sebesar 86 Ha, 80 Ha, 91 Ha, dan 58 Ha. Produksi jagung pada keempat daerah tersebut masing-masing adalah sebesar 181 Ton, 167 Ton, 190 Ton, dan 122 Ton.

(c). Ubi Kayu

Ubi kayu merupakan tanaman yang tidak memiliki persyaratan terlalu sulit untuk tumbuh sehingga tanaman ini dapat dibudidayakan dengan relatif mudah oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Kepri. Tanaman pangan ini diusahakan secara merata pada hampir seluruh kabupaten. Areal terluas dalam tahun 2008 terdapat di Kabupaten Natuna seluas 163 Ha dengan produksi sebesar 1 713 Ton. Luas areal dan produksi ubi kayu di Kepri tidak menunjukkan perbedaan yang menyolok antara wilayah yang satu

dengan lainnya. Ini berarti masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepri mampu memproduksi ubi kayu.

(d). Ubi Jalar

Ubi Jalar tidak berbeda jauh dengan ubi kayu, komoditas ubi jalar juga dibudidayakan pada seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Areal panen terluas untuk komoditi ini ditemukan di kabupaten Natuna seluas 51 Ha, diikuti oleh Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam masing-masing dengan luas panen 42 Ha, 35 Ha, 33 Ha, dan 21 Ha. Sementara Kota Tanjungpinang adalah wilayah dengan luas panen dan produksi ubi jalar terendah yaitu masing-masing sebesar 11 Ha dan 85 Ton. Produksi ubi jalar di Kabupaten Natuna mencapai 395 Ton, sementara di empat kabupaten/kota tersebut masing-masing adalah 325 Ton, 271 Ton, 255 Ton, dan 162 Ton.

Tabel 22 Luas panen tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2008 (dalam Ha)

Kabupaten	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kcg Tanah	Buah	Sayur
Karimun	4	86	146	35	16	NA	NA
Bintan	19	115	162	33	22	NA	NA
Natuna	104	97	163	51	21	NA	NA
Lingga	4	80	159	42	15	NA	NA
Kep. Anambas	-	-	-	-	-	NA	NA
Batam	-	91	136	21	11	NA	NA
Tanjungpinang	1	58	108	11	5	NA	NA

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka 2008

(e). Kacang Tanah

Kacang tanah juga dibudidayakan oleh masyarakat Riau di seluruh kabupaten/kota termasuk Kota Batam. Areal terluas tanaman pangan ini ditemukan di Kabupaten Bintan yang mencapai 22 Ha diikuti Kabupaten Natuna seluas 21 Ha dan Karimun (16 Ha). Produksi Komoditas kacang tanah di ketiga kabupaten ini masing-masing adalah sebesar 20 Ton, 19 Ton, dan 15 Ton. Sementara untuk wilayah Kabupaten/Kota lainnya produksi kacang tanah tidak terlalu

besar, bahkan kota Tanjungpinang hanya mampu menghasilkan 5 Ton atau yang paling rendah produksinya.

(f). Buah-buahan

Kawasan penghasil buah-buahan yang cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Bintan. Pada tahun 2008 produksi buah-buahan di Bintan mencapai 27 590 Ton. Kota ini merupakan sentra produksi komoditas nanas dengan produksi mencapai 25 691 Ton. Peran kabupaten Bintan dalam menghasilkan nanas mencapai hampir seratus persen produksi nanas di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 29 428 Ton. Selain Kabupaten Bintan, produksi buah-buahan cukup rendah yaitu Kabupaten Karimun (5 619 Ton), Kabupaten Lingga (3 175 Ton), Kota Batam (3 085 Ton), dan Kota Tanjungpinang (1 588 Ton). Sementara Kabupaten Natuna adalah wilayah dengan produksi buah-buahan terendah atau hanya mampu menghasilkan 200 Ton.

Buah yang banyak dihasilkan oleh Kepulauan Riau selain nanas adalah durian rambutan dan nangka masing-masing sebesar 4 702 Ton, 2 845 Ton, dan 2 710 Ton. Kabupaten Karimun adalah penghasil durian terbesar dengan produksi mencapai separuh dari produksi durian di Kepulauan Riau yaitu sebesar 2 306 Ton. Sementara untuk nangka dan rambutan produksinya merata di setiap wilayah kabupaten/kota.

Tabel 23 Produksi tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Riau menurut wilayah, Tahun 2008 (dalam Ha)

Kabupaten	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Sayur	Buah
Karimun	12.00	181	1534	271	15	280.3	5619
Bintan	57.64	241	1703	255	20	4795.6	27590
Natuna	316.21	204	1713	395	19	219.5	200
Lingga	12.00	167	1671	325	14	3674.2	3175
Kep. Anambas	-	-	-	-	-	-	-
Batam	-	190	1429	162	10	6181.9	3085
Tanjungpinang	2.95	122	1135	85	5	926.4	1588

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008 (diolah)

besar, bahkan kota Tanjungpinang hanya mampu menghasilkan 5 Ton atau yang paling rendah produksinya.

(f). Buah-buahan

Kawasan penghasil buah-buahan yang cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Bintan. Pada tahun 2008 produksi buah-buahan di Bintan mencapai 27 590 Ton. Kota ini merupakan sentra produksi komoditas nanas dengan produksi mencapai 25 691 Ton. Peran kabupaten Bintan dalam menghasilkan nanas mencapai hampir seratus persen produksi nanas di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 29 428 Ton. Selain Kabupaten Bintan, produksi buah-buahan cukup rendah yaitu Kabupaten Karimun (5 619 Ton), Kabupaten Lingga (3 175 Ton), Kota Batam (3 085 Ton), dan Kota Tanjungpinang (1 588 Ton). Sementara Kabupaten Natuna adalah wilayah dengan produksi buah-buahan terendah atau hanya mampu menghasilkan 200 Ton.

Buah yang banyak dihasilkan oleh Kepulauan Riau selain nanas adalah durian rambutan dan nangka masing-masing sebesar 4 702 Ton, 2 845 Ton, dan 2 710 Ton. Kabupaten Karimun adalah penghasil durian terbesar dengan produksi mencapai separuh dari produksi durian di Kepulauan Riau yaitu sebesar 2 306 Ton. Sementara untuk nangka dan rambutan produksinya merata di setiap wilayah kabupaten/kota.

Tabel 23 Produksi tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Riau menurut wilayah, Tahun 2008 (dalam Ha)

Kabupaten	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Sayur	Buah
Karimun	12.00	181	1534	271	15	280.3	5619
Bintan	57.64	241	1703	255	20	4795.6	27590
Natuna	316.21	204	1713	395	19	219.5	200
Lingga	12.00	167	1671	325	14	3674.2	3175
Kep. Anambas	-	-	-	-	-	-	-
Batam	-	190	1429	162	10	6181.9	3085
Tanjungpinang	2.95	122	1135	85	5	926.4	1588

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008 (diolah)

(g). Sayur-sayuran

Produksi sayur-sayuran tersebar secara merata di hampir seluruh kabupaten/kota. Kota Batam merupakan penghasil sayur-sayuran terbesar di Kepulauan Riau yang mencapai 6 181 Ton. Komoditas sayur-sayuran yang dihasilkan daerah ini hampir mencakup seluruh komoditas seperti sawi, bayam, cabe besar, ketimun, terong, kacang panjang, paria, dan kangkung. Selain Batam, Kabupaten Bintan juga tercatat sebagai sentra produksi berbagai jenis sayuran. Untuk mengurangi defisit komoditas sayuran yang masih cukup besar, kedua kabupaten ini dapat dikembangkan menjadi sentra produksi sayuran dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang masih ada. Bila memungkinkan, pengembangan komoditas ini dapat dilakukan dilahan pekarangan sehingga rumah tangga dapat memenuhi sebagian kebutuhan sayurannya yang secara keseluruhan diperkirakan akan berpengaruh cukup signifikan terhadap pengurangan defisit komoditas sayuran.

5.2.1.2 Produksi Komoditas Pangan Subsektor Perkebunan

Berdasarkan Kepulauan Riau dalam Angka (2008) tanaman karet, kelapa serta cengkeh merupakan tanaman yang sangat dominan diusahakan oleh rakyat daripada beberapa tanaman perkebunan rakyat yang ada. Sepanjang tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah tanaman karet yang belum menghasilkan dan yang sudah menghasilkan, disamping itu terjadi penurunan untuk tanaman tua yang rusak. Jika dibandingkan dengan tahun 2006, terdapat beberapa tambahan tanaman baru yang belum menghasilkan sebesar 7.72%, sedangkan tanaman menghasilkan bertambah sebesar 0.58% dibanding tahun sebelumnya dengan nilai produksi 12.614 Kg dan rata-rata produksi sebesar 2.560 Kg/Ha. Nilai rata-rata produksi tahun 2007 ini meningkat 1.70% dibanding tahun 2006 lalu.

Jumlah tanaman kelapa yang diusahakan sebagai tanaman perkebunan rakyat hampir tidak ada perubahan jika dibanding tahun

2006. Namun demikian terjadi peningkatan jumlah produksi 6.33% dibanding tahun sebelumnya atau sebesar 9.799 Kg ditahun 2006 meningkat menjadi 10.419 Kg ditahun 2007 (Kepulauan Riau dalam Angka 2008). Luas areal dan jumlah produksi tanaman perkebunan menurut jenis tanaman (Tabel 24) terlihat bahwa tidak tersedia data untuk tahun 2008 untuk komoditas karet.

Tabel 24 Luas areal dan jumlah produksi tanaman perkebunan menurut jenis tanaman, Tahun 2007 – 2008 (dalam Ha dan Ton)

Jenis	2007		2008		Pertumbuhan (%)	
	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
Karet	42505	12614	NA	NA	-	-
	37	10	37	10	0.00	(0.10)
Kelapa	487.0	429.00	487.0	419.00		

Sumber : Kepulauan Riau Dalam Angka tahun 2008

5.2.1.3 Produksi Komoditas Pangan Subsektor Perikanan

Produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sebagian terbesar berasal dari laut. Dari total produksi perikanan sebanyak 5906.66 ton pada tahun 2008, sebagian besar 4652.53 Ton atau 78.8% adalah produksi perikanan laut dan kemudian disusul oleh jenis perikanan payau sebesar 17.0%. Ikan merupakan komoditas pangan yang besar peranannya dalam pola konsumsi pangan masyarakat Riau, oleh sebab itu dari sisi produksi perkembangannya selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat seperti nampak pada Tabel 25. Bahkan pada jenis perikanan Payau, peningkatan yang terjadi sangat signifikan hingga melebihi seratus persen. Sebaliknya pada jenis perikanan darat terjadi penurunan sebesar 6.35% sejak tahun 2005.

Tabel 25 Jumlah Produksi Perikanan Menurut Jenis Sumber Tahun 2005 – 2008 (Ton)

No.	Jenis Perikanan	Tahun				Laju Rata-rata (%)
		2005	2006	2007	2008	
1.	Laut	1499.31	1163.48	4805.38	4652.53	95.81
2.	Payau	31.29	37.25	248.49	1007.00	297.13
3.	Tawar	312.86	336.35	335.90	247.13	(6.35)
Jumlah		1843.46	1537.08	5389.77	5906.66	81.21

Sumber: Kepulauan Riau Dalam Angka tahun 2008 (diolah)

5.2.1.4 Produksi Komoditas Pangan Subsektor Peternakan

Pembangunan subsektor peternakan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memperbaiki gizi masyarakat dan meningkatkan pendapatan peternak. Populasi ternak di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan potensi lahan yang tersedia untuk kegiatan peternakan. Jenis ternak yang dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari kelompok ternak besar (sapi, kambing, dan babi) dan unggas (ayam dan itik). Pada kelompok ternak besar populasi ternak terbanyak adalah babi, diikuti oleh kambing dan sapi. Bila dilihat dari perkembangan populasinya, pertambahan tertinggi terjadi pada populasi kambing. Sementara pada populasi babi dan sapi mengalami penurunan masing-masing sebesar 27.49% dan 10.96%. Pada kelompok ternak unggas, populasi terbesar adalah ayam pedaging, diikuti oleh ayam buras, ayam petelur, dan itik. Populasi ayam pedaging meningkat dengan cepat selama periode 2005 – 2007, diikuti oleh itik. Populasi ayam buras dan petelur juga meningkat selama periode 2005 – 2007. Pada ternak besar khususnya babi, populasi terbesar terdapat di Kota Batam (179 339 ekor) dan untuk populasi terbesar sapi potong serta kambing, masing-masing terdapat di Kabupaten Natuna (4 579 ekor) dan Kabupaten Karimun (16 722 ekor).

Tabel 26 Jumlah ternak menurut jenis ternak Tahun 2005 – 2007

Jenis	Tahun			Pertumbuhan (%)
	2005	2006	2007	
Ternak Besar (Ekor)				
Sapi	9976	7204	7627	(10.96)
Kambing	18166	20238	21731	9.39
Babi	422655	178858	183679	(27.49)
Unggas (ekor)				
Ayam Buras	585226	479736	739805	18.09
Ayam petelur	347800	431911	433465	12.27
Ayam Pedaging	452510	6284676	6206862	643.80
Itik	21634	66381	116949	141.51

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka Tahun 2008 (diolah)

Ketidakmerataan produksi pangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau erat kaitannya dengan perbedaan potensi dan kondisi sumberdaya antar daerah kabupaten. Perbedaan kemampuan daerah kabupaten dalam menghasilkan komoditas pangan dapat dilihat dari produksi pangan disetiap daerah (Tabel 27).

Tabel 27 Komposisi produksi pangan antar Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2008 (dalam %)

Kab/Kota	Padi	Jagung	Umbian	Kacang	Sayuran	Buahan	Daging	Ikan	Telur
Karimun	3.0	16.4	16.9	18.1	1.7	13.6	20.1	31.2	23.2
Bintan	14.4	21.8	18.3	24.1	29.8	66.9	18.0	21.0	52.6
Natuna	78.9	18.5	19.7	22.9	1.4	0.5	12.8	15.2	2.7
Lingga	3.0	15.1	18.7	16.9	22.9	7.7	1.2	11.5	1.4
Batam	-	17.2	14.9	12.0	38.4	7.5	32.2	18.0	10.8
Tanjungpinang	0.7	11.0	11.4	6.0	5.8	3.8	15.7	3.2	9.3
Jumlah	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100	100.0	100.0

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008 (diolah)

Seperti ditunjukkan pada Tabel 27, Kabupaten Natuna dominan dalam menghasilkan padi. Peran daerah ini dalam

menghasilkan dua komoditas pangan utama yaitu padi mencapai 78.9 persen. Pada komoditas jagung, umbi-umbian, kacang, sayuran, dan ikan terlihat produksi yang cenderung hampir merata pada tiap kabupaten/Kota. Sementara untuk buah-buahan produksi terbesar adalah di Kabupaten Bintan yaitu dengan persentase sebesar 66.9%, namun tidak hanya itu, kabupaten Bintan juga termasuk wilayah dengan produksi telur yang cukup tinggi mencapai 52.6%. Kabupaten lainnya tidak menunjukkan peran yang begitu besar dalam menghasilkan berbagai komoditas pangan. Produksi, Ketersediaan dan Kontribusi Energi beberapa jenis pangan di Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28 Produksi, Ketersediaan dan Kontribusi Energi beberapa jenis pangan di Kepulauan Riau

Jenis Pangan	Prod(Ton/th)*	g//kap/hari	Ketersediaan Energi	
			Aktual (kkal)	Ideal (kkal)
padi-padian				
beras	253.31	0.48	1.73	1000
jagung	1104.00	2.08	7.39	1000
subtotal			9.12	1000
umbi-umbian				
Ubi Kayu	9185.00	17.32	26.67	120
Ubi jalar	1493.00	2.82	3.91	120
subtotal			30.58	120
pangan hewani				
Ikan	5906.66	11.14	9.02	240
Ayam	517.35	0.98	2.95	240
Telur	3746.81	7.06	13.99	240
Sapi	776.25	1.46	3.03	240
kambing	129.12	0.24	0.37	240
subtotal			29.36	240
kacang-kacangan				
Kacang tanah	82.00	0.15	0.70	100

Jenis Pangan	Prod(Ton/th)*	g//kap/hari	Ketersediaan Energi	
			Aktual (kkal)	Ideal (kkal)
subtotal			0.70	100
sayur dan buah				
Buah (nanas)	41259.00	77.79	31.12	120
sayur (mentimun)	16800.00	31.68	2.53	120
subtotal			33.65	120
Total		153.20	103.41	

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008 (diolah)

Berdasarkan Tabel 28 diketahui bahwa ketersediaan energi komoditas pangan dari produksi di Kepulauan Riau sangat rendah atau hanya 103.41 kkal dan dapat dikatakan belum atau bahkan tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Gambaran ini memperlihatkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau bukan wilayah sentra produksi pangan sehingga penyediaan pangan sangat tergantung pada perdagangan antar wilayah dan data ekspor impor pangan sangat penting. Oleh karena itu pendistribusian pasokan pangan dari luar daerah ke Provinsi Kepulauan Riau berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan cadangan pangan untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah kekurangan pangan dan jaminan pemenuhan kebutuhan pangan hingga tingkat rumah tangga dan individu.

5.2.2 Harga Pangan

Harga sangat menentukan seberapa besar kemampuan masyarakat dalam membeli pangan. Semakin tinggi harga pangan maka kemampuan masyarakat ekonomi rendah untuk memperoleh pangan akan semakin rendah. Wilayah yang memiliki data harga pangan di Provinsi Kepulauan Riau hanya kota Tanjungpinang dan Batam sedangkan wilayah yang tidak memiliki data harga pangan

yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Tabel 29 dapat dilihat bahwa umumnya harga komoditas pangan strategis di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan. Pangan yang mengalami peningkatan paling tinggi di Tanjungpinang adalah bawang merah dan ikan teri kualitas sedang dan baik dengan laju peningkatan mencapai lebih dari 50%.

Tabel 29 Harga pangan strategis Kepulauan Riau Tahun 2007 – 2008 (dalam Rupiah)

No	Komoditas	Tanjung Pinang			Batam		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Laju (%)	Tahun 2007	Tahun 2008	Laju (%)
1	Beras	6 164	6 572	6.62	6 231	7 208	15.68
2	Ikan teri (baik)	39 528	59 000	49.26	40 866	37 218	(8.93)
3	Ikan teri (sedang)	34 639	52 917	52.77	29 519	28 926	(2.01)
4	Minyak goreng curah	8 131	10 540	29.63	8 020	10 641	32.68
5	Gula pasir	5 600	6 339	13.20	6 340	6 886	8.61
6	Minyak Tanah	2 467	2 778	12.61	2 421	2 778	14.75
7	Bawang merah	8 597	13 574	57.89	10 910	15 544	42.47
8	Bawang putih	9 764	8 417	(13.80)	11 222	7 678	(31.58)
9	Terigu	4 739	4 778	0.82	4 739	7 349	55.07

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka 2007 dan 2008 (diolah)

Komoditas bawang putih di kedua kota justru mengalami penurunan harga sebesar 13.80% di Tanjungpinang dan 31.58% di Kota Batam. Sementara di Kota Batam kenaikan harga yang cukup tajam juga terjadi pada komoditas bawang merah dengan peningkatan sebesar 42.47%. Ikan teri kualitas sedang dan baik di Kota Batam mengalami penurunan harga dengan laju masing-masing sebesar 2.01% dan 8.93%. komoditas minyak goreng curah di kedua Kota rata-rata meningkat sebesar 30%. Laju peningkatan harga terigu di kedua Kota berbeda jauh, di Tanjungpinang peningkatan yang terjadi hanya sebesar 0.82% sementara di Kota Batam mencapai 55.07%.

5.2.3 Konsumsi Pangan

Berdasarkan Tabel 30 diketahui konsumsi kalori perkapita sehari menurut jenis bahan makanan dan daerah menurut jenis pengeluaran per kapita dalam Kepulauan Riau dalam Angka 2007 diketahui bahwa konsumsi energi (kalori) penduduk Kepulauan Riau mengalami peningkatan pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2005. Rata-rata konsumsi kalori penduduk perkotaan sedikit lebih rendah dibandingkan penduduk pedesaan tetapi masih berada pada kisaran normal. Pada tahun 2007 rata-rata konsumsi kalori penduduk perkotaan adalah 1921 kkal, sementara penduduk pedesaan adalah sebesar 2 054 kkal. Rata-rata konsumsi kalori penduduk pedesaan mengalami penurunan dari tahun 2005.

Tabel 30 Rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari menurut jenis bahan makanan dan daerah menurut jenis pengeluaran per kapita

Kelompok pangan	Kota	%	Desa	%	Kota + Desa	%
1. Padi-padian	666,61	34.70	838,13	40.79	747,40	37.67
2. Umbi-umbian	25,86	1.35	44,32	2.16	34,55	1.74
3. Ikan	62,34	3.25	82,44	4.01	71,81	3.62
4. Daging	68,32	3.56	18,95	0.92	45,07	2.27
5. Telur, Susu	104,76	5.45	80,64	3.92	93,40	4.71
6. Sayur-sayuran	31,82	1.66	36,05	1.75	33,81	1.70
7. Kacang-kacangan	41,70	2.17	52,99	2.58	47,02	2.37
8. Buah-buahan	43,47	2.26	48,12	2.34	45,66	2.30
9. Minyak dan Lemak	306,61	15.96	341,65	16.63	323,11	16.29
10. Bahan Minuman	130,12	6.77	227,76	11.09	176,11	8.88
11. Bumbu-bumbuan	16,55	0.86	14,87	0.72	15,76	0.79
12. Konsumsi Lainnya	121,24	6.31	107,77	5.25	114,89	5.79
13. Makanan dan Minuman Jadi	301,67	15.70	160,94	7.83	235,39	11.86
Jumlah Makanan						
2007	1 921,09	100.00	2 054,62	100.00	1 983,98	100.00
2005	1 839,06		2 102,67		1 893,77	

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2008 (diolah)

Pada daerah perkotaan proporsi terbesar konsumsi pangan (kalori) adalah pada kelompok padi-padian, minyak dan lemak, serta

makanan dan minuman jadi, begitu pula dengan daerah perkotaan dan pedesaan. Berbeda dengan kedua daerah sebelumnya, tiga kelompok pangan yang termasuk dalam proporsi terbesar konsumsi kalorinya di pedesaan adalah padi-padian, minyak dan lemak, dan bahan minuman.

Berbeda dengan rata-rata konsumsi kalori, maka rata-rata konsumsi protein perkapita sehari menurut jenis bahan makanan dan daerah menurut jenis pengeluaran per kapita di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dari tahun 2005 yaitu 57.69 gram pada tahun 2005 menjadi 56.11 gram pada tahun 2007 (Tabel 31). Rata-rata konsumsi protein penduduk pedesaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2005 sebesar 6.75 gram menjadi 55.58 gram, sementara rata-rata konsumsi penduduk perkotaan mengalami penurunan sebesar 0.44 gram menjadi 56.58 gram.

Tabel 31 Rata-rata konsumsi protein perkapita sehari menurut jenis bahan makanan dan daerah menurut jenis pengeluaran per kapita

Kelompok pangan	Kota	%	Desa	%	Kota + Desa	%
1. Padi-padian	15,65	27.66	19,77	35.57	17,59	31.35
2. Umbi-umbian	0,31	0.55	0,30	0.54	0,31	0.55
3. Ikan	10,54	18.63	13,43	24.16	11,90	21.21
4. Daging	4,19	7.41	1,18	2.12	2,77	4.94
5. Telur dan Susu	5,67	10.02	4,37	7.86	5,06	9.02
6. Sayur-sayuran	2,02	3.57	2,50	4.50	2,24	3.99
7. Kacang-kacangan	3,57	6.31	4,43	7.97	3,98	7.09
8. Buah-buahan	0,54	0.95	0,53	0.95	0,53	0.94
9. Minyak dan Lemak	0,60	1.06	0,66	1.19	0,63	1.12
10. Bahan Minuman	1,54	2.72	1,62	2.91	1,58	2.82
11. Bumbu-bumbuan	0,64	1.13	0,56	1.01	0,60	1.07
12. Konsumsi Lainnya	2,49	4.40	2,27	4.08	2,38	4.24
13. Makanan dan Minuman Jadi	8,82	15.59	3,96	7.12	6,53	11.64
Jumlah Makanan						
2007	56,58	100.00	55,58	100.00	56,11	100.00
2005	57,02		62,33		57,69	

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka 2008 (diolah)

Berdasarkan Tabel 31 terlihat proporsi terbesar konsumsi protein perkapita sehari penduduk perkotaan adalah pada kelompok pangan padi-padian, ikan, makanan dan minuman jadi, serta telur dan susu masing-masing dengan persentase sebesar (27.66%), 18.63%), (15.59%), dan (10.02%). Sementara pada daerah pedesaan serta pedesaan dan perkotaan, proporsi terbesar konsumsi protein perkapita sehari penduduknya adalah pada kelompok padi-padian, ikan, serta makanan atau minuman jadi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan penduduk perkotaan relatif lebih beragam dibandingkan dengan penduduk daerah pedesaan, namun perbedaan tersebut tidak terlalu besar. Konsumsi telur dan susu penduduk pedesaan cenderung lebih rendah dibanding penduduk perkotaan, hal ini terkait dengan kemampuan penduduk mendapatkan komoditas susu yang cenderung mahal.

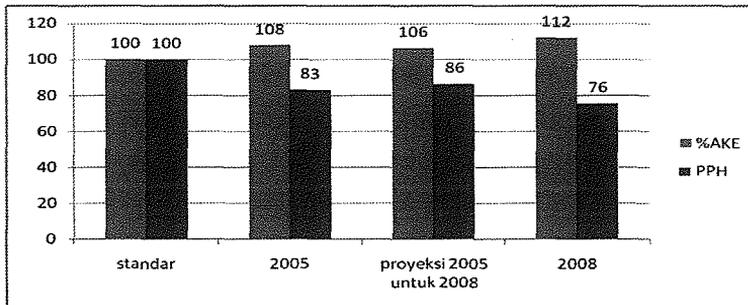
5.2.3.1 Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan

Ketahanan pangan suatu wilayah dapat diukur perkembangannya melalui persentase AKE dan skor PPH yang dicapai dari tahun ke tahun. Peningkatan persentase AKE dan skor PPH yang mendekati ideal dapat dijadikan indikator keberhasilan program ketahanan pangan di wilayah tersebut. Indikator lainnya adalah melalui perbandingan data panel (aktual) dengan proyeksi tahun sebelumnya. Selain itu, indikator lainnya adalah persentase AKE dan skor PPH yang lebih tinggi pada data panel dibandingkan data proyeksi pada situasi ketahanan pangan di bawah angka ideal, demikian sebaliknya. Berikut ini disajikan analisis perkembangan situasi ketahanan pangan tahun 2005 dan 2008 di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan wilayah.

1. Pedesaan

Situasi ketahanan pangan wilayah Pedesaan Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Gambar 6. Berdasarkan Gambar 6 terlihat bahwa untuk persentase AKE tahun 2005, dan 2008 sudah mampu mencapai bahkan melebihi angka 100%, sedangkan untuk

skor PPH tahun 2005 dan 2008 masih di bawah ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, konsumsi penduduk telah memenuhi standar yaitu sebesar 2000 kkal/kap/hari, sedangkan berdasarkan skor PPH atau secara kualitas konsumsi penduduk masih belum cukup beragam.



Gambar 6 Perkembangan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan wilayah pedesaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008

Konsumsi energi tahun 2008 yang berasal dari hasil proyeksi tahun 2005 untuk 2008 sebesar 2125 kkal/kap/hari (106.2% AKE) lebih rendah dibandingkan modul tiga tahunan tahun 2008 yaitu sebesar 2 245 kkal/kap/hari (112.3% AKE). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kuantitas konsumsi energi telah mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2005, sehingga perlu adanya pemantapan ketahanan pangan.

Skor PPH tahun 2008 yang berasal dari hasil proyeksi tahun 2005 yaitu sebesar 86.4 dan hasil data modul tahunan tahun 2008 menunjukkan skor 76. Hal ini menunjukkan bahwa skor PPH tahun 2008 belum mampu mencapai target yang ditetapkan dari hasil proyeksi tahun 2005, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.

Konsumsi energi penduduk pedesaan Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai 2 156 kkal/kap/hari pada tahun 2005 dan 2 245 kkal/kap/hari pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi tingkat konsumsi yang dianjurkan oleh WKNPG VIII tahun 2004 yaitu

sebesar 2000 kkal/kap/hari. Persentase AKE penduduk pedesaan mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 4.5 persen.

Skor PPH penduduk pedesaan Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah ideal yaitu 100. Skor PPH pada tahun 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2005. Hal ini menggambarkan kurang beragamnya pangan yang dikonsumsi (kualitas konsumsi pangan) masyarakat. Jika dilihat dari komposisi pangan yang dikonsumsi penduduk pada tahun 2005-2008, terlihat bahwa kelompok padi-padian masih mendominasi dibandingkan kelompok pangan lainnya. Konsumsi kelompok pangan padi-padian tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 88 kkal/kap/hari. Kelompok padi-padian pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 58.1 persen, dibandingkan proporsi ideal yang diharapkan adalah sebesar 50 persen dari total konsumsi energi yang dianjurkan. Kelompok pangan lain yang juga mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2005 adalah umbi-umbian dan gula yaitu sebesar 8 kkal/kap/hari dan 56 kkal/kap/hari.

Tabel 32 Perkembangan konsumsi pangan penduduk pedesaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008

No	Kelompok Pangan	2005			2008		
		Kkal/Kap/Hr	%AKE	Skor PPH	Kkal/Kap/Hr	%AKE	Skor PPH
1	Padi-padian	1,162	58.1	25	1,250	62.5	25
2	Umbi-umbian	79	4.0	2	87	4.4	2
3	Pangan Hewani	189	9.5	19	187	9.3	19
4	Minyak dan Lemak	295	14.7	5	281	14.1	5
5	Buah/Biji Berminyak	75	3.7	1	76	3.8	1
6	Kacang-kacangan	48	2.4	5	31	1.5	3
7	Gula	157	7.8	3	213	10.6	3
8	Sayur dan Buah	95	4.8	24	72	3.6	18
9	Lain-lain	57	2.8	0	48	2.4	0
	Total	2,156	107.8	83	2,245	112.3	76

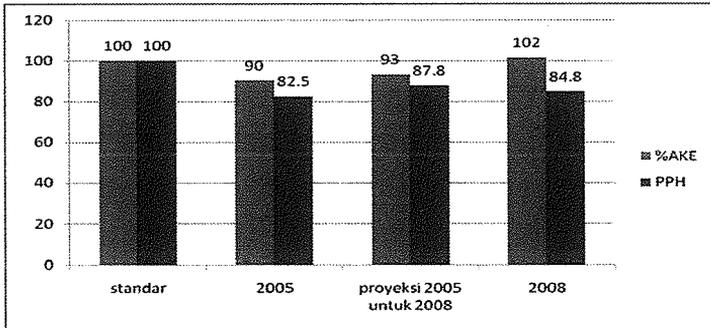
Sumber : Susenas BPS, 2005 dan 2008 (diolah)

Perkembangan konsumsi pangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008 dapat dilihat pada Tabel 32. Konsumsi kelompok

pangan kacang-kacangan serta sayur dan buah tahun 2008 masing-masing mengalami penurunan sebesar 17.0 kkal/kap/hari dan 23 kkal/kap/hari. Konsumsi pangan aktual kelompok padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula sudah melebihi konsumsi harapan, sedangkan konsumsi kelompok pangan lainnya masih di bawah konsumsi harapan. Konsumsi kelompok pangan sumber protein seperti kacang-kacangan serta sayuran dan buah-buahan masih jauh dibawah anjuran.

2. Perkotaan

Situasi konsumsi pangan di wilayah perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan Gambar 7 terlihat bahwa untuk persentase AKE tahun 2005, proyeksi 2005 untuk 2008 dan 2008 dapat dikatakan normal karena berada pada kisaran ± 10 persen dari standar. Skor PPH tahun 2005-2008 seluruhnya masih di bawah ideal. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, konsumsi penduduk telah mencapai standar yaitu sebesar 2000 kkal/kap/hari, sedangkan berdasarkan skor PPH atau secara kualitas konsumsi penduduk masih belum cukup beragam.



Gambar 7 Perkembangan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan wilayah perkotaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008

Konsumsi energi tahun 2008 lebih tinggi daripada hasil proyeksi dari data tahun 2005. Konsumsi energi tahun 2008 yang berasal dari hasil proyeksi tahun 2005 sebesar 1 864 kkal/kap/hari

(93.2% AKE) dan konsumsi hasil data modul tahunan tahun 2008 menunjukkan nilai sebesar 2 030 kkal/kap/hari (101.5% AKE). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kuantitas konsumsi energi sudah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2005, sehingga perlu dilakukan pemantapan ketahanan pangan.

Skor PPH tahun 2008 yang berasal dari hasil proyeksi tahun 2005 yaitu sebesar 87.8, namun untuk hasil data modul tahunan tahun 2008 skor PPH mengalami penurunan yaitu menjadi 84.8. Hal ini menunjukkan bahwa skor PPH tahun 2008 belum mencapai target hasil proyeksi tahun 2005, sehingga perlu adanya percepatan peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau

Konsumsi energi penduduk perkotaan Provinsi Kepulauan Riau sudah mencapai 1 806 kkal/kap/hari pada tahun 2005 dan 2 030 kkal/kap/hari pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2005 belum memenuhi tingkat konsumsi yang dianjurkan oleh WKNPG VIII tahun 2004 yaitu sebesar 2000 kkal/kap/hari, namun tidak demikian dengan tahun 2008 yang telah mampu mencapai angka yang dianjurkan. Persentase AKE penduduk perkotaan mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 11.2 persen.

Skor PPH penduduk perkotaan Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah ideal yaitu 100. Skor PPH tahun 2008 mengalami peningkatan dari tahun 2005. Hal ini menggambarkan peningkatan keragaman pangan yang dikonsumsi (kualitas konsumsi pangan) masyarakat. Jika dilihat dari komposisi pangan yang dikonsumsi penduduk pada tahun 2005-2008, terlihat bahwa kelompok padi-padian masih mendominasi dibandingkan kelompok pangan lainnya. Konsumsi kelompok pangan padi-padian tahun 2008 meningkat sebesar 118 kkal/kap/hari. Kelompok padi-padian pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 55.5 persen, padahal proporsi ideal yang diharapkan adalah sebesar 50 persen dari total konsumsi energi yang dianjurkan.

Konsumsi pangan pada hampir semua kelompok pangan mengalami peningkatan, kecuali pada kelompok umbi-umbian yang mengalami penurunan konsumsi sebesar 3 kkal/kap/hari pada tahun 2008. Konsumsi semua kelompok pangan secara umum sudah mendekati anjuran kecuali pada kelompok sayur dan buah yang masih jauh dibawah anjuran. Perkembangan konsumsi pangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008 dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33 Perkembangan konsumsi pangan penduduk perkotaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008

No	Kelompok Pangan	2005			2008		
		Kkal/Kap /Hr	%AKE	Skor PPH	Kkal/Kap /Hr	% AKE	Skor PPH
1	Padi-padian	982	49.1	24.5	1,110	55.5	25.0
2	Umbi-umbian	43	2.2	1.1	40	2.0	1.0
3	Pangan Hewani	234	11.7	23.4	307	15.3	24.0
4	Minyak dan Lemak	244	12.2	5.0	249	12.4	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	38	1.9	1.0	44	2.2	1.0
6	Kacang-kacangan	46	2.3	4.6	54	2.7	5.4
7	Gula	101	5.0	2.5	107	5.3	2.5
8	Sayur dan Buah	82	4.1	20.5	84	4.2	20.9
9	Lain-lain	36	1.8	0.0	37	1.9	0.0
Total		1,806	90.3	82.5	2,030	101.5	84.8

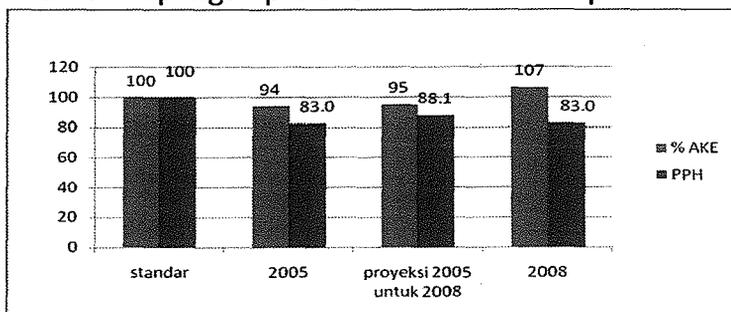
Sumber : Susenas BPS, 2005 dan 2008 (diolah)

3. Perkotaan dan Pedesaan

Situasi konsumsi pangan di wilayah pedesaan dan perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 8. Berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa untuk persentase AKE tahun 2005, proyeksi tahun 2005 untuk tahun 2008 dan 2008 adalah mencapai angka 100%. Sedangkan untuk skor PPH masih di bawah ideal semua. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, konsumsi penduduk telah memenuhi 2000 kkal, sedangkan berdasarkan skor PPH atau secara kualitas konsumsi penduduk masih belum cukup beragam.

Konsumsi energi tahun 2008 lebih tinggi daripada hasil proyeksi dari data tahun 2005. Konsumsi energi tahun 2008 yang berasal dari hasil proyeksi tahun 2005 sebesar 1 915 kkal/kap/hari (95.7% AKE) dan konsumsi hasil data modul tahunan tahun 2008 yaitu sebesar 2 132 kkal/kap/hari (106.6% AKE). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kuantitas konsumsi energi sudah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2005, sehingga perlu adanya pemantapan ketahanan pangan.

Skor PPH tahun 2007 yang berasal dari hasil proyeksi tahun 2005 yaitu sebesar 88.1 dan hasil data modul tahunan tahun 2008 menunjukkan skor yang lebih rendah yaitu 83. Hal ini menunjukkan bahwa skor PPH tahun 2008 belum mampu mencapai target sesuai hasil proyeksi tahun 2005, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 8 Perkembangan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan wilayah pedesaan dan perkotaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 – 2008

Konsumsi energi penduduk pedesaan dan perkotaan Provinsi Kepulauan Riau adalah 1 878 kkal/kap/hari pada tahun 2005 dan 2 132 kkal/kap/hari pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008 telah memenuhi tingkat konsumsi yang dianjurkan oleh WKNPG VIII tahun 2004 yaitu sebesar 2000 kkal/kap/hari. Persentase AKE penduduk pedesaan dan perkotaan mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 12.7 persen.

Skor PPH Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah ideal yaitu 100. Skor PPH Provinsi Kepulauan Riau tidak mengalami perubahan dari tahun 2005, namun perubahan terjadi pada kontribusi kelompok pangan yaitu sebagian besar kelompok pangan mengalami peningkatan, namun hal yang sebaliknya terjadi pada kelompok kacang-kacangan serta sayur dan buah. Jika dilihat dari komposisi pangan yang dikonsumsi penduduk pada tahun 2008, terlihat bahwa kelompok padi-padian masih mendominasi dibandingkan kelompok pangan lainnya. Kelompok padi-padian pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 58.8 persen, padahal proporsi ideal yang diharapkan adalah sebesar 50 persen dari total konsumsi energi yang dianjurkan.

Berdasarkan Tabel 34 mengenai perkembangan konsumsi pangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008 dapat dilihat konsumsi pangan aktual pada hampir semua kelompok pangan sudah melebihi konsumsi harapan, sedangkan konsumsi kelompok umbi-umbian serta sayur dan buah masih di bawah konsumsi harapan.

Tabel 34 Perkembangan konsumsi pangan penduduk pedesaan dan perkotaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2008

No	Kelompok Pangan	2005			2008		
		Kkal/Kap /Hr	%AKE	Skor PPH	Kkal/Kap /Hr	%AKE	Skor PPH
1	Padi-padian	1,019	50.9	25.0	1175.6	58.8	25.0
2	Umbi-umbian	51	2.5	1.3	62.3	3.1	1.6
3	Pangan Hewani	224	11.2	22.4	250.2	12.5	24.0
4	Minyak dan Lemak	255	12.8	5.0	264.1	13.2	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	46	2.3	1.0	59.0	3.0	1.0
6	Kacang-kacangan	46	2.3	4.6	43.0	2.2	4.3
7	Gula	112	5.6	2.5	156.6	7.8	2.5
8	Sayur dan Buah	85	4.2	21.2	78.4	3.9	19.6
9	Lain-lain	41	2.0	0.0	42.4	2.1	0.0
Total		1,878	93.9	83.0	2,132	106.6	83.0

Sumber : Susenas BPS, 2005 dan 2008 (diolah)

Konsumsi kelompok pangan tersebut masih jauh dibawah anjuran. Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan

masyarakat diperlukan agar tercapai pola konsumsi pangan yang ideal (PPH 100) melalui berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut tidak cukup pada sisi penyediaan saja, tetapi juga harus dapat langsung mempengaruhi perbaikan mutu gizi masyarakat, diantaranya peningkatan pendapatan dan daya beli yang diiringi dengan perbaikan pengetahuan gizi dan perubahan perilaku. Hal ini disebabkan pangan yang defisit umumnya dari kelompok pangan sumber protein (baik nabati maupun hewani) serta sayuran dan buah-buahan yang relatif mahal harganya. Melalui peningkatan pengetahuan gizi, memungkinkan pengelolaan sumberdaya pangan menjadi lebih baik, sehingga masyarakat dapat memilih jenis-jenis pangan bermutu gizi tinggi dengan harga terjangkau. Integrasi kegiatan dari hulu (diversifikasi produksi, penyediaan) ke hilir (diversifikasi pengolahan dan konsumsi pangan) mutlak diperlukan dan harus menjadi prioritas di masa mendatang.

5.2.3.2 Pola Konsumsi Pangan

Berdasarkan Tabel 35 dapat dilihat bahwa kontribusi energi didominasi oleh beras dan terigu pada tahun 2005 dan 2008 baik di pedesaan, perkotaan maupun pedesaan dan perkotaan.

Tabel 35 Kontribusi energi pangan sumber karbohidrat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 dan 2008

Jenis Pangan	Kontribusi Energi					
	Pedesaan		Perkotaan		Pedesaan dan Perkotaan	
	2005	2008	2005	2008	2005	2008
Beras	79.2	69.6	76.3	69.8	77.0	69.7
Jagung	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1
Terigu	14.4	23.9	19.2	26.7	18.1	25.2
Ubi Kayu	4.7	3.3	3.4	2.5	3.7	2.9
Ubi Jalar	0.4	1.0	0.3	0.2	0.3	0.6
Sagu	1.1	2.1	0.1	0.0	0.3	1.1
Kentang	0.2	0.1	0.4	0.6	0.4	0.4
Umbi lain	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Total	100.0	100	100	100	100	100

Sumber : Susenas BPS tahun 2005 dan 2008 (diolah)

Beras dan terigu menjadi pola konsumsi pangan sumber karbohidrat di Provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi energi beras di pedesaan, perkotaan, maupun pedesaan dan perkotaan semakin menurun sampai tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi pada kontribusi energi asal umbi-umbian (ubi jalar dan ubi kayu) mengalami penurunan dari tahun 2005. Sebaliknya kontribusi terigu semakin meningkat sampai tahun 2008 baik di pedesaan, perkotaan, maupun pedesaan dan perkotaan.

Tabel 36 Pola konsumsi sumber karbohidrat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 dan 2008

Golongan Pengeluaran	Pola Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat					
	Pedesaan		Perkotaan		Pedesaan + Perkotaan	
	2005	2008	2005	2008	2005	2008
I	-	B	B, T	-	B, T	B
II	B, T	B, T	B, T	B, T	B, T	B, T
III	B, T	B, T, S	B, T	B, T	B, T	B, T, S
IV	B, T, UK	B, T	B, T	B, T	B, T	B, T
V	B, T, UK	B, T	B, T	B, T	B, T	B, T
VI	B, T	B, T	B, T	B, T	B, T	B, T
VII	-	B, T	-	B, T	-	B, T
VIII	-	B, T, UK	-	B, T	-	B, T
Rata-rata	B, T	B, T	B, T	B, T	B, T	B, T

Keterangan: B: Beras; T: Terigu; UK: Ubi Kayu; S : Sagu

Pola konsumsi pangan sumber karbohidrat di Kepulauan Riau untuk wilayah perkotaan didominasi oleh beras dan terigu, begitu pula dengan wilayah pedesaan dan perkotaan. Sebaliknya pada beberapa golongan pengeluaran di wilayah pedesaan, ubi kayu dan sagu masih menjadi pola konsumsi. Pemilihan jenis pangan ini disebabkan ketidakmampuan secara ekonomi dalam pemenuhan sumber karbohidrat yang berasal dari beras dan terigu, seperti yang terlihat pada golongan pengeluaran VI sampai VIII, selain itu juga dapat disebabkan karena pemahaman akan pentingnya konsumsi pangan yang memiliki sifat fungsional. Pangan tersebut dijadikan makan kudapan, bukan sebagai makanan pokok atau makanan

primer. Secara keseluruhan pola konsumsi pangan sumber karbohidrat Provinsi Kepulauan Riau adalah Beras dan Terigu.

5.2.4 Status Gizi dan Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis antropometri dari pengukuran berat badan balita menurut umur pada tahun 2007 di Kepulauan Riau dengan status gizi buruk (3.0 %), gizi kurang (9.4 %), gizi baik (81.5%) dan gizi lebih (6.1 %). Balita gizi buruk di Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah angka Nasional (5.4%), begitu juga dengan balita gizi kurang masih di bawah angka Nasional (13.0%). Sedangkan persentase balita gizi lebih Provinsi Kepulauan Riau di atas angka Nasional (4.3%).

Persentase balita gizi buruk tertinggi berada di Kabupaten Natuna sebesar 6.7 persen, begitu pula untuk gizi kurang persentase tertinggi masih berada di Kabupaten Natuna dengan persentase sebesar 13.3 persen. Persentase balita gizi lebih tertinggi berada di Kabupaten Lingga yaitu sebesar 19.6 persen, nilai ini sangat jauh di atas persentase nasional. Kondisi seperti ini sangat erat kaitannya dengan intake makanan yang tidak baik, dan perilaku/ pola makanan yang tidak seimbang.

Tabel 37 Persentase balita menurut Status Gizi (BB/U)* dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Kategori Status Gizi BB/U			
	Gizi buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Gizi Lebih
Karimun	4.0	12.6	80.3	3.1
Bintan	2.2	11.8	81.9	4.1
Natuna	6.7	13.3	74.2	5.8
Lingga	5.4	10.2	64.8	19.6
Batam	2.1	7.9	84.5	5.5
Tanjungpinang	3.3	8.1	80.8	7.8
Kepulauan Riau	3.0	9.4	81.5	6.1

Sumber : Riskesdas 2007 Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

Hasil analisis antropometri dari pengukuran tinggi badan balita menurut umur pada tahun 2007 di Kepulauan Riau dengan kategori sangat pendek (13.4 %), pendek (12.8 %) dan normal (73.8 %). Persentase balita yang termasuk dalam kategori sangat pendek dan pendek di Provinsi Kepulauan Riau masih berada di bawah angka Nasional yang masing-masing sebesar (18.8%) dan (18.0%).

Persentase balita sangat pendek tertinggi berada di Kabupaten Lingga sebesar 33.4 persen, dan persentase balita pendek tertinggi berada di Kabupaten Natuna sebesar 21.8 persen. Angka-angka tersebut jauh di atas angka Nasional, hal ini menunjukkan bahwa status gizi balita menurut TB/U Provinsi Kepulauan Riau kurang baik sehingga perlu dilakukan perbaikan status gizi, khususnya pada bayi dan balita.

Tabel 38 Persentase balita menurut Status Gizi (TB/U)* dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Kategori Status Gizi TB/U		
	Sangat Pendek	Pendek	Normal
Karimun	14.4	16.6	69
Bintan	32.6	17.4	50
Natuna	13.3	21.8	65
Lingga	33.4	11.8	54.8
Batam	9.9	10.3	79.8
Tanjungpinang	6.8	12.5	80.7
Kepulauan Riau	13.4	12.8	73.8

Sumber : Riskesdas 2007 Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

Berdasarkan hasil analisis antropometri dari pengukuran berat badan balita menurut tinggi badan pada tahun 2007 di Kepulauan Riau dengan balita yang termasuk dalam kategori sangat kurus (5.4 %), kurus (8.1 %), normal (76.2 %) dan gemuk (10.3 %). Balita kategori sangat kurus di Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah angka Nasional (6.2%), begitu juga dengan balita gemuk berada di bawah angka Nasional (12.2%). Sedangkan persentase

balita kurus Provinsi Kepulauan Riau berada di atas angka Nasional (7.4%).

Persentase balita dalam kategori sangat kurus tertinggi berada di Kabupaten Lingga sebesar 14.9 persen, untuk balita kurus persentase tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 10.9 persen dan persentase balita gemuk tertinggi berada di Kabupaten Lingga sebesar 30.9 persen. Persentase-persentase tersebut jauh berada di atas angka Nasional.

Tabel 39 Persentase balita menurut Status Gizi (BB/TB)* dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Kategori Status Gizi BB/TB			
	Sangat Kurus	Kurus	Normal	Gemuk
Karimun	3.3	8.5	79.2	9.0
Bintan	2.1	4.6	68.2	25.0
Natuna	4.2	6.1	80.3	9.4
Lingga	14.9	7.9	46.4	30.9
Batam	4.2	8.2	81.4	6.2
Tanjungpinang	14.7	10.9	58.5	15.8
Kepulauan Riau	5.4	8.1	76.2	10.3

Sumber : Riskesdas 2007 Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

Hasil analisis antropometri dari penghitungan IMT orang dewasa pada tahun 2007 di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa penduduk yang termasuk dalam kategori kurus (9.2 %), normal (67.8 %), BB lebih (11.4 %) dan obese (11.5 %). Penduduk dengan kategori kurus di Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah angka Nasional (14.8%), sebaliknya persentase penduduk obese dan BB lebih di atas angka Nasional (masing-masing sebesar 10.3 dan 8.8%).

Persentase penduduk dalam kategori kurus tertinggi berada di Kabupaten Karimun sebesar 10.7 persen, untuk penduduk BB lebih persentase tertinggi berada di Kota Tanjungpinang sebesar 13.7 persen dan persentase obese tertinggi berada di Kota Batam

sebesar 12.8 persen. Dengan demikian perlu adanya peningkatan gizi penduduk baik pada balita maupun orang dewasa.

Tabel 40 Persentase status gizi penduduk dewasa (15 tahun keatas) menurut IMT dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Kategori Status Gizi BB/U			
	Kurus	Normal	BB Lebih	Obese
Karimun	10.7	68	10	11.3
Bintan	9.9	69.5	10.4	10.2
Natuna	10.3	71.4	6.7	11.6
Lingga	8.8	78	5.7	7.5
Batam	8.9	65.5	12.8	12.8
Tanjungpinang	8	68.8	13.7	9.5
Kepulauan Riau	9.2	67.8	11.4	11.5

Sumber : Riskesdas 2007 Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

Indikator yang digunakan dalam menilai cakupan pelayanan gizi adalah pemberian kapsul minyak beryodium dan kapsul vitamin A. Kapsul vitamin A diberikan setahun dua kali pada bulan Februari dan Agustus, sejak anak berusia enam bulan. Kapsul merah (dosis 100.000 IU) diberikan untuk bayi umur 6 – 11 bulan dan kapsul biru (dosis 200.000 IU) untuk anak umur 12 – 59 bulan.

Tabel 41 Persentase anak umur 6-59 bulan yang menerima kapsul vitamin A menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/ Kota	Menerima Kapsul Vitamin A
Karimun	70.2
Bintan	93.0
Natuna	45.2
Lingga	58.5
Batam	64.2
Tanjungpinang	83.2
Kepulauan Riau	67.7

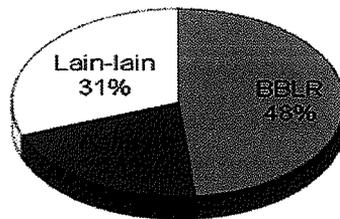
Sumber : Riskesdas 2007 Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional

Di Provinsi Kepulauan Riau persentase cakupan penerimaan kapsul vitamin A ternyata sudah lebih dari 60% tetapi masih berada dibawah angka nasional dan masih dibawah target nasional (72%). Cakupan penerimaan kapsul vitamin A bervariasi antar kabupaten/kota dengan cakupan terendah di Kabupaten Natuna (45.2%), selain itu cakupan sudah lebih dari 50% dan tertinggi dicapai oleh kabupaten Bintan sebesar 93%.

Pada tahun 2007, jumlah persalinan di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 37 234 persalinan. Dari persalinan tersebut terjadi persalinan lahir mati sebanyak 278 persalinan (0,75%). Sedangkan dari yang lahir hidup dilaporkan bahwa sebanyak 186 bayi meninggal. Jika dikonversikan secara langsung dengan penghitungan angka kematian bayi diketahui bahwa gambaran angka kematian bayi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 sebesar 5.03 per 1 000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2006 dapat dilihat bahwa jumlah yang lahir mati secara angka absolut mengalami peningkatan yaitu dari 188 orang pada tahun 2006 menjadi 278 orang pada tahun 2007, namun secara persentase justru mengalami penurunan yaitu 0,78% pada tahun 2006 menjadi 0.75% pada tahun 2007. Berdasarkan hasil SDKI 2007, angka kematian bayi secara nasional adalah sebesar 34 per 1 000 kelahiran hidup. AKB Provinsi Kepulauan Riau sudah jauh di bawah angka ini. Namun mengingat angka ini baru hanya dari data angka kematian yang dilaporkan tentunya belum menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Kemungkinan angka kematian bayi lebih besar dari angka yang dilaporkan. Distribusi jumlah kematian bayi menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 42.

Jumlah kelahiran dan kematian bayi dan Balita di Kepulauan Riau digambarkan pada Tabel 42. Diketahui dari 37 234 kelahiran bayi di Kepulauan Riau, hanya 278 saja yang lahir mati atau sekitar

0.75%. Selain itu juga terdapat 186 kejadian bayi mati di Kepulauan Riau, sehingga yang dilaporkan adalah sebanyak 5%. Wilayah dengan jumlah bayi mati tertinggi adalah Kota Batam yaitu sebanyak 61 kejadian dan selanjutnya kabupaten Karimun sebanyak 40 kejadian. Berdasarkan Gambar 5 terlihat penyebab terbanyak dari kematian bayi antara lain BBLR (48%), Asfiksia (21%), dan lain-lain (31%). Selanjutnya jumlah balita mati di Kepulauan Riau ada sebanyak 48 dan jumlah terbanyak adalah di Kabupaten Karimun yaitu sebanyak 44 kejadian.



Gambar 9 Persentase penyebab kematian bayi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007

Selain jumlah kematian bayi dan balita juga terdapat jumlah kematian ibu maternal yang dibedakan menjadi kematian ibu hamil, kematian ibu bersalin, serta kematian ibu nifas. Jumlah keseluruhan angka kematian ibu maternal di Kepulauan Riau adalah 29 dengan kematian ibu hamil sebanyak 3, Kematian ibu bersalin sebanyak 22, dan kematian ibu nifas sebanyak 4, jika dilihat berdasarkan wilayahnya, maka kematian ibu hamil di kabupaten karimun, kabupaten natuna, dan kota batam masing-masing terdapat 1 kejadian. Kematian ibu bersalin yang terbanyak adalah di kota batam dengan 6 kejadian, sedangkan untuk kematian ibu nifas terbanyak di Kabupaten karimun.

Angka Kematian Ibu (AKI) maternal adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat

persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Maternal merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah atau negara. Hal ini didasarkan bahwa kondisi kesehatan ibu pada waktu hamil akan menjadi penentu keselamatan ibu pada proses persalinan dan masa nifas. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan ibu hamil antara lain tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu waktu melahirkan dan masa nifas.

Penghitungan AKI sulit dilakukan karena untuk menghitung AKI dibutuhkan sampel yang besar. Angka Kematian Ibu sampai saat ini baru diperoleh dari survei-survei terbatas seperti penelitian dan pencatatan. Dari beberapa hasil survei dan penelitian terlihat bahwa angka kematian ibu maternal secara nasional secara konsisten menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu.

Jumlah bayi baru lahir (*neonatus*) di Provinsi Kepulauan Riau adalah 37 345 dan kota Batam adalah yang paling banyak jumlah bayi lahir yaitu sebanyak 19 248. Persentase neonatus yang melaksanakan kunjungan di provinsi Kepulauan Riau adalah 85.18% dan kabupaten Bintan adalah wilayah dengan persentase kunjungan neonatus tertinggi (97.68%), sedangkan kota Tanjungpinang adalah yang terendah (74.31%). Sebanyak 86.75% dari bayi yang baru lahir (*newborn*) ditimbang dan diketahui terdapat sekitar 2.04% yang berat lahirnya rendah (BBLR). Persentase bayi dengan berat lahir rendah adalah di Kabupaten Lingga yaitu sebesar 6.18%. Sebanyak 89.64% dari bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR telah mendapat penanganan. Jika dilihat menurut wilayah, hampir seluruh wilayah telah mampu menangani hingga 100% kejadian BBLR, namun kabupaten Lingga hanya mampu menangani sekitar 16% saja.

Masalah bayi BBLR merupakan masalah yang serius yang perlu mendapat perhatian khusus karena BBLR dapat menyebabkan anak bersangkutan mengalami gangguan perkembangan fisik dan mental pada masa mendatang. Tingginya angka kejadian BBLR sebagai penyebab utama kematian bayi perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari semua pihak.

Tabel 42 Jumlah kelahiran dan kematian bayi dan balita menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah / Total			% Lahir Mati	Jumlah Bayi Mati	Jumlah Balita	Jumlah Balita Mati	Konversi AKB	Konversi AKABA
		Lahir Hidup	Lahir Mati	Lahir Hidup + Lahir Mati						
1	Karimun	5,028	28	5,056	0.55	40	27,909	44	7.96	1.58
2	Bintan	3,022	7	3,029	0.23	9	16,735	0	2.98	0.00
3	Natuna	2,134	26	2,160	1.20	15	12,973	0	7.03	0.00
4	Lingga	2,067	21	2,088	1.01	26	6,523	4	12.58	0.61
5	Batam	20,512	191	20,703	0.92	61	93,042	0	2.97	0.00
6	Tanjungpinang	4,193	5	3,782	0.13	35	22,544	0	8.35	0.00
Jumlah (Provinsi)		36,95	278	37,234	0.75	18	179,726	48	5.03	0.27
Angka Kematian (Dilaporkan)						5.03		0.27		

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2007

Tabel 43 Jumlah kematian ibu maternal menurut kabupaten Riau tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu Maternal			Jumlah
			Kematian Ibu Hamil	Kematian Ibu Bersalin	Kematian Ibu Nifas	
1	Karimun	5,028	1	3	3	7
2	Bintan	3,022	-	1	-	1
3	Natuna	2,134	1	5	1	7
4	Lingga	2,067	-	5	-	5
5	Batam	22,232	1	6	-	7
6	Tanjungpinang	4,193	-	2	-	2
Jumlah (Provinsi)		38,676	3	22	4	29
Angka Kematian Ibu Maternal (Dilaporkan)						78

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2007

Kejadian BBLR merupakan suatu indikator derajat kesehatan masyarakat. Salah satu faktor penyebab kejadian BBLR adalah kondisi gizi ibu pada saat hamil yang banyak dipengaruhi oleh faktor seperti ekonomi keluarga, tingkat pendidikan ibu, ketersediaan pangan di masyarakat, sosial budaya, dan lain-lain. Pada tahun 2007, angka kejadian BBLR terdapat sebesar 2,04% (755 kasus).

Selanjutnya berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa kecamatan yang tergolong rawan gizi yaitu sebanyak 25 kecamatan dan yang terbanyak berada di kabupaten karimun (9 kecamatan). Jumlah balita gizi buruk di Kepulauan Riau sebanyak 520 dan yang tertinggi ada di Kota Batam sebanyak 173 balita. Dari jumlah balita yang ada yaitu sebanyak 179 726 orang dan hanya sekitar 53.06% dilakukan penimbangan. Sebanyak 83.05% dari balita yang ditimbang mengalami peningkatan Berat badan, sementara 1.82% lainnya berada dibawah garis merah.

Tabel 44 Cakupan kunjungan neonatus, bayi dan bayi BBLR yang ditangani menurut Kabupaten/Kota

N	Kabupaten/ Kota	Neonatus			Bayi			Bayi Lahir						
		Jumlah	KN2	%	Jml bayi	Kunjungan	%	Jml Lahir hidup	Ditimbang	% Ditimbang	BBLR	% BBLR	BBLR Ditangani	% BBLR Ditangani
1	Karimun	5,415	4,810	88.83	5,415	3,117	57.56	5,028	3,117	61.99	20	0.40	20	100
2	Bintan	3,019	2,949	97.68	3,301	2,512	76.10	3,022	2,956	97.82	17	0.56	17	100
3	Natuna	2,812	2,290	81.44	2,897	1,487	51.33	2,134	-	-	44	2.06	44	100
4	Lingga	2,257	2,061	91.32	1,933	1,049	54.27	1,509	-	-	93	6.18	15	16.08
5	Batam	9,248	16,287	84.62	22,232	23,172	104.23	22,232	22,232	100.00	541	2.43	541	100
6	Tanjungpinang	4,594	3,414	74.31	9,066	7,085	78.15	4,193	3,753	89.51	40	0.95	40	100
Jumlah (Provinsi)		37,345	31,811	85.18	44,844	38,422	85.68	36,956	32,058	86.75	755	2.04	677	89.64

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2007

Tabel 45 Status gizi balita dan jumlah kecamatan rawan gizi menurut Kabupaten/Kota Provinsi

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah Balita					% Balita				Kec Bebas Rawan Gizi
		Balita yang ada	Ditimbang	BB Naik	BGM	Gizi Buruk	Ditimbang	BB Naik	BGM	Gizi Buruk	
1	Karimun	27,909	12,696	9,694	475	40	45.49	76.35	3.74	0.32	9
2	Bintan	16,735	12,085	9,185	96	58	72.21	76.00	0.79	0.48	6
3	Natuna	12,973	8,695	6,649	225	35	67.02	76.47	2.59	0.40	0
4	Lingga	6,523	4,972	4,161	157	33	76.22	83.69	3.16	0.66	5
5	Batam	93,042	40,434	36,624	745	173	43.46	90.58	1.84	0.43	1
6	Tanjungpinang	22,544	16,482	12,884	39	181	73.11	78.17	0.24	1.10	4
Jumlah (Provinsi)		179,726	95,364	79,197	1,737	520	53.06	83.05	1.82	0.55	25

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2007

Jumlah pasangan usia subur di Kepulauan Riau adalah sebanyak 260 389 dan kota Batam adalah wilayah dengan jumlah pasangan usia subur tertinggi atau sebanyak 147 817, sedangkan yang terendah adalah kabupaten Lingga yaitu sebanyak 12 541. Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/kota provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 171 326 orang adalah peserta KB aktif dan sebanyak 30 753 orang merupakan peserta KB baru.

Tabel 46 Jumlah PUS, Peserta KB, Peserta KB Baru, dan KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah PUS	Peserta KB Baru		Peserta KB Aktif	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Karimun	34 779	4 738	13.62	26 554	76.35
2	Bintan	21 960	2 209	10.06	15 415	70.20
3	Natuna	16 694	678	4.06	10 524	63.04
4	Lingga	15 541	1 028	6.61	11 821	76.06
5	Kep. Anambas*	-	-	-	-	-
6	Batam	146 936	19 744	13.44	99 612	67.79
7	Tanjungpinang	28 612	5 127	17.92	19 212	67.15
Jumlah (Provinsi)						
2008		264 522	33 524	12.67	183 138	69.23
2007		260 389	30 753	11.81	171 326	65.80

Sumber : Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2008

*) Data Kabupaten Kep. Anambas masih tergabung dengan Kabupaten Natuna

Persentase Rumahtangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kepulauan Riau berdasarkan data profil kesehatan tahun 2007 adalah sebesar 28.91% dari jumlah rumahtangga yang dipantau sebanyak 28 806. Kabupaten Bintan memiliki persentase jumlah rumah tangga ber-PHBS terbesar yaitu 59.66% dari total 7 085 rumahtangga yang dipantau, sedangkan yang terkecil atau paling sedikit rumahtangga ber-PHBS adalah Kabupaten Natuna yang hanya sebesar 5.24% dari total 210 rumahtangga yang dipantau.

Tabel 47 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

NO	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga		
		Jumlah Dipantau	Ber PHBS	%
1	Karimun	250	123	49.20
2	Bintan	7,085	4,227	59.66
3	Natuna	210	11	5.24
4	Lingga	16,641	2,549	15.32
5	Batam	2,100	844	40.19
6	Tanjungpinang	2,520	575	22.82
Jumlah (Provinsi)		28,806	8,329	28.91

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2007

Jumlah seluruh rumah di Kepulauan Riau adalah 267 703 dan dari jumlah tersebut sekitar 35 persennya diperiksa untuk dikategorikan sebagai rumah sehat atau tidak sehat. Hasil pemeriksaan terhadap 92 672 rumah yang diperiksa menunjukkan bahwa sebanyak 73 225 rumah atau 79% dari yang diperiksa termasuk rumah sehat. Kota Batam adalah yang paling sedikit diperiksa rumahnya yaitu hanya 9%, namun dari jumlah yang diperiksa tersebut sekitar 80% termasuk rumah sehat. Kota Tanjungpinang adalah yang paling banyak diperiksa.

Tabel 48 Persentase Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007

NO	Kabupaten/Kota	Rumah				
		Jumlah Seluruhnya	Jumlah Diperiksa	% Diperiksa	Jumlah Sehat	% Sehat
1	Karimun	4,866	15,318	61.60	9,882	64.51
2	Bintan	24,196	7,085	29.28	4,227	59.66
3	Natuna	27,553	5,914	21.46	5,589	94.50
4	Lingga	16,621	9,161	55.12	7,199	78.58
5	Batam	121,517	10,938	9.00	9,229	84.38
6	Tanjungpinang	52,950	44,256	83.58	37,099	83.83
Jumlah (Provinsi)		267,703	92,672	34.62	73,225	79.02

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2007

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencapaian target pembangunan kesehatan. Beberapa wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan di sektor kesehatan antara lain melalui kegiatan Posyandu, Polindes (Pondok Bersalin Desa), Toga (Tanaman Obat Keluarga), POD (Pos Obat Desa), Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja), Desa siaga, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan sebagainya.

Kegiatan posyandu merupakan satu-satunya kegiatan yang terus dipantau dan dibina. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya seperti TOGA, POD ataupun Pos UKK mengalami stagnasi (kurang berkembang). Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kepedulian masyarakat disertai dengan pembiayaan untuk jenis UKBM belum memadai. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini perlu mendapat perhatian yang optimal kembali dari masing-masing pengelola program kesehatan.

Jumlah Posyandu pada tahun 2007 di Kepulauan Riau tercatat sebanyak 980 posyandu, terjadi peningkatan sebesar 5.61% dibanding tahun 2006. Sebagian besar posyandu yang ada masih tergolong dalam kategori Posyandu Pratama dan Posyandu Madya. Dilihat dari segi kuantitas, jumlah Posyandu di Provinsi Kepulauan Riau sudah memadai. Namun dari segi kualitas masih harus ditingkatkan melihat masih banyaknya Posyandu pada tingkatan Pratama dan Madya. Pembinaan, penyegaran kader, dan peninjauan kembali kelengkapan peralatan Posyandu perlu dilakukan sehingga jumlah Posyandu Purnama dan Mandiri meningkat.

Program baru yang diluncurkan Depkes dalam upaya untuk mencapai target Indonesia Sehat 2010 adalah program Desa Siaga. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat desa menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti bencana dan wabah penyakit. Dengan program ini, kesehatan lingkungan desa diharapkan bisa

meningkat. Jumlah Desa Siaga yang terealisasi terbentuk di Kepulauan Riau pada tahun 2007 adalah sebanyak 117 desa dari 326 desa/kelurahan yang ada (35.89%). Data lebih rinci tentang jumlah UKBM di Provinsi Kepulauan Riau menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel

Tabel 49 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Menurut Kabupaten/Kota

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah				
		Desa/ kelurahan	Desa Siaga	Poskesdes	Polindes	Posyandu
1	Karimun	54	25		29	183
2	Bintan	42	18	18	36	133
3	Natuna	83	24	23	57	142
4	Lingga	34	15		29	96
5	Batam	64	17	11	21	261
6	Tanjungpinang	18	18	2	6	114
Jumlah (Provinsi)		295	117	54	178	929

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2007

5.2.5 Tingkat Kerawanan Pangan Kepulauan Riau

Index komposit kerawanan pangan (akses, pemanfaatan, kerentanan dan keseluruhan) diukur dengan menggunakan metoda ranking sederhana. Index komposit telah dihitung tanpa pembobotan indikator. Pertama-tama semua kabupaten diurutkan berdasarkan semua individu indikator, kemudian urutan rata-rata komposit dihitung menggunakan indikator terpilih.

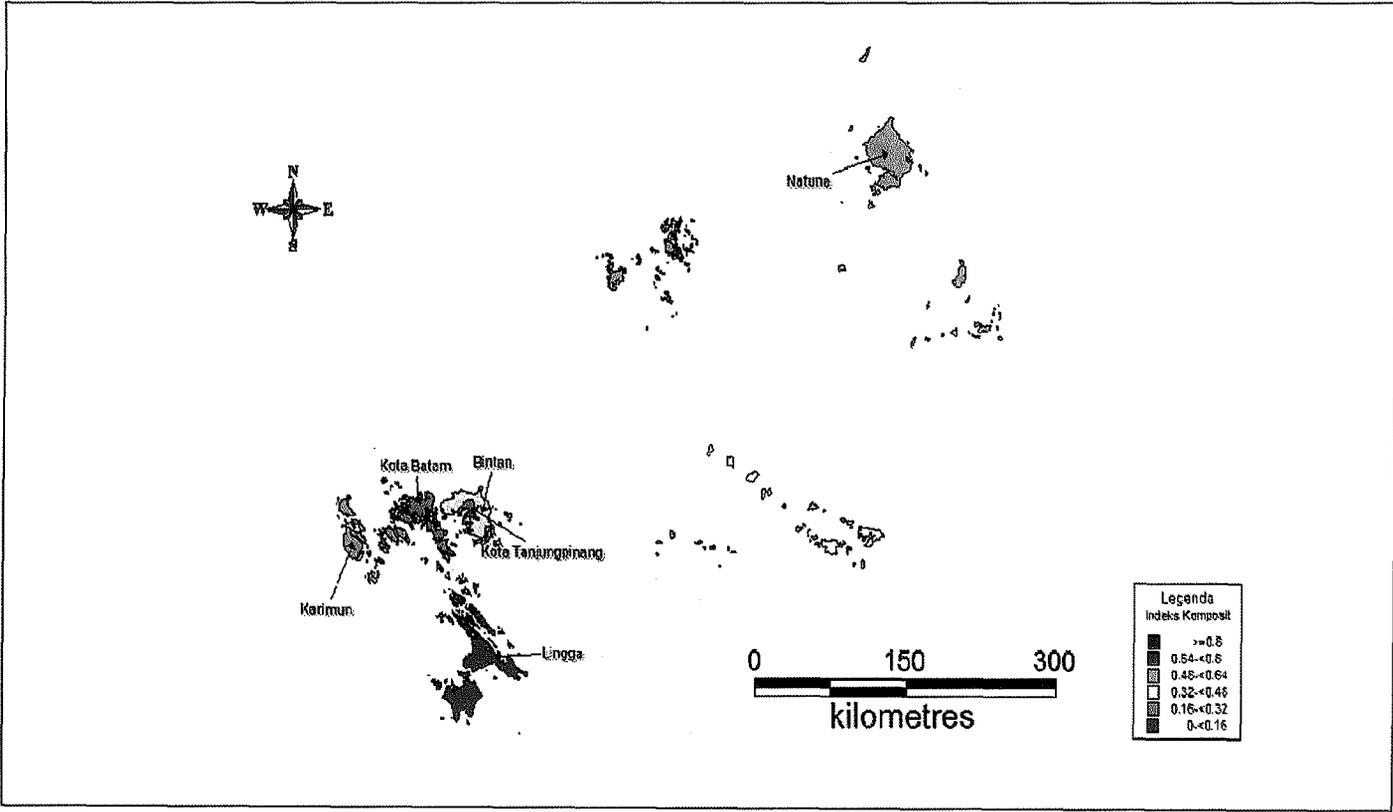
Inter relasi antar 17 indikator telah dihitung dengan menggunakan Matriks Korelasi Person untuk mengetahui indikator yang paling berpengaruh terhadap kerawanan pangan secara keseluruhan pada suatu wilayah. Semakin tinggi nilai Index Kompositnya, semakin tinggi tingkat kerawanan pangan. Sehingga peta yang dikembangkan dalam laporan ini menonjolkan daerah yang diwarnai merah yang membutuhkan perhatian yang lebih besar. Penyebab kerawanan pangan dapat dipahami dengan

melihat peta-peta indikator masing-masing. Beberapa rekomendasi juga telah disusun untuk mengentaskan situasi kerawanan pangan wilayah.

Index komposit kerawanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum berada pada kategori Cukup Tahan Pangan hingga Tahan Pangan (pada peta bewarna hijau muda dan hijau). Kerawanan pangan merupakan masalah multi-dimensional, oleh karena itu dalam analisisnya merupakan manifestasi dari dimensi/faktor-faktor sebagai berikut :

1. Dimensi Ketersediaan Pangan
2. Dimensi Akses Terhadap Pangan dan Penghasilan
3. Dimensi Pemanfaatan dan Penyerapan Pangan

Berdasarkan nilai indeks komposit kerawanan pangan di Kepulauan Riau, maka tingkat kerawanan pangan di Kepulauan Riau berada pada tingkat rawan hingga aman. Kabupaten Lingga adalah yang termasuk kondisi rawan, sementara Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk kategori aman. Kondisi tingkat kerawanan pangan di Kepulauan Riau disajikan dalam peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Provinsi Kepulauan Riau berikut ini:



Keterangan:

- a. Kabupaten Karimun indikasi merah muda = cukup rawan
- b. Kabupaten Bintan indikasi kuning = cukup aman
- c. Kabupaten Natuna indikasi merah muda = cukup rawan
- d. Kabupaten Lingga indikasi merah = rawan
- e. Kota Batam indikasi hijau muda = aman
- f. Kota Tanjungpinang indikasi hijau muda = aman

Secara rinci potensi kerawanan pangan pada enam kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau, menurut analisis data diklasifikasikan sebagai wilayah aman dan rawan dengan kisaran indeks 0.19 – 0.71¹ dengan klasifikasi sebagaimana disajikan pada Tabel 50. Nilai indeks 0.71 mengindikasikan kondisi rawan dan dimiliki oleh Kabupaten Lingga, sementara nilai 0.19 menggambarkan kondisi yang aman, nilai tersebut dimiliki oleh Kota Batam dan Tanjungpinang. Kondisi yang menyebabkan Kabupaten Lingga termasuk kategori rawan adalah dilihat dari aspek akses terhadap pangan dan sumber kehidupan serta aspek penyerapan dan pemanfaatan pangan. Kemiskinan adalah penyebab utama kondisi rawan pangan di wilayah ini, selain itu juga disebabkan oleh terbatasnya akses listrik serta jauhnya jarak fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh penduduk. Sementara potensi penyebab kerawanan pangan di Kota Batam dan Tanjungpinang diperoleh dari aspek ketersediaan pangan. Hal ini terjadi disebabkan terbatasnya lahan persawahan di kedua wilayah tersebut.

¹ indeks tingkat kerawanan pangan suatu wilayah diklasifikasikan atas atas: 1) nilai > 0.80 menunjukkan kondisi sangat rawan, 2) nilai 0.64-0.80 menunjukkan kondisi rawan, 3) nilai 0.48-0.64 menunjukkan kondisi cukup rawan; 4) nilai 0.32-0.48 menunjukkan kondisi cukup aman; 5) nilai 0.16-0.32 menunjukkan kondisi aman; dan nilai < 0.16 menunjukkan sangat aman

Tabel 50 Indikator komposit kerawanan pangan pada enam kabupaten di Propinsi kepulauan Riau tahun 2008

No	Kabupaten	Indeks gab ketersediaan pangan	Indeks gab akses thd pangan & sumber pendapatan	Indeks gab penyerapan & pemanfaatan pangan	Indek gab kerentanan pangan	Indeks gab kerawanan pangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Karimun	0.63	0.47	0.55	NA	0.53
2	Bintan	0.06	0.30	0.49	NA	0.38
3	Natuna	0.00	0.58	0.79	NA	0.63
4	Lingga	0.10	0.81	0.78	NA	0.71
5	Batam	1.00	0.12	0.13	NA	0.22
6	Tanjungpinang	0.52	0.29	0.06	NA	0.19

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau (2008)

Analisis kerawanan pangan pada empat kabupaten dan dua kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai hasil analisis komposit terhadap tiga dimensi kerawanan pangan yang diurutkan menurut tingkat kerawanan pangganya adalah sebagai berikut :

1. **Kabupaten Lingga**, nilai indeks 0.71 termasuk kategori rawan. Potensi kerawanan pangan ditentukan oleh aspek akses terhadap pangan dan sumber pendapatan, dimana nilai indeks mencapai 0.81 serta aspek penyerapan dan pemanfaatan pangan dengan indeks gabungan sebesar 0.78. Kabupaten Lingga termasuk wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu 18.43%. Selain itu juga masih terdapat sekitar 22.47% penduduknya yang belum menikmati akses terhadap listrik. Pada aspek penyerapan dan pemanfaatan pangan diakibatkan oleh masih tingginya persentase penduduknya yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih yaitu sebesar 41.53% dan terdapat 97% penduduknya yang jauh dari fasilitas kesehatan (> 5 km). Selain itu juga masih terdapat perempuan buta huruf di Kabupaten Lingga yang relatif tinggi sebesar 7.67%. Hal ini berhubungan dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lingga, sehingga kemampuan mengakses pendidikan menjadi terbatas. Hasil uji korelasi pearson juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat

antara tingginya persentase penduduk yang belum mampu mengakses listrik dengan kejadian buta huruf ($p=0.004$; $r=0.945$). Hal ini menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang tidak mampu mengakses listrik, maka jumlah penduduk buta huruf juga akan semakin meningkat.

2. **Kabupaten Natuna**, nilai indeks 0.63 termasuk cukup rawan. Indeks komposit kerawanan pangan dipengaruhi aspek penyerapan dan pemanfaatan pangan dengan nilai indeks mencapai 0.79.

Rendahnya akses penyerapan dan pemanfaatan pangan Kabupaten Natuna disebabkan oleh masih terdapatnya 29.96% penduduk yang tidak mampu menikmati akses terhadap air bersih serta rendahnya usia harapan hidup di Kabupaten Natuna relatif terhadap wilayah lain (68.1). Aspek lain yang juga cukup berpengaruh adalah aspek akses terhadap pangan dan penghasilan dengan nilai indeks sebesar 0.58. Kabupaten Natuna termasuk wilayah yang memiliki akses jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat terbesar dengan persentase sebesar 23.66%. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa ketidakmampuan penduduk dalam mengakses air bersih, berhubungan nyata dengan ketidakmampuan akses terhadap listrik ($p=0.003$; $r=0.956$). Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan banyaknya penduduk yang tidak mampu mengakses listrik, maka semakin banyak pula jumlah penduduk yang tidak memiliki kemampuan mengakses air bersih.

Sementara untuk akses ketersediaan pangan, Kabupaten Natuna adalah yang terbaik dengan nilai indeks sebesar 0.00 yang termasuk sangat aman, namun kondisi aman yang dimaksud tersebut belum dapat diartikan bahwa kemampuan produksi pangan (padi-padian dan umbi-umbian) telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi normatif, karena produksi pangan padi-padian dan umbi-umbian di Kabupaten Natuna hanya sebesar 73.66 gram/kapita/hari dari kebutuhan normatif sebesar 300 gram/kapita/hari. Nilai indeks ketersediaan Kabupaten Natuna termasuk tinggi, sebab relatif terhadap wilayah yang lain. Produksi yang relatif tinggi di Kabupaten

Natuna disebabkan tersedianya lahan persawahan yang relatif cukup luas. Apabila dilihat berdasarkan rasio konsumsinya, maka kabupaten Natuna masih termasuk wilayah yang mengalami defisit pangan.

3. **Kabupaten Karimun**, nilai indeks 0.53 dengan klasifikasi cukup rawan. Indeks komposit di kabupaten Karimun dipengaruhi oleh indeks ketersediaan pangan (0.63) serta disebabkan juga oleh aspek penyerapan dan pemanfaatan pangan (0.55).

Kabupaten Karimun adalah wilayah dengan ketersediaan padi-padian dan umbi-umbian terendah kedua setelah Kota Batam. Kabupaten Karimun hanya mampu memproduksi padi-padian dan serealisa sebanyak 25.26 gram/kapita/hari. Berdasarkan nilai rasio konsumsi serealisa dan umbi-umbian terhadap produksi, maka Kabupaten Karimun termasuk wilayah dengan kategori defisit tinggi. Pada aspek penyerapan dan pemanfaatan pangan disebabkan oleh redahnya keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan serta kemampuan mengakses air bersih yaitu masing-masing sebanyak 72.73% dan 21.68%, namun tidak hanya itu fasilitas jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat di kabupaten Karimun juga termasuk rendah karena masih terdapat sekitar 20.37% jalan yang belum mampu dilalui kendaraan roda empat. Kurangnya akses terhadap infrastruktur tersebut semakin memperburuk kemampuan penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan dan air bersih. Selain itu juga menyebabkan tingginya kasus atau kejadian balita gizi kurang yang tertinggi di Kepulauan Riau sebesar 20%, dan hal ini terkait langsung dengan ketidakmampuan akses terhadap fasilitas kesehatan. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa tingginya persentase ketidakmampuan akses terhadap infrastruktur berhubungan kuat dengan kejadian balita gizi kurang ($p=0.002$; $r=0.961$).

4. **Kabupaten Bintan**, nilai indeks 0.38 dengan klasifikasi cukup aman. Analisis komposit menunjukkan nilai indeks kerawanan pangan ditentukan oleh indeks penyerapan dan pemanfaatan pangan, yaitu disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan sebesar 75.61%, hal ini berarti

keterjangkauan fasilitas kesehatan di kabupaten Bintan terbatas disebabkan oleh jarak yang jauh (> 5 km). Kondisi tersebut patut diwaspadai karena berpotensi menyebabkan kerawanan pangan, terutama terkait dengan kejadian balita gizi kurang. Jika dilihat menurut ketidakmampuan akses jalan atau infrastruktur dilalui kendaraan roda empat, maka kabupaten Bintan relatif baik dibandingkan Kabupaten Natuna dan Karimun dengan persentase sebesar 9.8%. Selain rendahnya akses terhadap fasilitas kesehatan, penduduk Kabupaten Bintan juga menghadapi permasalahan rendahnya kemampuan mengakses air bersih digambarkan dengan nilai persentase sebesar 24.31%.

5. **Kota Batam**, nilai indeks 0.22 dengan klasifikasi cukup aman. Kota Batam merupakan wilayah yang mengalami defisit ketersediaan pangan, dimana kemampuan penyediaan normatif hanya 7.02 gram/kapita/hari dari kebutuhan konsumsi normatif (300 gram/kapita/hari). Berdasarkan nilai rasio konsumsinya maka dikatakan Kota Batam termasuk wilayah defisit tinggi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan persawahan di kota Batam dan di samping itu juga tingginya jumlah penduduk di Kota Batam yang mencapai 50.8% populasi penduduk Kepulauan Riau.

Meskipun termasuk wilayah yang tergolong maju dari segi ekonomi, namunmasih terdapat beberapa kondisi yang patut diwaspadai Kota Batam karena berpotensi menimbulkan rawan pangan. Faktor yang menentukan kondisi rawan dari aspek penyerapan dan pemanfaatan adalah jauhnya fasilitas yang tidak mampu diakses oleh 45.28% penduduknya serta terdapat 7.14% penduduk yang tidak mampu mengakses air bersih. Selain itu dari aspek akses dan rendahnya persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pangan dan penghidupan menunjukkan masih terdapat penduduk miskin di Kota Batam sebesar 7.22%.

6. **Kota Tanjungpinang**, nilai indeks 0.19 dengan klasifikasi aman. Kondisi ini ditinjau dari aspek akses pangan dan penghasilan serta

aspek pemanfaatan dan penyerapan masing-masing dengan nilai indeks sebesar 0.29 dan 0.06.

Pada aspek akses terhadap pangan dan penghasilan potensi kerawanan pangan disebabkan persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan yang relatif masih tinggi yaitu sebesar 14.3%, hal ini perlu diwaspadai sebab termasuk yang tertinggi kedua di Provinsi Kepulauan Riau setelah Kabupaten Lingga. Sementara pada akses Pemanfaatan dan pemanfaatan pangan yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya usia harapan hidup di Kota Tanjungpinang relatif terhadap wilayah lain yaitu sebesar 69.51. Selain itu persentase balita gizi kurang di wilayah ini juga perlu diwaspadai dengan persentase kejadian sebesar 11.4%.

Selain peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan Provinsi Kepulauan Riau, disajikan pula peta kondisi ketahanan dan kerentanan pangan masing-masing kabupaten berdasarkan indikator pada masing-masing aspek (Lampiran).

5.3 Analisis Proyeksi Konsumsi Dan Ketersediaan Pangan

5.3.1 Perencanaan Kebutuhan pangan

5.3.1.1 Konsumsi/Kebutuhan Pangan berdasarkan PPH

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun menuntut peningkatan kebutuhan pangan untuk konsumsi. Berdasarkan data, diketahui jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pertengahan tahun 2009 berdasarkan hasil proyeksi adalah 1 438 357 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 3.1% per tahun. Proyeksi jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau sampai tahun 2015 disajikan pada Tabel 51.

Tabel 51 Proyeksi jumlah pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 – 2015

Jumlah Penduduk Tahun (satuan jiwa)						
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1 438 357	1 482 946	1 528 918	1 576 314	1 625 180	1 675 561	1 727 503

Setelah diketahui proyeksi jumlah penduduk, maka dapat dihitung proyeksi kebutuhan pangan untuk konsumsi penduduk sampai dengan tahun 2015. proyeksi ini mutlak diperlukan dalam perencanaan penyediaan pangan untuk konsumsi penduduk agar tercapai situasi ketahanan pangan yang ideal. Sasaran skor PPH untuk tahun 2009 – 2015 disajikan pada Tabel 52 .

Tabel 52 Sasaran skor PPH tahun 2009 – 2015

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi-padian	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	1.8	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5
3	Pangan Hewani	23.1	23.2	23.4	23.5	23.7	23.8	24.0
4	Minyak dan Lemak	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	Kacang-kacangan	6.8	7.3	7.8	8.4	8.9	9.5	10.0
7	Gula	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
8	Sayur dan Buah	24.7	25.6	26.5	27.4	28.2	29.1	30.0
9	Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Skor PPH		89.8	91.5	93.2	94.9	96.6	98.3	100

Berdasarkan sasaran skor PPH pada Tabel 37 diketahui bahwa kelompok umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah harus ditingkatkan agar mencapai skor ideal pada tahun 2015. Kelompok lain seperti padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula tidak mengalami peningkatan skor PPH, karena pada tahun 2009 telah mencapai skor maksimum. Setiap tahunnya, sasaran PPH meningkat 1.7 poin. Oleh karena itu dibutuhkan proyeksi kebutuhan pangan dalam satuan ton/tahun hingga mencapai skor PPH yang diharapkan. Proyeksi kebutuhan pangan berdasarkan PPH di wilayah Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 53.

Proyeksi kebutuhan pangan Kepulauan Riau dari tahun 2009 sampai 2015 untuk sembilan kelompok pangan rata-rata menunjukkan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang semakin meningkat setiap

tahunnya serta untuk menyeimbangkan jumlah konsumsi antar berbagai kelompok pangan.

Kebutuhan kelompok pangan padi-padian diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun 2009 – 2015. Kebutuhan jenis pangan beras, jagung dan terigu diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk mencapai kondisi yang ideal pada tahun 2015. Total kebutuhan padi-padian tahun 2015 diproyeksikan sebesar 173 398 ton per tahun.

Kelompok jenis pangan yang kedua adalah umbi-umbian. Kebutuhan akan kelompok umbi-umbian diproyeksikan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan konsumsi kelompok umbi-umbian masih dibawah standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, tiap tahun diproyeksikan mengalami peningkatan. Kenaikan terbesar ditargetkan terjadi pada ubi kayu karena produksi dan produktivitas ubi kayu lebih besar dibandingkan dengan jenis ubi lain.

Tabel 53 Proyeksi kebutuhan pangan berdasarkan PPH menurut sembilan kelompok pangan

Kelompok/Jenis Pangan	Proyeksi Kebutuhan Pangan (Ton Per Tahun)						
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1. Padi-Padian							
Beras	125,450	130,021	134,755	139,657	144,733	149,991	155,434
Jagung	331	343	356	368	382	396	410
Terigu	14,190	14,707	15,243	15,797	16,372	16,966	17,582
Subtotal Padi-padian	139,949	145,048	150,328	155,797	161,460	167,325	173,398
2. Umbi-umbian							
Ubi Kayu	23,768	26,390	29,152	32,060	35,120	38,339	41,724
Ubi Jalar	1,842	2,045	2,259	2,484	2,721	2,971	3,233
Sagu	758	842	930	1,023	1,121	1,223	1,331
Kentang	5,634	6,255	6,910	7,599	8,325	9,088	9,890
Umbi Lainnya	325	361	399	438	480	524	571
Subtotal Umbi-umbian	32,327	35,894	39,650	43,605	47,767	52,145	56,748
3. Pangan Hewani							
Ikan	52,636	53,943	55,280	56,648	58,048	59,481	60,946
Daging Ruminansia	2,256	2,312	2,369	2,428	2,488	2,549	2,612
Daging Unggas	5,313	5,444	5,579	5,717	5,859	6,003	6,151
Telur	11,470	11,755	12,046	12,345	12,650	12,962	13,281
Susu	4,643	4,759	4,876	4,997	5,121	5,247	5,376
Subtotal Pangan Hewani	76,239	78,132	80,069	82,051	84,078	86,153	88,275

Kelompok/Jenis Pangan	Proyeksi Kebutuhan Pangan (Ton Per Tahun)						
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
4. Minyak dan Lemak							
Minyak Kelapa	7,609	7,733	7,859	7,984	8,110	8,236	8,361
Minyak Sawit	6,643	6,752	6,862	6,971	7,081	7,191	7,301
Minyak Lain	92	94	95	97	98	100	101
Subtotal Minyak dan Lemak	14,345	14,580	14,816	15,052	15,289	15,526	15,763
5. Buah/Biji Berminyak							
Kelapa	4,155	4,364	4,582	4,809	5,046	5,293	5,550
Kemiri	430	451	474	497	522	547	574
Kacang Mede	0	0	0	0	0	0	0
Emping	49	51	54	56	59	62	65
Subtotal Buah/Biji berminyak	4,720	4,958	5,205	5,463	5,732	6,013	6,305
6. Kacang-kacangan							
Kacang Tanah	649	724	803	887	975	1,067	1,165
Kacang Kedelai	9,241	10,313	11,442	12,631	13,883	15,201	16,587
Kacang Hijau	2,372	2,647	2,937	3,242	3,563	3,901	4,257
Kacang lain	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Kacang-kacangan	12,296	13,721	15,224	16,806	18,472	20,225	22,069
7. Gula							
Gula Pasir	14,929	15,286	15,652	16,025	16,406	16,796	17,194
Gula Merah	540	553	566	580	594	608	622
Sirup	955	978	1,001	1,025	1,050	1,074	1,100
Subtotal Gula	16,424	16,818	17,219	17,630	18,050	18,478	18,916
8. Sayur dan Buah							
Sayur	86,375	88,359	90,383	92,448	94,554	96,701	98,891
Buah	40,295	41,220	42,164	43,128	44,110	45,112	46,133
Subtotal Sayur dan Buah	126,670	129,579	132,548	135,575	138,663	141,813	145,024
9. Lain-lain							
Minuman	14,980	13,847	12,631	11,325	9,926	8,430	6,831
Bumbu	5,741	5,307	4,841	4,340	3,804	3,231	2,618
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Lain-lain	20,740	19,172	17,487	15,680	13,743	11,671	9,458

Kebutuhan akan kelompok pangan hewani juga diharapkan mengalami peningkatan. Total kebutuhan kelompok pangan hewani dari tahun 2009 ke 2015 adalah dari 76 239 ton per tahun menjadi 88 275 ton per tahun. Sektor perikanan di daerah Kepulauan Riau belum diolah secara maksimal, jadi sangat diharapkan peningkatan konsumsi pada jenis kelompok pangan ini karena pengaruh wilayah yang mendukung.

Kebutuhan pangan kelompok minyak dan lemak diproyeksikan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena konsumsi kelompok jenis pangan ini belum mencapai standar yang telah ditentukan. Total kebutuhan kelompok minyak dan lemak pada tahun 2015 adalah sebesar 15 763 ton/tahun.

Kebutuhan kelompok pangan buah/biji berminyak juga diproyeksikan mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 kebutuhannya sebesar 6 305 ton per tahun. Kebutuhan kelompok pangan jenis kacang-kacangan diproyeksikan meningkat. Hal ini karena konsumsi jenis kacang-kacangan masih dibawah standar yang ditetapkan. Total kebutuhan kelompok jenis kacang-kacangan dari tahun ke 2009 hingga tahun 2015 adalah sebesar 12 296 ton per tahun menjadi 22 069 ton per tahun.

Kebutuhan kelompok pangan gula juga diproyeksikan meningkat. Tahun 2009 konsumsi gula di Kepulauan Riau adalah sebesar 16 424 ton per tahun, dan diproyeksikan meningkat pada tahun 2015 menjadi 18 916 ton per tahun. Selain itu kelompok pangan jenis sayur dan buah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan yang diharapkan sebesar \pm 3 000 ton per tahun untuk konsumsi sayur dan buah. Total proyeksi kebutuhan pada tahun 2015 adalah sebesar 145 024 ton pertahun. Hanya kelompok pangan lain-lain yang diproyeksikan mengalami penurunan. Penurunan kelompok pangan ini dari tahun 2009 sebesar 20 740 ton pertahun menjadi 9 458 ton pertahun pada tahun 2015.

Secara umum dapat dikatakan hampir semua kelompok pangan diproyeksikan mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga tercapai kondisi ideal pada tahun 2015. Peningkatan yang terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kepulauan Riau yang termasuk tinggi dengan laju sebesar 3.1% per tahunnya. Sehingga peningkatan proyeksi kebutuhan pangan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk Provinsi Kepulauan Riau.

5.3.2 Penyediaan Pangan (Proyeksi dalam Ton/tahun)

Target penyediaan sembilan kelompok/jenis pangan di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2009 sampai 2015 secara umum mengalami peningkatan kecuali untuk kelompok pangan lain-lain. Kelompok/jenis pangan padi-padian yang terdiri dari beras, jagung dan terigu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Target ketersediaan padi-padian pada tahun 2015 adalah sebesar 190 738 ton pertahun.

Tabel 54 Proyeksi ketersediaan pangan wilayah

Kelompok/Jenis Pangan	Proyeksi Ketersediaan Pangan (Ton Per Tahun)						
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1. Padi-Padian							
Beras	137,995	143,023	148,230	153,622	159,207	164,990	170,978
Jagung	364	377	391	405	420	435	451
Terigu	15,609	16,178	16,767	17,377	18,009	18,663	19,340
Subtotal Padi-padian	153,943	159,552	165,361	171,377	177,606	184,057	190,738
2. Umbi-umbian							
Ubi Kayu	26,145	29,029	32,067	35,266	38,632	42,173	45,896
Ubi Jalar	2,026	2,250	2,485	2,733	2,994	3,268	3,557
Sagu	834	926	1,023	1,125	1,233	1,346	1,464
Kentang	6,197	6,881	7,601	8,359	9,157	9,996	10,879
Umbi Lainnya	358	397	439	482	528	577	628
Subtotal Umbi-umbian	35,560	39,483	43,615	47,965	52,543	57,359	62,423
3. Pangan Hewani							
Ikan	57,900	59,337	60,808	62,313	63,853	65,429	67,040
Daging Ruminansia	2,482	2,543	2,606	2,671	2,737	2,804	2,873
Daging Unggas	5,844	5,989	6,137	6,289	6,445	6,604	6,766
Telur	12,617	12,931	13,251	13,579	13,915	14,258	14,609
Susu	5,108	5,234	5,364	5,497	5,633	5,772	5,914
Subtotal Pangan Hewani	83,863	85,945	88,076	90,256	92,486	94,768	97,103
4. Minyak dan Lemak							
Minyak Kelapa	8,370	8,507	8,644	8,783	8,921	9,059	9,198
Minyak Sawit	7,308	7,428	7,548	7,668	7,789	7,910	8,031
Minyak Lain	101	103	105	107	108	110	112
Subtotal Minyak dan Lemak	15,779	16,038	16,297	16,557	16,818	17,079	17,340
5. Buah/Biji Berminyak							
Kelapa	4,570	4,800	5,040	5,290	5,550	5,822	6,105
Kemiri	473	496	521	547	574	602	631
Kacang Mede	0	0	0	0	0	0	0
Emping	54	56	59	62	65	68	71
Subtotal Buah/Biji berminyak	5,192	5,453	5,726	6,010	6,306	6,614	6,936
6. Kacang-kacangan							
Kacang Tanah	714	797	884	976	1,072	1,174	1,281
Kacang Kedelai	10,165	11,344	12,586	13,894	15,272	16,721	18,245
Kacang Hijau	2,609	2,912	3,230	3,566	3,920	4,292	4,683

Kelompok/Jenis Pangan	Proyeksi Ketersediaan Pangan (Ton Per Tahun)						
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Kacang lain	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Kacang-kacangan	13,525	15,093	16,746	18,487	20,319	22,247	24,276
7. Gula							
Gula Pasir	16,422	16,815	17,217	17,628	18,047	18,476	18,913
Gula Merah	594	608	623	638	653	669	684
Sirup	1,051	1,076	1,101	1,128	1,155	1,182	1,210
Subtotal Gula	18,067	18,499	18,941	19,393	19,855	20,326	20,808
8. Sayur dan Buah							
Sayur	95,013	97,195	99,422	101,693	104,009	106,371	108,780
Buah	44,324	45,342	46,381	47,440	48,521	49,623	50,746
Subtotal Sayur dan Buah	139,337	142,537	145,802	149,133	152,530	155,994	159,526
9. Lain-lain							
Minuman	16,478	15,232	13,894	12,457	10,919	9,273	7,514
Bumbu	6,315	5,838	5,325	4,774	4,185	3,554	2,880
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal Lain-lain	22,814	21,089	19,236	17,248	15,117	12,839	10,404

Kelompok/jenis pangan umbi-umbian terdiri dari: ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu dan umbi lainnya. Kelompok pangan umbi-umbian ini ditargetkan meningkatkan setiap tahunnya. Upaya ini dilakukan karena konsumsi umbi-umbian masih dibawah standar sehingga perlu ditingkatkan untuk mencapai skor PPH maksimal. Target penyediaan umbi-umbian pada tahun 2015 adalah sebesar 62 423 ton pertahun. Target penyediaan pangan di wilayah Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 54.

Ketersediaan kelompok/jenis pangan hewani mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 diharapkan tersedia pangan hewani sebanyak 97 103 ton pertahun. Selanjutnya kelompok pangan minyak dan lemak ditargetkan meningkat setiap tahunnya. Total ketersediaan minyak dan lemak pada tahun 2015 sebesar 17 340 ton pertahun. Begitu pula pada kelompok buah/biji berminyak ditargetkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total ketersediaan buah/biji berminyak pada tahun 2015 sebesar 6 936 ton pertahun.

Ketersediaan kelompok kacang-kacangan ditargetkan mengalami peningkatan. Total ketersediaan kelompok pangan ini pada tahun 2009 sebesar 13 525 ton pertahun dan diproyeksikan menjadi 24 276 ton pertahun pada tahun 2015. Peningkatan tertinggi terjadi pada komoditas

kacang kedelai. Hal yang sama terjadi pada kelompok pangan gula yang ditargetkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadi 20 808 ton pertahun pada tahun 2015. Kelompok pangan sayur dan buah ditargetkan meningkat ketersediaannya setiap tahun. Total ketersediaan kelompok pangan ini sebesar 159 526 ton pertahun pada tahun 2015. Berbeda dengan kelompok pangan lain-lain yang ditargetkan mengalami penurunan setiap tahunnya. Total ketersediaan kelompok lain-lain pada tahun 2015 sebesar 10 404 ton pertahun.

5.4 Analisis Kelembagaan terkait Ketahanan Pangan

Kelembagaan pemerintah maupun masyarakat terkait pangan merupakan salah satu sumberdaya yang sangat penting dalam pembangunan pangan karena kelembagaan merupakan pengelola sumberdaya fisk maupun sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Efektifitas kelembagaan ini dicerminkan oleh arah dan program pembangunan dan pembagian tugas/kewenangan dalam berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pembangunan pangan bersifat lintas pelaku/lintas sektor dan lintas wilayah. Oleh karena itu, organisasi yang menangani pangan berbentuk Dewan maupun unit kerja struktural.

5.4.1 Kelembagaan Pemerintah

Disadari bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu sektor saja melihat kompleksitas permasalahannya yang sangat tinggi. Kerjasama lintas sektor harus dapat diwujudkan dalam pembangunan ketahanan pangan. Dalam konteks ini suatu lembaga koordinasi sangat diperlukan. Mempertimbangkan bahwa tingkat ketergantungan pangan dari luar daerah masih sangat tinggi, cakupan wilayah yang luas dengan karakteristik agroekosistem yang sangat bervariasi dan masih cukup tingginya prevalensi gizi kurang anak balita, khususnya di beberapa wilayah tertentu, maka diprediksi hingga 20 tahun ke depan ketahanan pangan masih tetap akan menjadi isu penting di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karenanya kelembagaan ketahanan

pangan, khususnya dalam bentuk kelembagaan pemerintah yang secara khusus dan fokus mengemban tugas pembangunan ketahanan pangan masih sangat diperlukan dan hendaknya mendapat prioritas yang tinggi.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Visi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau adalah “Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan payung Budaya Melayu dan memiliki masyarakat yang sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia”. Adapun misinya adalah sebagai berikut : (1) mendorong terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kepulauan Riau yang akan menumbuh kembangkan kegiatan industri dan pariwisata yang berbasis kelautan; (2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kehidupan yang makmur, sejahtera, sehat, berbudaya dan berkeadilan; (3) menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pembangunan yang unggul dan berakhlak mulia.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki beberapa strategi pembangunan yaitu : (1) mengupayakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru (*growth pole*) dan mendorong pengembangan keserasian antar wilayah agar dapat menyeimbangkan kegiatan perekonomian ke seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang merata sehingga tidak terkonsentrasi pada satu kawasan tertentu saja; (2) melaksanakan penataan dan pengembangan di bidang administrasi pemerintahan melalui upaya-upaya penyiapan dan penyusunan perundang-undangan dan sistem/*software* yang dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam memberikan layanan terbaik dan bebas pungli bagi masyarakat; (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat maju, sejahtera, sehat serta berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, budaya, olahraga, kepemudaan, keagamaan, serta perkuatan di bidang hukum dan HAM; (4) mengupayakan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang

berkesinambungan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga memungkinkan dilakukan pengembangan industri, pengembangan usaha pertanian, peternakan serta usaha pengembangan perdagangan dan perkuatan dunia usaha, serta pengembangan usaha di bidang energi dan pariwisata; dan (5) melaksanakan pembangunan infrastruktur, antara lain sarana dan prasarana pusat pemerintahan dan perkantoran, pembangunan infrastruktur perhubungan antar pulau, transportasi laut serta udara, telekomunikasi, pemukiman yang layak, serta pembangunan pulau-pulau terluar.

Berdasarkan TUPOKSI Dinas-dinas/Badan lingkup pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat ditetapkan sedikitnya terdapat tujuh Dinas/Badan yang terkait erat dengan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: 1) Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, 2) Dinas Kelautan dan Perikanan, 3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 5) Dinas Kesehatan, dan 6) Dinas Sosial. Dinas/ Badan tersebut mengemban tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan kebijakan yang telah ditentukan melalui program kerja sebagaimana tertuang dalam Renstra masing-masing dinas. Kemudian dari Renstra tersebut dijabarkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan program prioritas yang rutin dilaksanakan oleh dinas terkait.

Tujuh dinas lingkup pemerintah provinsi Kepulauan Riau yang terkait erat secara langsung dan tidak langsung dalam pembangunan ketahanan pangan tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tupoksi dan program serta kegiatannya masing-masing, misal Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan bertanggungjawab terhadap kebijakan terkait pangan nabati dan hewani asal ternak, Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab terhadap kebijakan terkait pangan hewani asal ikan. Begitu pula dengan dinas lainnya yang tidak kalah penting perannya dengan dinas yang telah disebutkan dan sangat berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Lebih jelas mengenai tanggung jawab

masing-masing dinas terkait dengan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 55.

Tabel 55 Matriks dinas dan tanggung jawab pokok terkait pembangunan ketahanan pangan

Dinas	Tanggung jawab
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN	Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya.
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
DINAS KESEHATAN	Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
DINAS SOSIAL	Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya

Sumber: Perda No 5 tahun 2007

Analisis kelembagaan dilakukan dengan cara yang sama dengan analisis kebijakan, namun untuk analisis kelembagaan dilakukan terhadap Fungsi dari masing-masing dinas terkait Ketahanan pangan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hampir semua kode telah diaplikasikan

dalam fungsi masing-masing dinas. Sebagian besar fungsi dinas termasuk dalam kode subsistem produksi (kode 1), sehingga diketahui fokus atau perhatian utama Provinsi Kepulauan Riau adalah dalam Penyediaan Pangan atau produksi, sementara untuk subsistem konsumsi tidak atau belum terdapat dalam fungsi kelembagaan pangan manapun (Tabel 56).

Tabel 56 Dinas terkait ketahanan pangan berdasarkan subsistem ketahanan pangan

Sub sistem Ketahanan Pangan	Dinas Terkait
Produksi/Ketersediaan	Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Distribusi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Sosial
Konsumsi	-
Status Gizi	Dinas Kesehatan Dinas Sosial

5.4.2 Kelembagaan Non Pemerintah (Swasta, Masyarakat, Organisasi Sosial Masyarakat)

Pemantapan ketahanan pangan sebagai bagian dalam pembangunan daerah harus ditinjau dengan pendekatan komprehensif disebabkan ketahanan pangan merupakan masalah multi dimensi. Pendekatan strategi yang perlu dilakukan dalam konteks meningkatkan ketahanan pangan dalam upaya memerangi kerawanan pangan, kemiskinan dan kebodohan di Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya merupakan sinergi dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan Pembangunan Berbasis Ekonomi (*Economic Based Development*) dan pendekatan Pengembangan Masyarakat (*Community Based Development*) secara Partisipatif (Tasman 2005).

Peran dan Fungsi Kelembagaan Lokal dalam Penyediaan Pangan

Hasil identifikasi terhadap sejumlah bentuk kelembagaan pangan lokal di Provinsi Kepulauan Riau memberi petunjuk bahwa ragam bentuk kelembagaan tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam

rangka penyediaan pangan. Kelembagaan produksi berfungsi sebagai kelembagaan yang menjamin agar rumahtangga dapat menghasilkan pangan. Kelembagaan produksi seperti sistem bagi hasil, sistem gadai atau sistem sewa lahan dan lain-lainnya berkait erat dengan persoalan penguasaan aset produksi (lahan atau lainnya) memainkan perannya yang utama pada rangkaian kegiatan memproduksi hasil pertanian. Kedua pihak bersepakat mematuhi aturan sosial yang berlaku pada suatu bentuk kelembagaan produksibiasanya untuk tujuan agar kedua pihak tersebut terjamin bisa mengakses sumber pangan. Dengan demikian ragam bentuk kelembagaan produksi seperti yang sudah disebutkan di atas memainkan peran penting sebagai kelembagaan penyedia pangan di dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga pada masyarakat Kepulauan Riau.

Pemasaran atau distribusi hasil produksi pertanian merupakan tahapan berikutnya dari kegiatan usaha tani, sehingga tahapan ini juga memainkan peran yang cukup penting bagi masyarakat agar hasil pertanian yang sudah diproduksi dapat didistribusikan untuk keperluan sendiri dan atau dijual. Pada beberapa kasus masyarakat menjual hasil pertanian mereka untuk tujuan dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga meeka yang lain, misalnya membeli sumber pangan lain selain beras, atau membeli kebutuhan rumahtangga lainnya (non pangan).

Kelembagaan permodalan merupakan bentuk kelembagaan lokal yang sangat umum berlaku pada sebagian besar masyarakat di Kepulauan Riau. Pada masyarakat desa maupun perkotaan sangat umum dikenal hubungan pinjam meminjam uang dan atau barang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersepakat. Kelmbagaan permodalan yang umum berlaku antara lain hubungan pinjam meminjam antara petani dengan para toke atau tengkulak atau pemilik kilang padi. Pada saat-saat tertentu dimana terjadi gagal panen atau musim paceklik karet atau kondisi hasil panen menurun biasanya para petani mengajukan pinjaman uang untuk modal usaha atau untuk kebutuhan konsumtif rumahtangga mereka kepada para toke, dengan kesepakatan setelah musim panen dibayar. Dengan cara ini para petani

biasanya merasa aman karena modal usaha yang mereka butuhkan bisa disediakan oleh para toke.

5.5 Analisis Lingkungan Strategis Ketahanan Pangan

Identifikasi kondisi lingkungan strategis guna mendukung tercapainya ketahanan pangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Langkah pertama yang dilakukan dalam analisis ini adalah dengan menemukenali faktor internal dan eksternal yang ada secara umum di ketiga wilayah penelitian. Faktor internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri atas peluang dan ancaman (Rangkuti 2008). Identifikasi faktor internal dan eksternal diperoleh melalui identifikasi data sekunder Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil sebagai berikut:

5.5.1 Faktor Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strenghts*). Lima kekuatan utama yang menjadi menyokong upaya ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- 1) Tersedianya aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong upaya pencapaian ketahanan pangan. Kebijakan mengenai ketahanan pangan di Kepulauan Riau telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
- 2) Implementasi kebijakan berupa program dan rencana aksi
Terkait dengan tercakupnya kebijakan mengenai ketahanan pangan di RPJM provinsi, maka implementasi kebijakan berupa program dan rencana aksi pun telah dituangkan kedalam bentuk renstra (rencana strategis) masing-masing instansi yang terkait dengan ketahanan pangan. Dokumen kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tercapainya ketahanan pangan.
- 3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi
Kekuatan perekonomian Kepulauan Riau adalah pada bidang Industri Pengolahan yang pada tahun 2007 pertumbuhannya mencapai 8.5%.
- 4) Konsumsi penduduk yang telah mencapai standar ideal

Berdasarkan hasil kajian situasi konsumsi Kepulauan Riau terhadap data SUSENAS diketahui persentase kecukupan energi (%AKE) penduduknya telah mampu mencapai 2 132 kkal dari standar 2000 kkal.

- 5) Produksi perikanan tinggi. Sebagian Produksi perikanan di provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh perikanan laut. Produksi ikan di Kepulauan Riau pada tahun 2008 mencapai 5 906.66 ton.

Kelemahan (*Weakness*). Lima kelemahan utama yang menjadi menghambat upaya ketahanan pangan di Kepulauan Riau adalah:

- 1) Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi mencapai 3.1% per tahun pada tahun 2007.
- 2) Tidak stabilnya harga pangan. Hal ini terlihat dari laju atau perubahan harga terutama pada komoditas pangan strategis di Kota Batam dan Tanjungpinang yang mencapai lebih dari 25% pada tahun 2008 dari tahun 2007.
- 3) Kondisi tanah yang kurang subur. Tipe tanah yang dimiliki oleh sebagian besar daratan di Kepulauan Riau adalah tanah merah yang hanya bisa ditanami jenis tanaman tertentu saja.
- 4) Ketersediaan air yang terbatas. Topografi tanah di sebagian besar daratan di Kepulauan Riau tidak banyak menyediakan air darat, menyebabkan perlunya pengairan atau irigasi teknis jika akan digunakan sebagai lahan pertanian.
- 5) Masih adanya kejadian status gizi kurang dan buruk balita di beberapa wilayah.
- 6) Belum adanya kelembagaan cadangan pangan di masyarakat. Kelembagaan cadangan pangan diperlukan keberadaannya di masyarakat untuk mengatasi kejadian gawat seperti terjadinya bencana alam.
- 7) Belum adanya kelembagaan yang mengkoordinasi seluruh subsistem Ketahanan Pangan. Berdasarkan analisis terhadap tupoksi kelembagaan yang ada menggunakan *content analysis*, diketahui bahwa kelembagaan yang ada di Kepulauan Riau belum melaksanakan fungsi terkait subsistem ketahanan pangan secara menyeluruh atau

dengan kata lain kelembagaan yang ada hanya terkonsentrasi pada salah satu atau beberapa subsistem saja.

- 8) Kurangnya koordinasi antar instansi. Hal ini berkaitan dengan belum adanya kelembagaan yang mengkoordinasi seluruh subsistem ketahanan pangan, sebab selama ini fungsi masing-masing subsistem dikoordinasi oleh instansi yang berbeda.

5.5.2 Faktor Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunity*). Lima peluang utama yang menjadi pendorong tercapainya percepatan diversifikasi konsumsi pangan di Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- 1) Masih terdapat lahan potensial yang belum dikembangkan. Berdasarkan Kepulauan Riau dalam angka tahun 2008 diketahui terdapat sekitar 178 482 Ha lahan bukan sawah yang sementara tidak diusahakan di Kepulauan Riau, dan luas ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya seluas 71 590 Ha, sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai potensi pengembangan lahan tersebut.
- 2) Adanya program yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian. Berdasarkan hasil analisis program pada kebijakan beberapa dinas terkait ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau diketahui terdapat sebanyak 35 program pada subsistem produksi pangan.
- 3) Adanya peluang tawaran kredit untuk modal. Hal ini berkaitan dengan strategi pemerintah untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan modal atau disebut *triple track strategy*, yang diantaranya adalah *pro-job* dan *pro-growth*.
- 4) Adanya peluang pasar disebabkan tingginya kebutuhan pasokan dari luar wilayah di provinsi Kepulauan Riau, selain itu juga disebabkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau yang tergolong tinggi memicu timbulnya kegiatan perdagangan antar wilayah.
- 5) Adanya peluang permintaan yang lebih tinggi daripada ketersediaan. Jelas terlihat bahwa kemampuan penyediaan pangan Provinsi Kepulauan Riau termasuk rendah, sementara kebutuhan penduduk

akan pangan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tinggi.

- 6) Komitmen Pemda tentang Ketahanan Pangan. Hal ini terlihat dari penerapan atau implementasi beberapa kebijakan mengenai ketahanan pangan, meskipun belum mampu mencakup semua aspek dalam subsistem ketahanan pangan.

Ancaman (*Threats*). Lima ancaman utama yang dapat menjadi penghalang tercapainya percepatan diversifikasi konsumsi pangan di provinsi Kepulauan Riau adalah:

- 1) Rendahnya Produksi pangan. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya ketersediaan pangan hasil produksi, jika dilihat berdasarkan ketersediaan energinya yang hanya mampu menyediakan 103.41 kkal dari produksi komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan.
- 2) Ketergantungan impor. Oleh karena produksi yang sangat terbatas dan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, maka Kepulauan Riau sangat tergantung pada perdagangan antar wilayah dalam pemenuhan kebutuhannya.
- 3) Kurangnya informasi mengenai data ketersediaan. Data ketersediaan pangan sangat diperlukan dalam perencanaan pangan, namun kenyataannya Kepulauan Riau memiliki keterbatasan data.
- 4) Konsumsi pangan belum 3B. Hal ini terlihat dari Skor PPH yang belum mampu mencapai 100, meskipun telah melebihi skor 80.
- 5) Ketergantungan terhadap salah satu jenis pangan pokok yaitu beras. Hal terlihat dari pola konsumsi pangan penduduk Kepulauan Riau yang masih didominasi oleh Beras dan Terigu pada hampir semua golongan pengeluaran dan daerah.

5.5.3 Hasil evaluasi faktor internal

Evaluasi faktor internal dilakukan dengan identifikasi bobot, *rating* dan nilai dari masing – masing faktor internal. Bobot diberikan untuk menentukan kepentingan relatif dari faktor internal terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Bobot diberikan menggunakan skala 1.0 (paling penting) sampai 0.0 (tidak penting) Selanjutnya seluruh faktor

internal tersebut diberikan peringkat (*rating*) dengan menggunakan skala 1 sangat lemah; 2 lemah; 3 kuat; dan 4 sangat kuat. Pemberian peringkat dilakukan berbanding terbalik antara kekuatan dan kelemahan (Rangkuti 2008).

Peringkat (*rating*) diberikan berdasarkan situasi dan kondisi yang terkait erat dengan upaya pencapaian ketahanan pangan. Setiap faktor internal mewakili kelemahan atau kekuatan yang berkaitan dengan tercapainya pencapaian ketahanan pangan. Total nilai yang diperoleh berdasarkan penjumlahan seluruh nilai perkalian antara bobot dan *rating* faktor internal akan berkisar antara 1.0 (nilai terendah) sampai 4.0 (nilai tertinggi). Nilai ini selanjutnya akan menunjukkan kelemahan atau kekuatan internal dari upaya mencapai ketahanan pangan secara keseluruhan.

Tabel 57 Matriks evaluasi faktor internal pencapaian ketahanan pangan

Faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai
Kekuatan (<i>Strength</i>)			
a. Tersedianya aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong upaya pencapaian ketahanan pangan	0.10	4	0.40
b. Implementasi kebijakan berupa program dan rencana aksi	0.10	4	0.40
c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi	0.05	3	0.15
d. Konsumsi penduduk yang telah mencapai standar ideal	0.05	3	0.15
e. Produksi perikanan tinggi	0.10	4	0.40
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)			
a. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi	0.05	1	0.05
b. Tidak stabilnya harga pangan	0.10	1	0.10
c. Kondisi tanah yang kurang subur	0.05	2	0.10
d. Ketersediaan air darat yang terbatas	0.05	2	0.10

Faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai
e. Masih adanya kejadian gizi kurang dan buruk pada balita di beberapa wilayah	0.05	2	0.10
f. Belum adanya kelembagaan cadangan pangan di masyarakat	0.10	1	0.10
g. Belum adanya kelembagaan yang mengkoordinasi seluruh subsistem Ketahanan Pangan	0.10	2	0.20
h. Kurangnya koordinasi antar instansi			
Jumlah	1.00		2.35

Hasil evaluasi faktor internal terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau seperti disajikan pada Tabel 57 menunjukkan total nilai 2.35. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan internal keseluruhan dalam upaya pencapaian ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah nilai rata-rata (2.50).

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap semua faktor internal kekuatan, maka terdapat tiga faktor yang termasuk dalam *rating* 4 dan sisanya *rating* 3. Begitu pula dengan faktor internal kelemahan, terdapat empat faktor yang termasuk *rating* 1, sementara empat lainnya termasuk *rating* 2. Faktor internal yang memiliki kepentingan relatif tertinggi diberi nilai bobot sebesar 0.10. sementara faktor internal lainnya yang memiliki kepentingan relatif rendah diberikan nilai bobot sebesar 0.05. terdapat tujuh faktor internal yang memiliki kepentingan relatif tinggi, sementara enam faktor lainnya termasuk yang memiliki kepentingan relatif rendah.

Beberapa faktor dengan kepentingan relatif tinggi tersebut antara lain: tersedianya aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong upaya pencapaian ketahanan pangan, Implementasi kebijakan berupa program dan rencana aksi, kemampuan produksi perikanan yang tinggi, tidak stabilnya harga pangan, kurangnya koordinasi antar instansi, belum adanya kelembagaan yang mengkoordinasi seluruh subsistem Ketahanan Pangan, serta belum adanya kelembagaan

cadangan pangan di masyarakat. Sementara faktor lain dengan kepentingan relatif rendah antara lain: peningkatan pertumbuhan ekonomi, konsumsi penduduk yang telah mencapai standar ideal, laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, kondisi tanah yang kurang subur, ketersediaan air darat yang terbatas, serta masih adanya kejadian gizi kurang dan buruk pada balita di beberapa wilayah

Tersedianya aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong upaya pencapaian ketahanan pangan merupakan faktor utama. Hal ini disebabkan dengan adanya kebijakan maka upaya pencapaian ketahanan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dengan cepat terlaksana, namun tentu saja dengan tidak terlepas dari dukungan sarana, prasarana, dan kelembagaan.

5.5.4 Hasil evaluasi faktor eksternal

Evaluasi faktor eksternal dilakukan untuk memperoleh bobot, *rating* dan nilai dari masing-masing faktor eksternal. Bobot diberikan untuk menentukan kepentingan relatif dari faktor eksternal terhadap program ketahanan pangan. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh lebih besar akan diberikan skor 2 sedangkan yang memiliki pengaruh sama diberikan skor 1 serta yang berpengaruh lebih rendah diberikan skor 0 (Rangkuti 2008) dan jumlah bobot per individu akan bernilai sama dengan 1.00. *Rating* diberikan berdasarkan respon terhadap peluang maupun ancaman dengan menggunakan skala 1 (terendah) hingga 4 (tertinggi). Pemberian peringkat dilakukan berbanding terbalik antara peluang dan ancaman (Rangkuti 2008). Nilai yang dibobot merupakan perkalian dari bobot dan *rating* dari setiap faktor. Jumlah nilai yang dibobot berkisar dari 1.0 (skor terendah) sampai dengan 4.0 (skor tertinggi), nilai yang diperoleh menunjukkan baik atau buruknya respon *stakeholder* secara keseluruhan.

Hasil evaluasi faktor eksternal percepatan diversifikasi konsumsi pangan disajikan pada Tabel 58. Berdasarkan hasil evaluasi faktor eksternal melalui analisis matriks EFE diperoleh total nilai yang dibobot sebesar 3.10 menunjukkan bahwa usaha *stakeholder* untuk menjalankan

strategi pencapaian Ketahanan pangan yang memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman berada di atas rata-rata (2.50).

Tabel 58 Matriks evaluasi faktor eksternal pencapaian Ketahanan Pangan

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai
Peluang (<i>Opportunities</i>)			
a. Masih terdapat lahan potensial yang belum dikembangkan	0.15	4	0.60
b. Adanya program yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian	0.15	4	0.60
c. Adanya peluang tawaran kredit untuk modal	0.10	3	0.30
d. Adanya peluang pasar	0.10	3	0.30
e. Adanya peluang permintaan yang lebih tinggi daripada ketersediaan	0.15	4	0.60
f. Komitmen Pemda tentang Ketahanan Pangan			
Ancaman (<i>Threats</i>)			
a. Rendahnya Produksi pangan	0.05	1	0.05
b. Ketergantungan impor	0.05	1	0.05
c. Kurangnya informasi mengenai data ketersediaan	0.05	2	0.10
d. Konsumsi pangan belum 3B	0.05	2	0.10
e. Ketergantungan terhadap salah satu jenis pangan pokok yaitu beras	0.05	2	0.10
Jumlah	1.00		3.10

Faktor eksternal yang memiliki kepentingan relatif tertinggi adalah adanya program yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian serta masih terdapat lahan potensial yang belum dikembangkan dan komitmen Pemda mengenai Ketahanan Pangan dengan bobot 0.15. Sementara faktor eksternal yang memiliki kepentingan relatif terendah adalah semua faktor eksternal ancaman dengan nilai 0.05.

5.6 Alternatif Strategi Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Berdasarkan hasil pencocokan dari matriks SWOT percepatan diversifikasi konsumsi pangan diperoleh beberapa alternatif strategi yang dilakukan dalam pengembangan pangan lokal. Alternatif strategi yang diperoleh berdasarkan hasil pencocokan pada matriks SWOT yaitu Peningkatan produksi dan Peningkatan teknologi pengolahan pasca panen perikanan (Strategi S-O), Pengoptimalan Implementasi kebijakan serta Penyebarluasan informasi potensi, mutu gizi dan aneka produk olahan pangan lokal (Strategi S-T), Pengembangan kelembagaan koorditaif ketahanan pangan (Strategi W-O), Peningkatan Komitmen, Peran dan Kemitraan Antar Stakeholder (Strategi W-T) (Tabel 59).

Alternatif strategi S-O yang dipilih berdasarkan hasil pencocokan adalah Peningkatan produksi dan Peningkatan teknologi pengolahan pasca panen perikanan Strategi peningkatan produksi ini memanfaatkan kekuatan utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu terdapatnya Implementasi kebijakan berupa program dan rencana aksi, serta tersedianya aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong upaya ketahanan pangan. Semua faktor kekuatan yang ada digunakan untuk memanfaatkan peluang utama yaitu masih terdapat lahan potensial untuk dikembangkan, adanya program yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian, adanya peluang tawaran kredit untuk modal, dan adanya peluang pasar. Sementara pada strategi Peningkatan teknologi pengolahan pasca panen perikanan dengan memanfaatkan kekuatan tingginya produksi hasil perikanan, tersedianya aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong upaya ketahanan pangan, adanya mplementasi kebijakan berupa program dan rencana aksi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar.

Alternatif strategi S-T yang dipilih berdasarkan hasil pencocokan adalah Pengoptimalan Implementasi kebijakan serta Penyebarluasan informasi potensi, mutu gizi dan aneka produk olahan pangan lokal. Strategi ini menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi

dampak ancaman. Kekuatan yang dioptimalkan pada strategi Pengoptimalan Implementasi kebijakan adalah ada adalah tersedianya aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong upaya ketahanan pangan, serta terdapatnya implementasi kebijakan berupa program dan rencana aksi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Ketiga kekuatan tersebut semakin dioptimalkan untuk mengurangi dampak ancaman berupa rendahnya produksi pangan, ketergantungan impor yang cukup tinggi, serta kurangnya informasi mengenai data ketersediaan.

Alternatif strategi W-O yang dipilih berdasarkan hasil pencocokan adalah Pengembangan kelembagaan koordinatif ketahanan pangan dikarenakan strategi ini ditujukan untuk mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang eksternal. Kelemahan yang ada berupa ketidakstabilan harga pangan, belum adanya kelembagaan yang mengkoordinasi seluruh subsistem ketahanan pangan, serta kurangnya koordinasi antar instansi dan belum adanya kelembagaan cadangan pangan di masyarakat. Kelemahan tersebut dapat dikurangi dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada yaitu adanya program yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian, dan komitmen pemerintah daerah tentang ketahanan pangan.

Alternatif strategi W-T yang dipilih berdasarkan hasil pencocokan adalah peningkatan komitmen, peran serta dan kemitraan antar stakeholder. Strategi ini mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman. Kelemahan yang harus dikurangi adalah ketidakstabilan harga pangan, belum adanya kelembagaan yang mengkoordinasi seluruh subsistem ketahanan pangan, serta kurangnya koordinasi antar instansi dan belum adanya kelembagaan cadangan pangan di masyarakat. Adapun faktor ancaman yang harus diantisipasi adalah rendahnya produksi pangan, ketergantungan impor yang cukup tinggi, serta kurangnya informasi mengenai data ketersediaan

Tabel 59 Matriks SWOT pencapaian Ketahanan Pangan

<p>IFAS</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mendorong upaya ketahanan pangan 2. Implementasi kebijakan berupa program dan rencana aksi 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 4. Konsumsi penduduk yang telah mencapai standar ideal 5. Produksi perikanan tinggi. 	<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi 2. Tidak stabilnya harga pangan 3. Kondisi tanah yang kurang subur 4. Ketersediaan air darat yang terbatas 5. Masih adanya kejadian gizi kurang dan buruk pada balita di beberapa wilayah 6. Belum adanya kelembagaan cadangan pangan di masyarakat 7. Belum adanya kelembagaan yang mengkoordinasi seluruh subsistem Ketahanan Pangan 8. Kurangnya koordinasi antar instansi
<p>EFAS</p> <p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat lahan potensial untuk dikembangkan 2. Adanya program yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian 3. Adanya peluang tawaran kredit untuk modal 4. Adanya peluang pasar 5. Adanya peluang permintaan yang lebih tinggi daripada ketersediaan 6. Komitmen Pemda tentang Ketahanan Pangan 	<p>Peningkatan produksi S1, S2, O1, O2, O3, O4</p> <p>Peningkatan teknologi pengolahan pasca panen perikanan S1, S2, S3, S5, O3, O4, O5</p>	<p>Pengembangan kelembagaan koorditaif ketahanan pangan W2, W6, W7, W8, O2, O6</p>
<p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Produksi pangan 2. Ketergantungan impor 3. Kurangnya informasi mengenai data ketersediaan 4. Konsumsi pangan belum 3B 5. Ketergantungan terhadap salah satu jenis pangan pokok yaitu beras 	<p>Pengoptimalan Implementasi kebijakan S1, S2, S3, T1, T2, T3</p> <p>Penyebarluasan informasi potensi, mutu gizi dan aneka produk olahan pangan lokal S1, S3, S4, S5, T2, T3, T4, T5</p>	<p>Peningkatan Komitmen, Peran dan Kemitraan Antar Stakeholder W6, W7, W8, T1, T2, T3</p>

BAB VI

MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

6.1 Permasalahan Produksi Pangan

Tanaman Pangan. Selama beberapa tahun terakhir upaya berbagai sektor untuk meningkatkan produksi pangan di Provinsi Kepulauan Riau cukup berhasil, khususnya dalam meningkatkan produksi padi/beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan sayuran meski dengan laju pertumbuhan yang sangat bervariasi antara satu komoditas dengan yang lainnya. Pada periode 2007-2008 perkembangan produksi komoditas-komoditas tersebut cenderung meningkat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang positif. Produksi sayuran bahkan cenderung tumbuh dengan sangat cepat. Pertumbuhan produksi sayuran yang pesat merupakan hasil dari pengembangan kawasan produksi sayuran yang dilakukan di Provinsi ini. Sayangnya untuk komoditas buah-buahan pertumbuhannya cenderung negatif. Bahkan produksinya menurun dengan laju yang sangat tinggi (-22.13%) pada periode tersebut. Lahan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami pengembangan, kenyataan menunjukkan selama periode 2007-2008 saja hampir seluruh areal panen tanaman pangan mengalami peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan luas panen komoditas tanaman pangan di Provinsi Kepulauan Riau meningkat tajam atau sekitar 20%. Meskipun produksi tanaman pangan mengalami peningkatan, namun nilainya masih sangat kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk.

Perikanan. Ikan merupakan komoditas pangan yang besar peranannya dalam pola konsumsi pangan masyarakat Kepulauan Riau, dari sisi produksi perkembangannya selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang sangat cepat (81.21%). Bahkan peningkatan laju produksi perikanan payau mencapai 297.13%,

namun sebaliknya pada perikanan tawar yang mengalami penurunan sebesar 6.35%. Sebagian besar produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau berasal dari perikanan laut (sebagian besar perikanan tangkap). Oleh karena itu ke depan pengembangan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau harus lebih banyak bertumpu pada perikanan budidaya, baik di laut, maupun tambak dan perairan darat (kolam, danau, karamba)

Peternakan. Selama periode 2007-2008 produksi daging cenderung mengalami penurunan dengan laju yang cukup tinggi, namun di sisi lain produksi telur cenderung meningkat. Penurunan produksi daging terjadi seiring dengan penurunan populasi ternak (populasi sapi dan babi masing-masing turun 10.96% dan 27.49%, sementara kambing meningkat sebesar 9.39%) serta ayam pedaging (643.80%) yang tumbuh dengan sangat pesat. Di sisi lain pertumbuhan populasi unggas berakibat pada meningkatnya produksi telur.

Banyak faktor yang menjadi kendala rendahnya produktivitas dan produksi pangan di Provinsi Kepulauan Riau untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Diantara yang terpenting adalah: 1) masih tingginya konversi lahan produktif ke lahan non pertanian tanaman pangan (perumahan, perkebunan, fasilitas sosial); 2) kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan sehingga hasilnya tidak mampu mensejahterakan petani dan berakibat pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi; 3) terbatasnya teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani; 4) kurangnya bimbingan kepada petani karena tidak difungsikannya institusi penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu, 5) jenis tanah yang didominasi oleh tanah merah; 6) sistem pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan; dan 7) rendahnya akses petani terhadap modal usaha.

6.2 Permasalahan Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2007-2008 meningkat dengan laju sekitar 20%. Kecuali buah-buahan, laju ketersediaan pangan tumbuh positif. Pertumbuhan ketersediaan

beberapa komoditas, khususnya jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan sayuran bahkan sangat tinggi (> 20%). Meski beberapa jenis komoditas pangan menunjukkan perkembangan produksi yang menggembirakan, namun secara umum peranan pengadaan (pasokan) pangan dari luar Provinsi Kepulauan Riau untuk berbagai jenis pangan masih diperlukan dan masih sangat tinggi, baik secara kuantitas maupun laju pertumbuhannya.

Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat (3.1% per tahun), tingkat produksi yang relatif rendah beberapa komoditas pangan lokal berdampak pada tinggi dan meningkatnya ketergantungan Kepulauan Riau terhadap pasokan pangan. Peran pasokan pangan dari luar daerah terhadap penyediaan pangan di Provinsi ini, khususnya pangan nabati, secara rata-rata mencapai lebih dari 50 persen. Ketergantungan Riau yang cukup tinggi terhadap pasokan pangan, berimplikasi pada pentingnya kelancaran arus perdagangan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara kuantitas, beras masih menempati posisi pertama sebagai komoditas pangan terbesar yang dipasok dari luar Provinsi Riau. Kondisi tersebut akibat kemampuan produksi beras hanya mendukung maksimal 0.09% kebutuhan konsumsi penduduk. Kondisi di atas menunjukkan rendahnya kemandirian pangan Provinsi Kepulauan Riau karena sebagian besar kebutuhan pangan masih dipasok dari luar daerah/luar negeri. Secara kuantitas ketergantungan impor beras dari wilayah lain sangat tinggi, mencapai hingga lebih dari 65% dari total kebutuhan untuk konsumsi pangan. Upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan untuk komoditas beras cukup sulit untuk dicapai di daerah ini, sebab lahan persawahan sangat terbatas di daerah ini. Namun optimalisasi potensi lahan non-persawahan yang sementara belum diusahakan di beberapa daerah seperti Kabupaten Karimun dan Lingga serta peningkatan pemanfaatan lahan kering untuk budi daya padi ladang akan dapat meningkatkan kapasitas produksi tanaman padi dan produksi beras lokal sehingga diharapkan mampu meningkatkan peran beras lokal dalam pengadaan pangan.

Ketidakmerataan produksi pangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau erat kaitannya dengan perbedaan potensi dan kondisi sumberdaya antar daerah kabupaten. Diperlukan suatu fasilitasi pemerintah dalam distribusi pangan di Provinsi Kepulauan Riau agar ketersediaan pangan antar wilayah dan antar waktu tetap terjamin pada tingkat harga dan mutu yang tepat. Untuk daerah yang mengalami defisit pangan, pengaturan distribusi pangan antar wilayah kabupaten terutama ke kabupaten non-sentra produksi pangan, membutuhkan fasilitasi, misalnya dalam bentuk regulasi pemerintah agar saluran distribusi atau tataniaga pangan yang pada saat ini sebagian besar dilaksanakan oleh pihak swasta dapat berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang sesungguhnya dan meminimalkan cara-cara perdagangan yang tidak fair. Monopoli pasokan komoditas pangan dan penumpukan stok pangan oleh perilaku para spekulan yang dapat merugikan pihak konsumen dan produsen pangan lokal harus dapat dicegah dan dihindari.

Hasil proyeksi konsumsi di Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2015 menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara kemampuan produksi dan besarnya kebutuhan pangan untuk konsumsi. Peningkatan permintaan atau konsumsi yang cukup tinggi di satu sisi, diperkirakan tidak mampu didukung oleh perkembangan produksi yang cukup, khususnya bila tidak dilakukan inovasi kebijakan dan program yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Implikasinya adalah Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan akan mengalami defisit pada hampir semua komoditas pangan yang semakin besar selama periode 2009-2015.

Kecenderungan peningkatan defisit pangan yang akan dihadapi Provinsi Kepulauan Riau selama 10 tahun ke depan tidak hanya berimplikasi pada semakin tingginya tingkat ketergantungan terhadap pasokan pangan tetapi lebih jauh akan menimbulkan pergeseran permasalahan pangan dari masalah peningkatan produksi ke meningkatnya bobot permasalahan kelancaran arus perdagangan dan distribusi pangan dari luar Provinsi Riau. Sebagai akibatnya, aspek distribusi pangan memiliki peran yang semakin strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Riau.

6.3 Permasalahan Konsumsi Pangan, Status Gizi dan Status Kerawanan Pangan

Konsumsi Energi. Konsumsi pangan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 – 2008 berfluktuasi. Secara rata-rata pemenuhan kebutuhan energi telah memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG).

Keanekaragaman Konsumsi. Disamping secara kuantitas konsumsi pangan rata-rata masyarakat Riau masih telah memadai, namun secara kualitas masih belum memenuhi syarat gizi seimbang. Skor keragaman konsumsi pangan atau skor PPH (sebagai proksi kualitas konsumsi pangan) masyarakat Riau relatif rendah yaitu pada Tahun 2005 Skor PPH Provinsi Kepulauan Riau adalah 83. Tingkat ketergantungan konsumsi masyarakat Kepulauan Riau terhadap beras masih tinggi.

Status Gizi Balita. Prevalensi gizi kurang di berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Riau masih berada dibawah rata-rata prevalensi nasional. Diantara kabupaten/kota, terdapat variasi masalah gizi kurang, yaitu terendah (8.1%) di Kota Tanjungpinang, dan tertinggi (13.3%) di Kabupaten Natuna. Meski kemiskinan dianggap sebagai faktor penting penyebab gizi kurang, tidak selalu wilayah dengan prevalensi kemiskinan tinggi memiliki prevalensi gizi kurang yang tinggi pula. Diduga faktor lain seperti pengetahuan gizi dan kesehatan, pola asuh anak, dan faktor higiene dan sanitasi lingkungan berperan cukup penting dalam penentuan status gizi anak balita di Provinsi Kepulauan Riau. Meski secara umum dapat disebutkan bahwa masalah gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau tidak seserius di beberapa Provinsi lain di Indonesia, namun perlu dicatat bahwa di Provinsi Kepulauan Riau 1 anak dari setiap 10 anak mengalami gizi kurang. Mengingat dampak buruk masalah gizi kurang terhadap kecerdasan anak dan produktivitas kerjanya pada saat dewasa, maka berbagai upaya serius harus dilakukan untuk mengatasi masalah gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau ini.

Status Kerawanan Pangan Daerah. World Food Program (WFP) telah mengembangkan suatu indikator kerawanan pangan dan gizi yang

merupakan indeks komposit dari 17 parameter yang dianggap mampu mengindikasikan adanya kerawanan pangan dan gizi yang kemudian hasilnya dapat disajikan dalam bentuk peta ketahanan dan kerentanan pangan (*food security and vulnerability atlas*). Berdasarkan berbagai parameter tersebut analisis dapat dilakukan untuk melihat kerawanan pangan dari empat dimensi, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan sumber pendapatan, penyerapan dan pemanfaatan pangan serta kerentanan pangan. Kabupaten Lingga dan Natuna merupakan wilayah yang berpotensi rawan dan cukup rawan dengan nilai indeks komposit 0.71 dan 0.63. Potensi kerawanan pangan ditentukan oleh aspek pemanfaatan, dimana nilai indeks indikator perempuan buta huruf, akses terhadap air bersih, dan jarak terhadap fasilitas kesehatan di kabupaten Lingga 1.00. Namun tidak hanya itu kabupaten Lingga juga menghadapi potensi kerawanan pangan dari aspek akses terhadap pangan dan penghidupan yaitu pada indikator penduduk hidup di bawah garis kemiskinan serta fasilitas atau sarana listrik yang terbatas dengan nilai indeks mencapai 1.00. Sementara itu tidak berbeda dengan kabupaten Lingga, potensi kerawanan pangan di Kabupaten Natuna juga ditentukan oleh aspek penyerapan dan pemanfaatan pangan diakibatkan oleh tingginya persentase balita tidak terjangkau pelayanan kesehatan serta usia harapan hidup yang rendah dengan nilai indeks mencapai 1.00. selain itu juga pada aspek akses terhadap pangan dan kehidupan yaitu pada fasilitas jalan raya yang dapat dilalui kendaraan roda empat yang masih terbatas.

Meski secara umum tingkat kerawanan pangan tergolong rendah, namun dengan tingkat kemandirian pangan yang rendah (tingkat ketergantungan pada impor yang tinggi), serta keragaman potensi wilayah yang tinggi dalam penyediaan pangan mengharuskan Provinsi Kepulauan Riau memiliki Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang kuat karena masalah kurang pangan dan gizi dapat terjadi sewaktu-waktu apabila terjadi gangguan sistem distribusi panen atau kegagalan panen di daerah lain maupun di Provinsi Kepulauan Riau sendiri.

6.4 Permasalahan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

Belum terbentuknya kelembagaan pangan yang kokoh di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu di tingkat masyarakat kelembagaan ketahanan pangan yang dijumpai umumnya kelembagaan yang bersifat “pemecahan masalah” (*coping mechanism*) atau bersifat rescue untuk mengatasi masalah kekurangan pangan atau penurunan daya beli ketika terjadi kekurangan pangan/gagal panen dan penurunan daya beli. Kelembagaan produksi seperti sistem bagi hasil, sistem gadai atau sistem sewa lahan dan lain-lainnya berkait erat dengan persoalan penguasaan aset produksi (lahan atau lainnya) memainkan perannya yang utama pada rangkaian kegiatan memproduksi hasil pertanian. Kelembagaan permodalan merupakan bentuk kelembagaan lokal yang sangat umum berlaku pada sebagian besar masyarakat di Riau, khususnya dalam bentuk pinjam-meminjam uang dan atau barang. Kelembagaan permodalan yang umum berlaku antara lain hubungan pinjam meminjam antara petani dengan para toke atau tengkulak atau pemilik kilang padi.

Pada saat-saat tertentu dimana terjadi gagal panen atau musim paceklik karet atau kondisi hasil panen menurun biasanya para petani mengajukan pinjaman uang untuk modal usaha atau untuk kebutuhan konsumtif rumahtangga mereka kepada para toke, dengan kesepakatan setelah musim panen dibayar. Dengan cara ini para petani biasanya merasa aman karena modal usaha yang mereka butuhkan bisa disediakan oleh para toke. Sementara itu kelembagaan penyimpanan seperti lumbung pangan tidak lagi memainkan peran yang cukup penting bagi rumahtangga pedesaan karena hasil produksi pertanian beberapa tahun belakangan ini dirasakan semakin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumahtangga sehingga produksi pangan cenderung segera dijual atau habis untuk konsumsi pangan keluarga.

6.5 Rangkuman Masalah dan Tantangan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau

1. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang tinggi

(3.1% per tahun) berimplikasi pada tingginya laju kebutuhan pangan, sementara produktivitas, produksi dan laju produksi pangan setempat relatif lebih rendah sehingga terjadi kesenjangan antara produksi lokal dan kebutuhan pangan yang berakibat pada tingginya ketergantungan pangan dari pasokan luar daerah/luar negeri. Peranan produksi pangan lokal, khususnya beras saat ini masih jauh dibawah 50 persen dari total kebutuhan.

2. Kapasitas produksi pangan di Provinsi Kepulauan Riau semakin terbatas karena : a) masih tingginya konversi lahan produktif ke lahan non pertanian tanaman pangan (perumahan, perkebunan, fasilitas sosial); b) kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan sehingga hasilnya tidak mampu mensejahterakan petani dan berakibat pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi; c) terbatasnya teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani; d) kurangnya bimbingan kepada petani karena tidak difungsikannya institusi penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu, e) jenis tanah yang didominasi oleh tanah meah; f) terbatasnya jumlah air untuk pertanian dan sistem pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan; dan g) rendahnya akses petani terhadap modal usaha dan informasi produksi pangan karena tidak berfungsinya lembaga penyuluhan pertanian;
3. Kurang berkembangnya areal pertanian pangan tanaman pangan, khususnya tanaman pangan sebagai akibat tingginya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian memerlukan suatu rencana tata ruang wilayah yang mantap guna menetapkan alokasi lahan pertanian. Alokasi lahan pertanian ini perlu didukung dengan peraturan daerah guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dan tata ruang wilayah;
4. Tingkat ketergantungan pangan pada pasokan luar daerah yang tinggi memungkinkan terjadinya kerawanan pangan apabila tidak diimbangi dengan implementasi Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi yang baik dan tepat waktu, dukungan prasarana dan sarana

- transportasi dan pergudangan yang memadai yang memungkinkan mobilisasi pangan antar kabupaten/kota dan antar waktu untuk menjamin stabilitas harga dan akses pangan bagi yang membutuhkan;
5. Rataan konsumsi pangan yang masih belum memenuhi norma gizi seimbang (PPH), dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap beras, konsumsi minyak dan lemak serta gula yang berlebih, serta di sisi lain kontribusi pangan hewani, sayuran dan buah, kacang-kacangan serta umbi-umbian masih jauh dari norma yang dianjurkan menurut PPH. Ketidakseimbangan ketersediaan pangan dan faktor ketidaktahuan merupakan unsur-unsur penyebab ketidakseimbangan konsumsi pangan tersebut.
 6. Sekitar 1 anak per 10 anak masih mengalami masalah gizi kurang. Berdasarkan indeks kerawanan pangan yang dikembangkan oleh WFP, dua kabupaten yaitu Lingga dan Natuna tergolong rawan dan cukup rawan dengan penyebab utama produksi pangan yang rendah (khususnya Kota Batam) dan kombinasinya dengan tingkat kemiskinan, serta akses terhadap air bersih serta fasilitas kesehatan yang rendah (jarak yang > 5 km).
 7. Kelembagaan pangan di tingkat Provinsi belum terbentuk. Di tingkat masyarakat kelembagaan ketahanan pangan yang berkembang lebih mengarah pada kelembagaan untuk mendukung '*coping mechanism*', sementara kelembagaan cadangan pangan seperti lumbung pangan belum ada atau kurang berfungsi lagi.

BAB VII

REKOMENDASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

7.1 Tujuan

Pembangunan ketahanan pangan merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional yang terutama diarahkan pada upaya menjamin ketersediaan dan akses setiap rumah tangga dan individu terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah dan mutu yang baik, aman dikonsumsi serta sesuai norma gizi agar dapat menunjang hidup yang aktif, produktif dan sehat sepanjang waktu, sesuai amanat UU No 7 tentang pangan.

Berdasarkan hal itu, tujuan penyusunan Analisis Strategis Ketahanan Pangan untuk Provinsi Kepulauan Riau 2009 – 2015 adalah untuk memberikan panduan dalam penyusunan kebijakan dan program ketahanan pangan yang mencakup lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau yang tangguh melalui suatu iklim yang kondusif bagi berfungsi dan berkembangnya subsistem produksi, ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan secara sinergis dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang sesuai norma gizi seimbang dan mengutamakan kemandirian dan potensi lokal serta mengurangi ketergantungan pada daerah/negara lain;
3. Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat, sepanjang waktu bagi setiap rumah tangga/individu;
4. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal baik sumber karbohidrat maupun

sumber protein, vitamin dan mineral dalam kerangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan bergizi seimbang, sekaligus menurunkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada beras;

5. Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu pemantauan kewaspadaan dini terhadap adanya indikasi gejala rawan pangan, gizi kurang, gizi buruk dan kelaparan melalui implementasi SKPG serta melakukan langkah-langkah operasional yang diperlukan dalam penanganan masalah pangan dan gizi meliputi antisipasi/mitigasi, dan tan. rurat bagi kelompok rawan pangan;
6. Membangun cadangan pangan daerah yang dikelola oleh masyarakat melalui kerjasama masyarakat, termasuk swasta dan pemerintah propinsi serta kabupaten/kota untuk mewujudkan ketahanan pangan di setiap rumahtangga dan meningkatkan pendapatan petani;
7. Memantapkan rencana tata ruang wilayah dan menetapkan alokasi lahan pertanian dengan peraturan daerah guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dan tata ruang wilayah;
8. Memantapkan kelembagaan struktural ketahanan pangan daerah melalui pembentukan unit kerja ketahanan pangan dan Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga fungsional koordinasi, baik antar lembaga, maupun antar instansi terkait di provinsi serta kabupaten/kota; antar daerah
9. Mengembangkan kerjasama jaringan distribusi dan informasi pangan baik inter maupun intra kabupaten/kota serta menggerakkan partisipasi dan komitmen dari seluruh stakeholders yang ada di daerah serta merevitalisasi dan mengembangkan sistem penyuluhan agar mampu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan oleh penyuluh pertanian, kesehatan dan gizi

dalam upaya pemantapan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan mengatasi kerawanan pangan dan gizi

7.2 Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan Analisis Strategis Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Berkembang dan diimplementasikannya sistem informasi dan pemantauan serta penanganan kerawanan pangan dan gizi
2. Menurunnya persentase rumahtangga defisit energi, anak balita gizi kurang dan daerah yang mengalami kerawanan pangan;
3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu (keragaman dan keamanan pangan) yang cukup sesuai AKG dan PPH sebelum atau selambat-lambatnya tahun 2015
4. Menurunnya tingkat ketergantungan pangan dari luar dan tercapainya kestabilan ketersediaan dan harga pangan antar waktu dan antar wilayah seiring dengan peningkatan produksi pangan.

7.3 Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk menghadapi masalah dan tantangan yang menghambat proses dan kinerja sub-sub sistem ketahanan pangan, baik sub-sistem produksi dan ketersediaan pangan, distribusi, dan konsumsi serta status gizi, serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kecukupan pangan dan mengupayakan tercapainya status gizi yang baik bagi setiap rumahtangga/individu.

Kebijakan ketahanan pangan dikelompokkan atas kebijakan jangka pendek, dan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah kurang pangan (kerawanan pangan) dan gizi kurang,

baik melalui upaya-upaya yang bersifat kedaruratan untuk mengatasi kerawanan pangan transien (mendadak), maupun upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dalam mengatasi masalah pangan dan gizi yang dihadapinya (untuk kerawanan pangan kronis). Termasuk dalam kebijakan jangka pendek adalah tersusunnya kelembagaan formal ketahanan pangan daerah di semua kabupaten/kota pada tingkat yang dipandang efektif untuk merencanakan dan mengelola program pembangunan ketahanan pangan di wilayahnya.

Kebijakan jangka menengah dan panjang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Popinsi Riau dalam produksi/penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan bagi seluruh penduduknya sepanjang waktu agar dapat hidup aktif, produktif dan sehat.

7.3.1. Kebijakan Jangka Pendek

- a. Pengembangan dan pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan pengembangan jaring pengaman pangan untuk penanggulangan kerawanan pangan dan gizi
- b. Pengembangan ketahanan pangan pada kelompok rawan pangan kronis (pemberdayaan rumahtangga miskin dan rawan pangan/gizi)
- c. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan struktural ketahanan pangan (Dewan dan badan/Unit Ketahanan Pangan) di tingkat provinsi dan di setiap kabupaten/kota.

7.3.2. Kebijakan Jangka Menengah Dan Panjang

a. Peningkatan produksi pangan

Kebijakan di bidang produksi pangan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan anekaragam pangan dari produksi setempat dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal di bidang tanaman pangan, perikanan, peternakan dan juga perkebunan melalui:

- i. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data sumberdaya lahan potensial untuk produksi pangan

- ii. Memantapkan rencana tata ruang wilayah, penataan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan, air, perairan dan laut, serta menetapkan alokasi lahan pertanian dengan peraturan daerah guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan
 - iii. Perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur pendukung produksi pertanian, khususnya sistem irigasi untuk meningkatkan frekuensi tanam dan produktivitas lahan
 - iv. Peningkatan penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk, bibit bermutu dan input produksi lainnya serta akses terhadap modal usaha melalui penyediaan kredit produktif berbunga rendah
 - v. Revitalisasi peran koperasi dalam pengadaan dan penyaluran input dan pemasaran hasil
 - vi. Pengembangan teknologi produksi dan terutama teknologi pasca panen, khususnya untuk menekan kehilangan pasca panen pada saat proses perontokan, pengeringan, penggilingan, maupun transportasi
 - vii. Peningkatan insentif produksi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang diiringi dengan pentargetan sasaran dan pengawasan yang ketat untuk menjamin efektifitas dan efisiensi insentif produksi
 - viii. Melakukan pengembangan sistem penyuluhan agar mampu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan dalam produksi dan pemanfaatan hasil pertanian
- b. Pengembangan Ketersediaan Pangan**
- i. Peningkatan kemampuan dan kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan swasta untuk secara sinergis berperan aktif dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani,
 - ii. Pengaturan impor dan ekspor pangan untuk menjamin ketahanan pangan

- iii. Mengembangkan kerjasama jaringan distribusi dan informasi pangan baik inter maupun intra propinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Pengembangan distribusi dan aksesibilitas pangan**
 - i. Peningkatan efisiensi dan kelancaran distribusi pangan
 - ii. Peningkatan pengawasan kelancaran pasokan pangan dan stabilitas harga pangan strategis
 - iii. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan daya beli pangan melalui kegiatan produktif dan berkesinambungan
- d. Pengembangan konsumsi pangan yang aman dan bergizi seimbang serta perbaikan status gizi**
 - i. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pemilihan pangan yang aman dan bergizi seimbang
 - ii. Pengembangan diversifikasi konsumsi pangan
 - iii. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan
 - iv. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan status gizi balita

Rincian komponen-komponen kebijakan pembangunan ketahanan pangan di atas ke dalam komponen-komponen kebijakan operasional, target kebijakan/indikator pencapaian dan Lembaga terkait disajikan pada Tabel 60.:

Tabel 60 Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan, Target Kebijakan, Kegiatan dan Instansi yang Terlibat

No	Kebijakan	Target Kebijakan/ Indikator Pencapaian	Kegiatan	Instansi yang Terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan dan pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan pengembangan jaring pengaman pangan untuk penanggulangan kerawanan pangan dan gizi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terpantaunya masalah kerawanan pangan dan gizi ▪ Tertanganinya masalah kerawanan pangan dan gizi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sistem informasi dini dan tepat waktu (early and timely warning) untuk pemantauan kerawanan pangan dan gizi ▪ Pelaksanaan <i>surveillance</i> kewaspadaan pangan dan gizi ▪ Pengembangan dan pengadaan stok cadangan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi ▪ Penyaluran bantuan pangan dan atau ▪ Kampanye/gerakan kepedulian penanggulangan kerawanan pangan dan gizi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ Distan ▪ Dolog ▪ Dinkes ▪ Dinsos ▪ Perguruan Tinggi ▪ LSM
2.	Pengembangan ketahanan pangan pada kelompok rawan pangan kronis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan sumber penghasilan dan peningkatan daya beli ▪ Peningkatan informasi dan akses terhadap bantuan pangan darurat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan kesempatan kerja/ <i>food for work</i> (padat karya) ▪ Penyediaan akses terhadap modal kerja/usaha ▪ Peningkatan ketrampilan usaha dan manajemen sumberdaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bappeda ▪ Distan/nak/kan ▪ Dolog ▪ Dinkes ▪ Kimpraswil ▪ Dinsos ▪ LSM

No	Kebijakan	Target Kebijakan/ Indikator Pencapaian	Kegiatan	Instansi yang Terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pengembangan dan pemantapan kelembagaan struktural ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya DKP dan BKP di provinsi serta seluruh kabupaten/kota ▪ Tersedianya SDM Ketahanan Pangan yang kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan DKP dan BKP ▪ Pelatihan SDM dalam perencanaan ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemda ▪ DPRD
4	Peningkatan produksi pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan produksi pangan setempat ▪ Menurunnya tingkat ketergantungan "impor" ▪ Peningkatan kesejahteraan petani ▪ Tersedianya RTR dan penetapan alokasi lahanpertani/lahan abadi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan ketersediaan dan kualitas data sumberdaya lahan potensial untuk produksi pangan ▪ Pemantapan rencana tata ruang wilayah, penataan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan, air, perairan dan laut, ▪ Penetapan alokasi lahan pertanian & lahan abadi dengan peraturan daerah guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan ▪ Perbaikan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur pendukung produksi pertanian, khususnya sistem irigasi untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPN ▪ Bappeda ▪ Distan/nak/kan ▪ Dolog ▪ Dinkes ▪ Kimpraswil ▪ Koperasi ▪ LSM ▪ Swasta

No	Kebijakan	Target Kebijakan/ Indikator Pencapaian	Kegiatan	Instansi yang Terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>meningkatkan frekuensi tanam dan produktivitas lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan penyediaan dan pemerataan distribusi pupuk bibit bermutu dan input produksi lainnya ▪ Revitalisasi peran koperasi dalam pengadaan dan penyaluran input dan pemasaran hasil ▪ Pengembangan teknologi produksi dan terutama teknologi pasca panen, khususnya untuk menekan kehilangan pasca panen pada saat proses perontokan, pengeringan, penggilingan, maupun transportasi ▪ Peningkatan insentif produksi ▪ Revitalisasi dan pengembangan sistem penyuluhan dan pendampingan dalam produksi dan pemanfaatan hasil pertanian 	

No	Kebijakan	Target Kebijakan/ Indikator Pencapaian	Kegiatan	Instansi yang Terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Pengembangan Ketersediaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya sistem cadangan pangan daerah ▪ Lancarnya ekspor-impor pangan secara efisien dan terhindarnya gejolak harga antar waktu dan wilayah ▪ Berkembangnya teknologi pasca panen, teknologi proses dan teknologi pangan untuk penyimpanan, pengawetan dan pengolahan pangan ▪ Tersedianya sistem informasi pangan yang akurat dan up to date 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemampuan dan kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan swasta secara sinergis dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan ▪ Pengaturan impor dan ekspor pangan untuk menjamin ketahanan pangan ▪ Pengembangan teknologi dan produk pangan olahan bermutu dan aman berbasis sumberdaya pangan lokal ▪ Pengembangan kerjasama jaringan distribusi dan informasi pangan baik inter maupun intra propinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perdagangan ▪ Bappeda ▪ Distan/nak/kan ▪ Dolog ▪ Kominfo ▪ Kimpraswil ▪ DLLAJR ▪ Bea cukai ▪ LSM ▪ Swasta
6	Pengembangan distribusi dan aksesibilitas pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan daya beli masyarakat terhadap beragam pangan ▪ Stabilitas harga pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan efisiensi dan kelancaran distribusi pangan ▪ Peningkatan pengawasan kelancaran pasokan pangan dan stabilitas harga pangan utama ▪ Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perdagangan ▪ Bappeda ▪ Distan/nak/kan ▪ Dolog ▪ DLLAJR ▪ Kimpraswil ▪ LSM ▪ Swasta

No	Kebijakan	Target Kebijakan/ Indikator Pencapaian	Kegiatan	Instansi yang Terlibat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			untuk peningkatan daya beli pangan melalui kegiatan produktif dan berkesinambungan	
7	Pengembangan konsumsi pangan yang aman dan bergizi seimbang serta perbaikan status gizi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tercapainya skor PPH 100 sebelum atau selambat-lambatnya 2015 ▪ Tidak tersedia dan beredarnya pangan yang tidak aman di pasaran ▪ Penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk hingga bukan menjadi masalah gizi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pemilihan pangan yang aman dan bergizi seimbang ▪ Pengembangan diversifikasi konsumsi pangan ▪ Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan ▪ Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan status gizi balita 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perdagangan ▪ BPOM ▪ Bappeda ▪ Distan/nak/kan ▪ Dolog ▪ LSM ▪ Industri

7.4 Alternatif Kelembagaan Ketahanan Pangan

Keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan perlu didukung oleh sarana, prasarana, dan **kelembagaan**. Kelembagaan dimaksud berupa Badan Ketahanan Pangan di Provinsi yang perlu dipertimbangkan keberadaannya di provinsi Kepulauan Riau, hal ini didasari pada beberapa pemikiran:

Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari:

- 1) Sub sistem Ketersediaan pangan, yaitu kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik berasal dari produksi, impor, maupun cadangan pangan
- 2) Subsistem distribusi pangan, mencakup aksesibilitas pangan antarwilayah dan antarwaktu serta stabilitas harga pangan strategis
- 3) Subsistem konsumsi pangan, yang mencakup jumlah, mutu, gizi, keamanan, dan keragaman konsumsi pangan

Keberhasilan pembangunan ketiga subsistem tersebut perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana, kelembagaan, disamping dukungan faktor-faktor penunjang lain seperti kebijakan, peraturan, pembinaan, dan pengawasan.

Mengacu pada PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, standar, dan kriteria pemerintah dalam kerangka pembangunan nasional.

Disadari bahwa pangan merupakan suatu komoditas strategis, bersifat politis, dan merupakan hak azasi manusia yang pengolaannya melibatkan

stakeholder yang banyak dan beragam, sehingga mewujudkan ketahanan pangan yang efektif, efisien, serta optimal diperlukan suatu kelembagaan khusus yang dapat mengkoordinir secara sinergis dan tidak berpihak kepada salah satu sektor atau subsektor serta secara langsung berada di bawah Gubernur, Lembaga tersebut dapat berbentuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau.

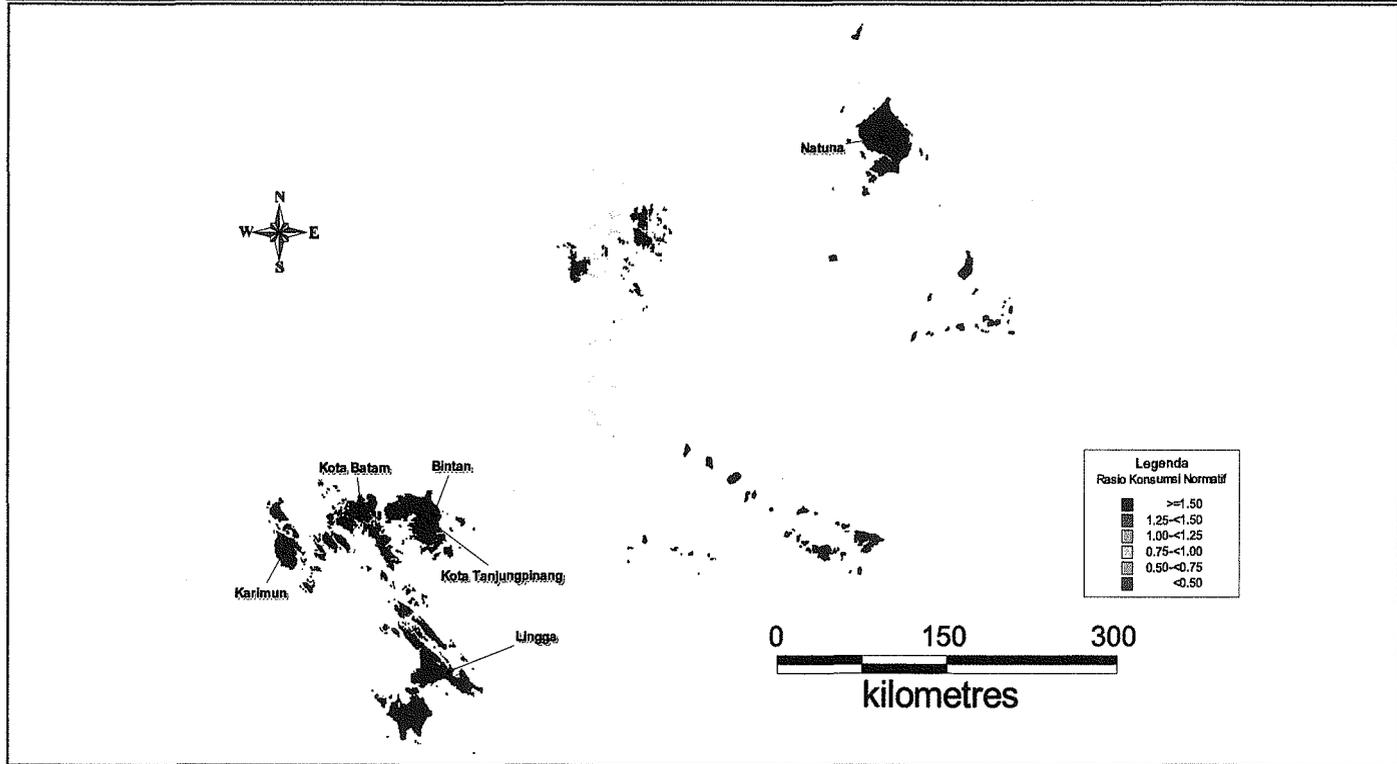
DAFTAR PUSTAKA

- [Bappeda] Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2007. RPJM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005 – 2010. Tanjungpinang.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2007. Kepulauan Riau dalam Angka.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2008. Kepulauan Riau dalam Angka.
- [DKP] Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009. 2006. Jakarta.
- Agung IN. 1997. Penelitian Evaluasi: Analisis Kebijakan atau Evaluasi Program. Makalah.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2005. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Tanjungpinang.
- Dinas Kesehatan. 2005. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2005. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tanjungpinang.
- Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan. 2007. Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan tahun 2005 – 2010. Tanjungpinang.
- Handewi, P.S. Rachman dan Mewa Ariani. 2002. Ketahanan Pangan : Konsep, Pengukuran dan Strategi. FAE. Vol 20. No.1 . Juli 2002.
- Hardinsyah. 2001. Pembangunan Pangan di Era Ekonomi Daerah Prosuding Dialog dan Loka Karya Kebijakan dan Program Pangan, Ketahanan Pangan di Era Ekonomi.. Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi IPB. Bogor.
- Moser CON, McIlwaine C. 1997. *Household Response to Poverty and Vulnerability : Confronting Crisis in Commonwealth, Metro Manila, Philippines*. Series : Urban Management Program (Series). World Bank. Washington DC

- Pranadji, Tri. 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Membangun Pertanian dan Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi. Badan Litbang dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Rangkuti F. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tanziha, Ikeu, Titik Sumarti, Mewa Ariani. 2008. Review Kebijakan Dan Dinamika Sosial Terkait Ketahanan Pangan Dan Kelaparan Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. IPB. Bogor.
- Tanziha, Ikeu dan Dadang Sukandar. 2009. Analisis Cost Effectifness Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kota Bogor. Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. IPB. Bogor.
- Uphoff, Norman. 1992. *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. Gatekeeper series no.31

LAMPIRAN

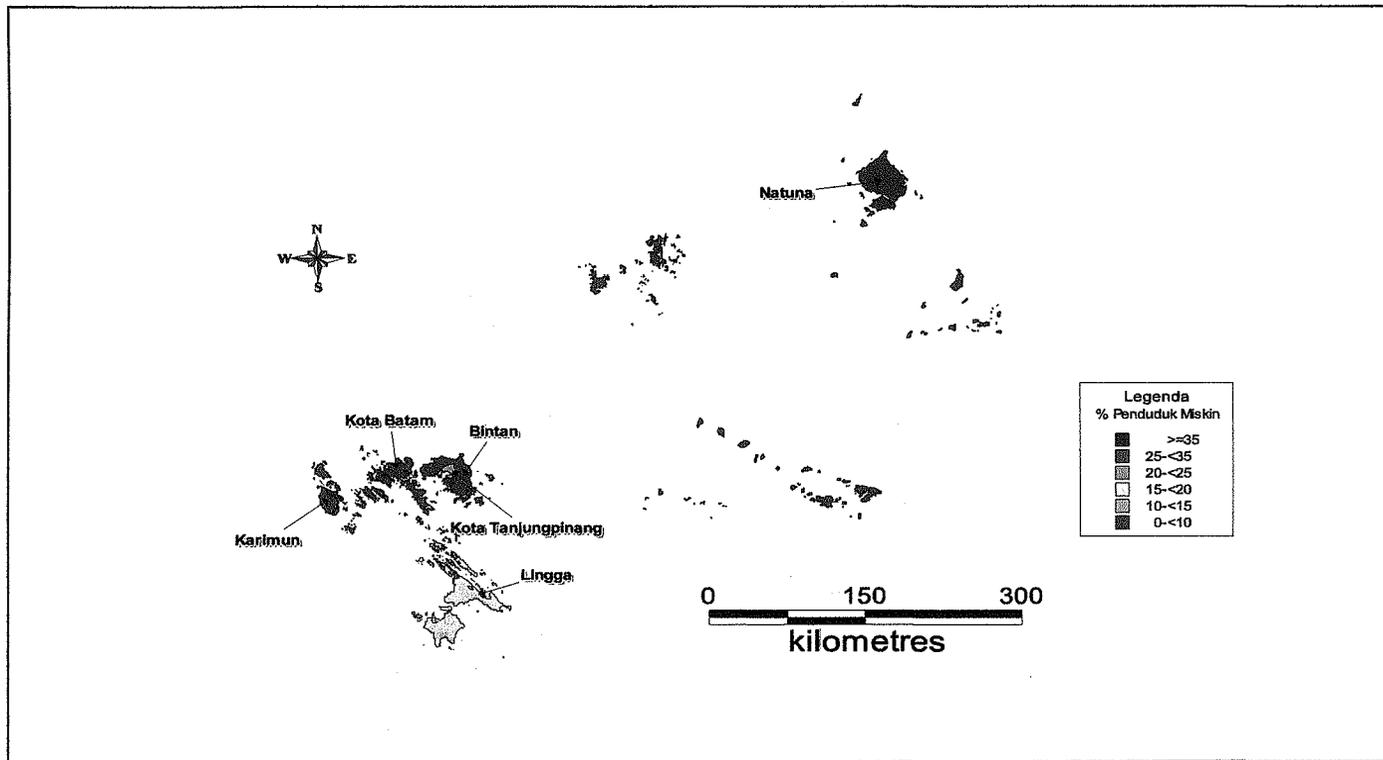
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Produksi Bersih Serealia
Ratio of Per Capita Normative Consumption to Net Production of Cereals



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

Penduduk Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

People Living Below Poverty Line



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
Desa yang Tidak Bisa Dilalui Kendaraan Roda Empat
Villages not Connected by Four Wheel Vehicle

